



LAPORAN KEUANGAN Tahun 2025

Audited

BA 078
**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**

LAPORAN KEUANGAN Tahun 2025

Audited

BA 078

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**



Kata Pengantar

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai kewajiban, antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang dipimpinnya.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, biaya untuk pelaksanaan tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, PPATK adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan PPATK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 ini disusun dalam upaya menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2025 berbasis akrual yang lebih baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami senantiasa berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Kami berharap bahwa laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada PPATK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuangan ini. PPATK mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas laporan keuangan pada masa mendatang akan menjadi semakin baik.

Jakarta, 7 Mei 2026
Kepala PPATK,



Ivan Yustiavandana





Daftar Isi

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	v
Daftar Lampiran	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
Laporan Realisasi Anggaran	4
Neraca	5
Laporan Operasional	6
Laporan Perubahan Ekuitas	7
Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	9
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4. Basis Akuntansi	12
A.5. Dasar Pengukuran	13
A.6. Kebijakan Akuntansi	13
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1. Pendapatan	23
B.2. Belanja	26
B.2.1. Belanja Pegawai	27
B.2.2. Belanja Barang	30
B.2.3. Belanja Modal.....	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
C.1. Aset Lancar	33
C.2. Aset Tetap	38
C.3. Aset Lainnya	45
C.4. Kewajiban	47
C.5. Ekuitas	49
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	49
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
F. Pengungkapan Lain-Lain	61



Daftar Tabel

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Daftar Tabel

Tabel 1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.....	1
Tabel 2	: Ringkasan Neraca Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2025.....	2
Tabel 3	: Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2025.....	2
Tabel 4	: Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.....	3
Tabel 5	: Penggolongan Kualitas Piutang	17
Tabel 6	: Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	19
Tabel 7	: DIPA PPAK Tahun 2025	22
Tabel 8	: DIPA PPAK Berdasarkan Program Tahun 2025	23
Tabel 9	: Rincian Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025.....	23
Tabel 10	: Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.....	25
Tabel 11	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	26
Tabel 12	: Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.....	27
Tabel 13	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024.....	27
Tabel 14	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024... ..	30
Tabel 15	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024.	33
Tabel 16	: Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	34
Tabel 17	: Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi <i>Software</i> per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	35
Tabel 18	: Rincian Kualitas Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	36
Tabel 19	: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025.....	37
Tabel 20	: Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2024.....	37
Tabel 21	: Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024.....	38
Tabel 22	: Mutasi Tanah Per 31 Desember 2025.....	40
Tabel 23	: Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025.....	41
Tabel 24	: Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025.....	43
Tabel 25	: Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025.....	43
Tabel 26	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	44
Tabel 27	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.....	44
Tabel 28	: Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel 29	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025.....	45
Tabel 30	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025.....	46
Tabel 31	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024.....	47
Tabel 32	: Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	49
Tabel 33	: Perbandingan Rincian Beban Pegawai Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.....	50

Tabel 34	:	Perbandingan Rincian Beban Persediaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.....	52
Tabel 35	:	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.....	53
Tabel 36	:	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	55
Tabel 37	:	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.....	56
Tabel 38	:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.	57
Tabel 39	:	Rincian Transaksi Antar Entitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.....	60
Tabel 40	:	Daftar Tuntutan Hukum.....	61
Tabel 41	:	Rincian Output Strategis Untuk Periode 31 Desember 2025.....	62
Tabel 42	:	Rincian Output untuk periode 31 Desember 2025.....	62
Tabel 43	:	Rincian Program/Kegiatan Prioritas Nasional untuk 31 Desember 2025.....	64



Daftar Grafik

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Daftar Grafik

Grafik 1	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025	26
----------	--	----



Daftar Lampiran

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Daftar Lampiran

1. Neraca Percobaan Tingkat Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2025	A
2. Neraca Tingkat Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2025 dan 2024.....	B
3. Laporan Operasional Tingkat Kementerian/Lembaga untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024.....	C
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Kementerian/Lembaga untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024.....	D
5. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025.....	E
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025	F
7. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025	G
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025	H
9. Daftar Rekening Pemerintah	I
10. Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya, dan Setara Kas	J
11. Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	K
12. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca.....	L
13. Nota Kesepakatan Final.....	M



Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2026

Kepala PPATK,



Ivan Yustiavandana



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 ini telah disusun dan dijelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.926.939.757. Realisasi Belanja PPATK untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp376.849.451.491 atau mencapai 94,21% dari alokasi anggaran sebesar Rp400.000.516.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	374.600.000	1.926.939.757	514,40	1.428.909.261
JUMLAH PENDAPATAN		374.600.000	1.926.939.757	514,40	1.428.909.261
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1	204.904.327.000	204.410.476.008	99,76	177.088.426.719
Belanja Barang	B.2.2	132.801.930.000	112.858.101.881	84,98	87.259.482.589
Belanja Modal	B.2.3	62.294.259.000	59.580.873.602	95,64	2.056.906.375
JUMLAH BELANJA		400.000.516.000	376.849.451.491	94,21	266.404.815.683

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024.

Nilai Aset PPATK per 31 Desember 2025 dicatat dan dijelaskan sebesar Rp544.125.864.399.067.278 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp19.677.120.036, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp495.003.957.842, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp29.444.786.521.

Nilai Kewajiban PPATK seluruhnya tersaji sebesar Rp12.007.979.738 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas PPATK tersaji sebesar Rp532.078.233.744.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Ringkasan Neraca
per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
ASET					
Aset Lancar	C.1	19.677.120.036	14.124.695.667	5.552.424.369	39,31
Aset Tetap	C.2	495.003.957.842	476.996.127.775	18.007.830.067	3,78
Aset Lainnya	C.3	29.444.786.521	20.374.708.388	9.070.078.133	44,52
JUMLAH ASET		544.125.864.399	511.495.531.830	32.630.332.569	6,38
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek	C.4	12.047.630.655	9.887.270.401	2.160.360.254	21,85
JUMLAH KEWAJIBAN		12.047.630.655	9.887.270.401	2.160.360.254	21,85
EKUITAS					
Ekuitas	C.5	532.078.233.744	501.608.261.429	30.469.972.315	6,07
JUMLAH EKUITAS		532.078.233.744	501.608.261.429	30.469.972.315	6,07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		544.125.864.399	511.495.531.830	32.630.332.569	6,38

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.625.908.253, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp343.575.768.437, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp341.949.860.184). Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp5.450.938.946, sehingga Defisit-LO terjadi sebesar (Rp336.498.921.238).

Ringkasan Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Ringkasan Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	D.1	1.625.908.253	2.509.005.227	(883.096.974)	(35,20)
BEBAN	D.2 - D.8	343.575.768.437	290.255.557.765	53.320.210.672	18,37
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(341.949.860.184)	(287.746.552.538)	(54.203.307.646)	18,84
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9 - D.12				
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.450.938.946	(1.288.708.724)	6.739.647.670	(522,98)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(336.498.921.238)	(289.035.261.262)	(47.463.659.976)	16,42
POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(336.498.921.238)	(289.035.261.262)	(47.463.659.976)	16,42

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp501.608.261.429 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp336.498.921.238). Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas (Rp7.953.618.181) dan Transaksi Antar-Entitas senilai total Rp374.922.511.734, sehingga Ekuitas entitas pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp532.078.233.744. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 4.

Tabel 4
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
EKUITAS AWAL	E.1	501.608.261.429	519.297.103.369	(17.688.841.940)	(3,41)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(336.498.921.238)	(289.035.261.262)	(47.463.659.976)	16,42
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(7.953.618.181)	(21.999.600)	(7.931.618.581)	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		99.900	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(7.938.251.272)	(21.999.600)	(7.916.251.672)	-
Lain-lain		(15.466.809)	-	(15.466.809)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	374.922.511.734	271.368.418.922	103.554.092.812	38,16
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		30.469.972.315	(17.688.841.940)	48.158.814.255	(272,26)
EKUITAS AKHIR	E.5	532.078.233.744	501.608.261.429	30.469.972.315	6,07

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan yang meliputi perubahan manajemen dan kegiatan yang dibiayai dari hibah.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca per 31 Desember 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh PPATK untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	374.600.000	1.926.939.757	514,40	1.428.909.261
JUMLAH PENDAPATAN		374.600.000	1.926.939.757	514,40	1.428.909.261
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1	204.904.327.000	204.410.476.008	99,76	177.088.426.719
Belanja Barang	B.2.2	132.801.930.000	112.858.101.881	84,98	87.259.482.589
Belanja Modal	B.2.3	62.294.259.000	59.580.873.602	95,64	2.056.906.375
JUMLAH BELANJA		400.000.516.000	376.849.451.491	94,21	266.404.815.683

Jakarta, 7 Mei 2026

Kepala PPATK,



Ivan Yustiavandana



Neraca

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Neraca

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
ASET					
Aset Lancar	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	9.090.909	-	9.090.909	-
Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	C.1.4	17.217.662.149	12.228.109.622	4.989.552.527	40,80
Pendapatan yang masih harus diterima	C.1.5	24.776.500	136.500.000	(111.723.500)	100,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.6	1.505.889.959	1.263.761.136	242.128.823	19,16
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.7	(1.082.251.278)	(426.885.565)	(655.365.713)	153,52
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		423.638.681	836.875.571	(413.236.890)	(49,38)
Persediaan	C.1.8	2.001.951.797	923.210.474	1.078.741.323	116,85
Persediaan belum Diregister		-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar		19.677.120.036	14.124.695.667	5.552.424.369	39,31
Aset Tetap	C.2				
Tanah	C.2.1	235.898.373.342	235.898.373.342	-	-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	274.611.037.042	228.394.757.642	46.216.279.400	20,24
Gedung dan Bangunan	C.2.3	235.646.558.027	235.461.247.464	185.310.563	0,08
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	235.602.000	235.602.000	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	1.162.332.490	1.108.869.890	53.462.600	4,82
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	-	1.669.142.180	(1.669.142.180)	-
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(252.549.945.059)	(225.771.864.743)	(26.778.080.316)	11,86
Jumlah Aset Tetap		495.003.957.842	476.996.127.775	18.007.830.067	3,78
Aset Lainnya	C.3				
Aset Tak Berwujud	C.3.1	55.390.344.992	48.359.359.660	7.030.985.332	14,54
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	6.366.430.605	2.034.144.609	4.332.285.996	100,00
Aset Lain-lain	C.3.3	1.669.142.180	303.600.000	1.365.542.180	449,78
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(33.981.131.256)	(30.322.395.881)	(3.658.735.375)	12,07
Jumlah Aset Lainnya		29.444.786.521	20.374.708.388	9.070.078.133	44,52
JUMLAH ASET		544.125.864.399	511.495.531.830	32.630.332.569	6,38
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek	C.4				
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	12.007.979.738	9.820.546.228	2.187.433.510	22,27
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.4.3	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.4	39.650.917	66.724.173	(27.073.256)	100,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.5	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.6	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		12.047.630.655	9.887.270.401	2.160.360.254	21,85
JUMLAH KEWAJIBAN		12.047.630.655	9.887.270.401	2.160.360.254	21,85
EKUITAS					
Ekuitas	C.5				
JUMLAH EKUITAS		532.078.233.744	501.608.261.429	30.469.972.315	6,07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		544.125.864.399	511.495.531.830	32.630.332.569	6,38

Jakarta, 7 Mei 2026

Kepala PPATK,



Ivan Yustiavandana



Laporan Operasional

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

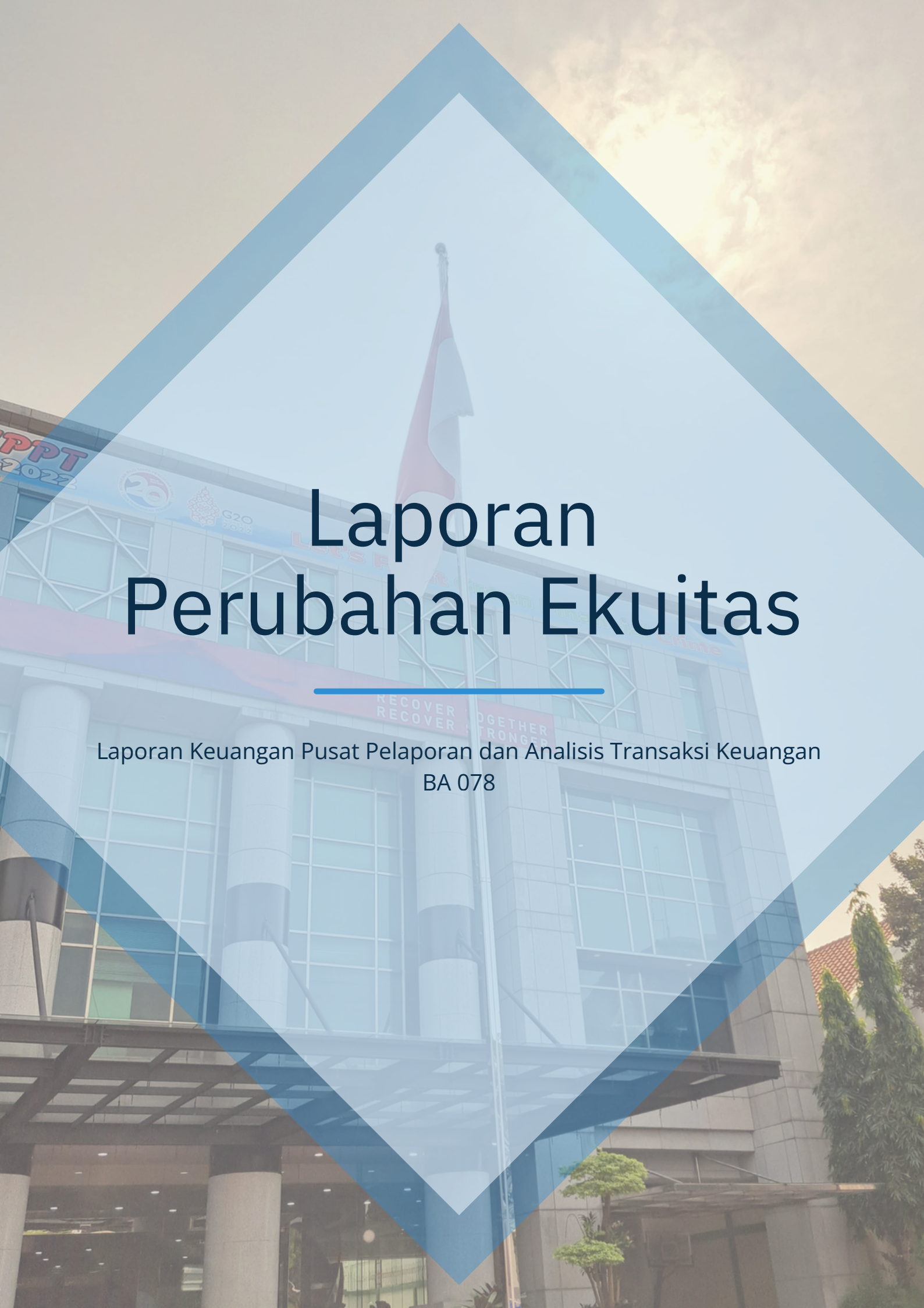
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.625.908.253	2.509.005.227	(883.096.974)	(35,20)
JUMLAH PENDAPATAN		1.625.908.253	2.509.005.227	(883.096.974)	(35,20)
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	203.283.939.711	183.925.089.079	19.358.850.632	10,53
Beban Persediaan	D.3	1.868.231.686	2.035.973.856	(167.742.170)	(8,24)
Beban Barang dan Jasa	D.4	45.781.934.831	33.043.766.219	12.738.168.612	38,55
Beban Pemeliharaan	D.5	37.622.114.162	27.359.056.084	10.263.058.078	37,51
Beban Perjalanan Dinas	D.6	21.834.368.216	14.360.485.622	7.473.882.594	52,04
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	32.529.814.118	29.133.067.053	3.396.747.065	11,66
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	D.8	655.365.713	398.119.852	257.245.861	64,62
JUMLAH BEBAN		343.575.768.437	290.255.557.765	53.320.210.672	18,37
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(341.949.860.184)	(287.746.552.538)	(54.203.307.646)	18,84
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	399.994.000	95.349.346	304.644.654	319,50
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	2.730.320	1.381.151.284	(1.378.420.964)	(99,80)
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		397.263.680	(1.285.801.938)	1.683.065.618	(130,90)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	5.222.250.886	40.001.214	5.182.249.672	12.955,23
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	168.575.620	42.908.000	125.667.620	292,88
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.053.675.266	(2.906.786)	5.056.582.052	(173.957,84)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.450.938.946	(1.288.708.724)	6.739.647.670	(522,98)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(336.498.921.238)	(289.035.261.262)	(47.463.659.976)	16,42
SURPLUS/DEFISIT LO		(336.498.921.238)	(289.035.261.262)	(47.463.659.976)	16,42

Jakarta, 7 Mei 2026

Kepala PPA TK,



Ivan Yustiavandana



Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
EKUITAS AWAL	E.1	501.608.261.429	519.297.103.369	(17.688.841.940)	(3,41)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(336.498.921.238)	(289.035.261.262)	(47.463.659.976)	16,42
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(7.953.618.181)	(21.999.600)	(7.931.618.581)	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		99.900	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(7.938.251.272)	(21.999.600)	(7.916.251.672)	-
Lain-lain		(15.466.809)	-	(15.466.809)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	374.922.511.734	271.368.418.922	103.554.092.812	38,16
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		30.469.972.315	(17.688.841.940)	48.158.814.255	(272,26)
EKUITAS AKHIR	E.5	532.078.233.744	501.608.261.429	30.469.972.315	6,07

Jakarta, 7 Mei 2026

Kepala PPA TK,



Ivan Yustiavandana



Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Catatan atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Ulang Aset Tetap.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang



- Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2022.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas KMK 620/KM.6/2015.
 21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 266/KM.6/2023 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 22. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 107 tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Visi, Misi, dan Tujuan yang akan dicapai PPATK dituangkan dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 2025 s.d. 2029 yang ditetapkan dalam Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2025-2029, sebagaimana berikut:

VISI PPATK

Bersinergi Membangun Indonesia Tanpa Pencucian Uang dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

MISI PPATK

- Memperkuat kebijakan pengelolaan laporan transaksi keuangan.
- Meningkatkan produk intelijen keuangan yang berkualitas.
- Memperkuat kerja sama di tingkat domestik, regional, dan internasional.
- Memperkuat tata kelola PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

TUJUAN PPATK

Terwujudnya efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang Terintegrasi dan Inklusif yang diukur melalui “Indeks Efektivitas Rezim APU PPT PPSPM

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis PPATK 2025-2029 dirumuskan menjadi 2 (dua) yaitu:

- Meningkatnya efektivitas kinerja PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM.
- Meningkatnya kinerja revitalisasi birokrasi PPATK.

Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PPATK yang merupakan lembaga pemerintah dengan kode Bagian Anggaran (BA) 078 dan memiliki dua Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diterima. Satuan Kerja di PPATK terdiri dari Satuan Kerja Kantor Pusat PPATK (Satker 453374) dan Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Satker 417654).

PPATK mengimplementasikan aplikasi SAKTI dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sejak 1 Januari 2019. Aplikasi SAKTI digunakan di PPATK pada Satker 417654 dan Satker 453374 untuk melakukan pencatatan secara transaksional berbasis akrual berdasarkan dokumen yang muncul pada saat transaksi dilakukan. Periode Akuntansi pada aplikasi SAKTI terdiri dari 12 periode normal (Januari-Desember), periode *unaudited*, dan periode *audited*.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

PPATK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kedua basis akuntansi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Dasar pengukuran yang diterapkan PPATK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyajian laporan keuangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang digunakan oleh PPATK. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PPATK diuraikan, sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (KUN) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- e. Pendapatan-LRA di PPATK berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- f. Akun Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin digunakan pada Satker 453374 untuk mencatat penjualan peralatan dan mesin apabila BMN yang dijual masih utuh dan bukan berupa bongkaran.
- g. Akun Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya digunakan Satker 453374 apabila BMN yang dijual berupa bongkaran.

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada PPATK, yaitu:
 - 1) Pendapatan Sewa Lahan, Gedung dan Bangunan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui secara proporsional oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
 - 2) Pendapatan Denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, yaitu pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - 3) Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban-beban yang ada).

- d. Pendapatan dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- e. Pendapatan-LO di PPATK berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- f. Pendapatan PNBP-LO diukur dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di KUN.
 - 2) Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerja sama dalam rangka perikatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.

Aset

5. Aset

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh PPATK sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- c. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

- a) Aset Lancar diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b) Aset Lancar terdiri dari kas atau setara kas, belanja dibayar di muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, piutang, dan persediaan.
- c) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dijelaskan di neraca dengan menggunakan nilai nominal rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dijelaskan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- d) Setara Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- e) Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang akan diterima setelah tanggal pelaporan.
- f) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- g) Piutang dijelaskan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- h) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- i) Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menetapkan bahwa mulai tahun 2021 seluruh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga untuk menerapkan metode pencatatan *Perpetual*. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*. Berdasarkan metode ini, barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Beban Dibayar di
Muka/Uang Muka Belanja

2) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

- a) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu, tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.
- b) Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, sehingga jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.
- c) Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, tetapi pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.
- d) Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka disajikan pada pos Aset Lancar di Neraca.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih

3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 207/PMK.06/2019 tentang
- c) Penggolongan Kualitas Piutang dijelaskan dalam Tabel 5.

Tabel 5
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.		0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	

Aset Tetap

4) Aset Tetap

- a) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- b) Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - i. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - ii. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - iii. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d) Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan, antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- e) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

5) Penyusutan Aset Tetap

- a) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - i. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan.
 - ii. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
 - iii. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah.
 - iv. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa manfaat.
- c) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat dijelaskan dalam Tabel 6.

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	1 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

6) Piutang Jangka Panjang

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- b) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c) TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- d) TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

7) Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- b) Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan uang yang berada dalam penguasaan/rekening pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu.
- c) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud dijelaskan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- d) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 620/KM.6/2015 sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 81/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

- e) Aset Tak Berwujud pada PPAK berupa *software* dan memiliki masa manfaat terbatas hingga empat tahun.
- f) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- c) Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan rekening milik Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung dana pekerjaan kontrak yang belum selesai/diserahterimakan pada akhir tahun anggaran.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Tuntutan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK 231/PMK.05/2022, disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum kepada pemerintah, maka perlakuan akuntansi atas tuntutan hukum kepada pemerintah yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),

Ekuitas



sebagai berikut:

1. Pencatatan Kewajiban

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari pengadilan negeri setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya;
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari pengadilan negeri setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK; dan
- c. Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

2. Pencatatan Aset Tetap

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari pengadilan negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
 - i. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - ii. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat jika SK penghapusan belum terbit.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, tetapi belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat; dan
- c. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Induk Nomor SP DIPA-078.01-0/2025 tanggal 2 Desember 2024, pagu anggaran PPATK pada awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp354.560.077.000.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 hal Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran yang dilakukan *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp19.766.591.000.

Rincian pagu anggaran awal PPATK pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. DIPA Satker 453374 Nomor SP DIPA-078.01.1.453374/2025 pada 2 Desember 2024 sebesar Rp320.282.053.000.
2. DIPA Satker 417654 Nomor SP DIPA-078.01.2.417654/2025 pada 2 Desember 2024 sebesar Rp34.278.024.000.

Rincian DIPA PPATK awal dan setelah revisi dijelaskan pada tabel 7.

Tabel 7
DIPA PPATK Tahun 2025
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan/ Anggaran Awal	Estimasi Pendapatan/ Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan			
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	374.600.000	374.600.000
	Jumlah Pendapatan	374.600.000	374.600.000
Belanja			
1	Belanja Pegawai	157.190.340.000	204.904.327.000
2	Belanja Barang	129.736.463.000	132.801.930.000
3	Belanja Modal	67.633.274.000	62.294.259.000
	Jumlah Belanja	354.560.077.000	400.000.516.000

DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2025 dijelaskan dalam Tabel 8.

Tabel 8
DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2025
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Anggaran Setelah Revisi
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	126.350.135.000	124.076.587.000
WA	Program Dukungan Manajemen	228.209.942.000	275.923.929.000
	Jumlah Belanja	354.560.077.000	400.000.516.000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.926.939.757 dan Rp1.428.909.261. Pendapatan PPATK merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dijelaskan dalam Tabel 9.

Tabel 9
Rincian Realisasi Pendapatan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 DESEMBER 2025		
		Estimasi	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
1.	Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	374.600.000	1.926.939.757	514,40%
a.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	80.000.000	382.540.000	478,18%
b.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	17.454.000	-
c.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	21.000.000	16.595.000	79,02%
d.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	-	98.600.000	-
e.	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	22.232.751	-
f.	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	273.600.000	405.840.000	148,33%
g.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	89.899.997	-
h.	Pendapatan Denda Lainnya	-	874.025.000	-
i.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	281.200	-
j.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	4.005.000	-
k.	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	15.466.809	-
	Jumlah	374.600.000	1.926.939.757	514,40%

PNBP PPATK Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp1.926.939.757, terdiri dari:

1. PNBP dari Satker 453374 sebesar Rp1.358.418.137, yaitu:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp382.540.000 atas hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan.
 - b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp4.952.000.
 - c. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp16.595.000 atas sewa lahan Koperasi Juanda Tiga Lima.
 - d. Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp22.232.751 yang merupakan pengembalian premi asuransi jika tidak ada klaim.
 - e. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp53.787.186.
 - f. Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp874.025.000 merupakan denda yang dikenakan kepada pihak pelapor dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

B.1. Pendapatan (lanjutan)

- g. Penerimaan Kembali Belanja pegawai TAYL sebesar Rp281.200 merupakan pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan di tahun 2024.
 - h. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp4.005.000 merupakan pengembalian belanja barang atas temuan BPK yang menjadi Piutang di Laporan Keuangan tahun 2024.
2. PNPB dari Satker 417654 sebesar Rp568.521.620, yaitu:
 - a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp17.454.000 atas hasil lelang BMN yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan yang seluruhnya berasal dari Satker 417654.
 - b. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp98.600.000 berupa pendapatan dari penggunaan asrama di satker 417654.
 - c. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp405.840.000 merupakan pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pendidikan terkait TPPU dan TPPT di satker 417654.
 - d. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp15.466.809 merupakan pengembalian belanja barang atas temuan BPK yang menjadi Piutang di Laporan Keuangan tahun 2024 yang seluruhnya berasal dari Satker 417654.

Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 10.

Tabel 10
Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Rp	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.926.939.757	1.428.909.261	498.030.496	34,85
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	382.540.000	91.565.346	290.974.654	317,78
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	17.454.000	3.784.000	13.670.000	361,26
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.595.000	88.810.000	(72.215.000)	(81,31)
	d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	98.600.000	114.800.000	(16.200.000)	(14,11)
	e. Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	22.232.751	-	22.232.751	-
	f. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	405.840.000	332.880.000	72.960.000	21,92
	g. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	-	5	(5)	(100,00)
	h. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	89.899.997	13.273.983	76.626.014	577,26
	i. Pendapatan Denda Lainnya	874.025.000	747.975.000	126.050.000	16,85
	j. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	281.200	12.931.366	(12.650.166)	(97,83)
	k. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.005.000	22.889.561	(18.884.561)	(82,50)
	l. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	15.466.809	-	15.466.809	-
	Jumlah	1.926.939.757	1.428.909.261	498.030.496	34,85

B.1. Pendapatan (lanjutan)

Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar (34,85%) dibandingkan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 yang disebabkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Satker 453374 dengan rincian:

Tabel 11
Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Satker 453374
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2025	Tahun 2024	Rp	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Satker 453374	1.358.418.137	976.791.126	381.627.011	39,07
a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	382.540.000	91.565.346	290.974.654	317,78
b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.952.000	-	4.952.000	-
c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.595.000	88.810.000	(72.215.000)	(81,31)
d. Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	22.232.751	-	22.232.751	-
e. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	5	(5)	(100,00)
f. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	53.787.186	12.738.848	41.048.338	322,23
g. Pendapatan Denda Lainnya	874.025.000	747.975.000	126.050.000	16,85
h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	281.200	12.812.366	(12.531.166)	(97,81)
i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.005.000	22.889.561	(18.884.561)	(82,50)

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp290.974.654 atau 317,78% karena meningkatnya penjualan BMN peralatan yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp4.952.000 atau 100,00% karena penjualan hasil sisa bongkaran.
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp41.048.338 atau 322,23% karena meningkatnya jumlah vendor yang tidak dapat menyediakan barang dan jasa tepat waktu.
- Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp126.050.000 atau 16,85% karena meningkatnya pihak pelapor yang dikenakan denda.

Adapun penurunan dengan rincian:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp72.215.000 atau 81,31% karena berkurangnya pihak yang meminjam aset lahan di PPAK.
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Rp12.531.166 atau 97,81% karena berkurangnya temuan BPK terkait belanja pegawai.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu Rp18.884.561 atau 82,50% karena berkurangnya temuan BPK terkait belanja barang.

B.1. Pendapatan (lanjutan)

2. Dari Satker 417654 dengan rincian:

Tabel 12
Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Satker 417654
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2025	Tahun 2024	Rp	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Satker 417654	568.521.620	452.118.135	116.403.485	25,75
a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12.502.000	3.784.000	8.718.000	230,39
b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-	-
c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-	-
d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	98.600.000	114.800.000	(16.200.000)	(14,11)
e. Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	-	-	-
f. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	405.840.000	332.880.000	72.960.000	21,92
g. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	36.112.811	535.135	35.577.676	6.648,36
h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	15.466.809	119.000	15.347.809	12.897,32
i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
j. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
Jumlah	1.926.939.757	1.428.909.261	116.403.485	8,15

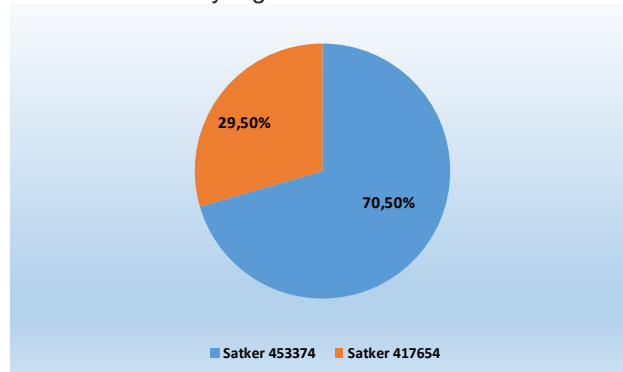
- a. Kenaikan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.718.000 atau 230,39% karena meningkatnya jumlah barang yang di lelang.
- b. Kenaikan Pendapatan Layanan dan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar 72.960.000 atau 21,92% karena meningkatnya kegiatan pelatihan oleh pihak pelapor.
- c. Kenaikan Pendapatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp35.577.676 atau 6.648,36% karena meningkatnya vendor yang tidak dapat memenuhi kontrak.
- d. Kenaikan penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp15.347.809 atau 12.897,32% karena terdapat temuan kelebihan pembayaran belanja pegawai.

Adapun penurunan di Pendapatan Penggunaan Sarana sebesar Rp16.200.000 atau 14,11% karena berkurangnya penggunaan sarana prasarana penginapan untuk kegiatan diklat.

B.1. Pendapatan (lanjutan)

Komposisi pendapatan dapat dilihat dalam grafik yang disajikan dalam Grafik 1.

Grafik 1
Komposisi Pendapatan PNB
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025



Realisasi Belanja (Neto)
Rp376.849.451.491

B.2. Belanja

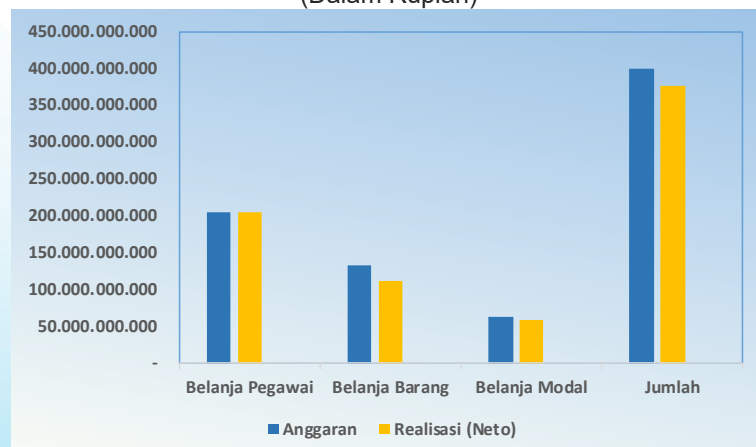
Realisasi Belanja (Neto) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp376.849.451.491 dan Rp266.404.815.683. Realisasi belanja di PPATK terdiri dari realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 menurut jenis belanja dijelaskan dalam Tabel 13.

Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi (Neto)	%
Belanja Pegawai	204.904.327.000	204.410.476.008	99,76
Belanja Barang	132.801.930.000	112.858.101.881	84,98
Belanja Modal	62.294.259.000	59.580.873.602	95,64
Jumlah	400.000.516.000	376.849.451.491	94,21

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik yang disajikan dalam Grafik 2.

Grafik 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)



B.2. Belanja (lanjutan)

Realisasi Belanja 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 41,46% jika dibandingkan dengan realisasi belanja 31 Desember 2024 yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai dan kegiatan. Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 14.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja (Neto)
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi Anggaran 31 Desember 2025 (Neto)	Realisasi Anggaran 31 Desember 2024 (Neto)	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pegawai	204.410.476.008	177.088.426.719	27.322.049.289	15,43
Barang	112.858.101.881	87.259.482.589	25.598.619.292	29,34
Modal	59.580.873.602	2.056.906.375	57.523.967.227	2.796,63
Jumlah	376.849.451.491	266.404.815.683	110.444.635.808	41,46

Realisasi Belanja Pegawai
(Neto) Rp204.410.476.008

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp204.410.476.008 dan Rp177.088.426.719. Realisasi Belanja Pegawai di PPAK pada tahun 2025 digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai di Satker 453374 dan Satker 417654. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 15.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Belanja Bruto				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	20.937.649.780	19.454.568.880	1.483.080.900	7,62
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	277.960	288.313	(10.353)	(3,59)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.187.991.856	1.132.205.376	55.786.480	4,93
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	335.469.516	318.329.585	17.139.931	5,38
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.062.650.000	964.580.000	98.070.000	10,17
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.524.804.000	2.867.061.000	657.743.000	22,94
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	499.792.284	219.122.657	280.669.627	128,09
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	999.396.000	964.561.980	34.834.020	3,61
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.061.835.000	2.030.695.000	2.031.140.000	100,02
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	295.955.000	320.950.000	(24.995.000)	(7,79)
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1.214.949.600	1.204.458.000	10.491.600	0,87
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	289.134.700	285.987.400	3.147.300	1,10
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	4.315.901.600	3.894.028.600	421.873.000	10,83
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	63.060	62.584	476	0,76
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	287.256.990	235.918.740	51.338.250	21,76
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	65.635.068	56.460.104	9.174.964	16,25
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	625.488.000	590.838.000	34.650.000	5,86
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	242.896.680	209.728.320	33.168.360	15,81
511628	Belanja Uang Makan PPPK	978.912.000	490.182.000	488.730.000	99,70
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	12.465.000	-	12.465.000	100,00
512111	Belanja Uang Honor Tetap	1.409.756.470	2.553.369.845	(1.143.613.375)	(44,79)
512211	Belanja Uang Lembur	218.410.000	247.895.000	(29.485.000)	(11,89)
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	82.127.000	46.782.000	35.345.000	75,55
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	142.891.117.339	122.523.888.273	20.367.229.066	16,62
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	18.949.707.728	16.554.116.518	2.395.591.210	14,47
	Jumlah Belanja Bruto	204.489.642.631	177.166.078.175	27.323.564.456	15,42
	Pengembalian Belanja Pegawai	79.166.623	77.651.456	1.515.167	1,95
	Total Belanja Pegawai	204.410.476.008	177.088.426.719	27.322.049.289	15,43

B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

Terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar 15,43%. Kenaikan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Gaji Pokok PNS naik sebesar Rp1.483.080.900 atau sebesar 7,62% karena kenaikan pangkat/golongan PNS dan penambahan jumlah CPNS/PNS.
2. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS naik sebesar Rp55.786.480 atau sebesar 4,93 %, antara lain karena penambahan jumlah pegawai yang menikah.
3. Belanja Tunjangan Anak PNS naik sebesar Rp17.139.931 atau sebesar 5,38% antara lain karena penambahan jumlah tanggungan PNS.
4. Belanja Tunj. Struktural PNS naik sebesar Rp98.070.000 atau sebesar 10,17% antara lain karena sudah terisinya posisi jabatan struktural.
5. Belanja Tunjangan Fungsional PNS naik sebesar Rp657.743.000 atau sebesar 22,94% karena penambahan jumlah pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu dan kenaikan jenjang fungsional.
6. Belanja Tunjangan PPh PNS naik sebesar Rp280.669.627 atau sebesar 128,09%, antara lain karena berubahnya peraturan terkait pajak PPh pasal 21.
7. Belanja Tunjangan Beras PNS naik sebesar Rp34.834.020 atau sebesar 3,61% antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
8. Belanja Uang Makan PNS naik sebesar Rp2.031.140.000 atau sebesar 100,02% karena bertambahnya jumlah pegawai.
9. Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara naik sebesar Rp10.491.600 atau sebesar 0,87% karena posisi pejabat struktural sudah terisi.
10. Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara naik sebesar Rp3.147.300 atau sebesar 1,10% karena ada perubahan besaran pungutan PPh 21.
11. Belanja Gaji Pokok PPPK naik sebesar Rp421.873.000 atau sebesar 10,83% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK.
12. Belanja Pembulatan Gaji PPPK naik sebesar Rp476 atau sebesar 0,76% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK.
13. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK naik sebesar Rp51.338.250 atau sebesar 21,76% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK.
14. Belanja Tunjangan Anak PPPK naik sebesar Rp9.174.964 atau sebesar 16,25% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK.
15. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK naik sebesar Rp34.650.000 atau sebesar 5,86% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK.
16. Belanja Tunjangan Beras PPPK naik sebesar Rp33.168.360 atau sebesar 15,81% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK.

B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

17. Belanja Uang Makan PPPK naik sebesar Rp488.730.000 atau sebesar 99,70% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK.
18. Belanja Tunjangan Umum PPPK naik sebesar Rp12.465.000 atau sebesar 100,00% karena adanya PPPK yang berstatus fungsional umum.
19. Belanja uang Lembur PPPK naik sebesar Rp35.345.000 atau sebesar 75,55% karena meningkatnya kegiatan lembur oleh pegawai berstatus PPPK.
20. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) naik sebesar Rp20.367.229.066 atau sebesar 16,62% karena kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan jumlah CPNS, dan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 sebesar 100% Tunjangan Khusus/Kegiatan.
21. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK naik sebesar Rp2.395.591.210 atau sebesar 14,47% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK.

Penurunan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, terdiri dari:

1. Belanja Pembulatan Gaji PNS turun sebesar Rp10.353 atau sebesar 3,59% karena berkurangnya pembulatan.
2. Belanja Tunjangan Umum PNS turun sebesar Rp24.995.000 atau sebesar 7,79% karena berkurangnya pegawai dengan jabatan fungsional umum.
3. Belanja Uang Honor Tetap turun sebesar Rp1.143.613.375 atau sebesar 44,79% karena Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diangkat menjadi PPPK.
4. Belanja Uang Lembur turun sebesar Rp29.485.000 atau sebesar 11,89% karena berkurangnya kegiatan lembur.

Terdapat pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp79.166.623 yang terdiri dari:

- a. Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp11.138.300.
- b. Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp2.316
- c. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS sebesar Rp4.948.640.
- d. Belanja Tunj. Anak PNS sebesar Rp200.952.
- e. Belanja Tunjangan Struktural PNS sebesar Rp5.770.000.
- f. Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp1.740.000.
- g. Belanja Tunj. Beras PNS sebesar Rp1.231.140.
- h. Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp23.870.000.
- i. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK sebesar Rp320.360.
- j. Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp72.420.
- k. Pengembalian Belanja (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp29.872.495.

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (Neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp112.858.101.881 dan Rp87.259.482.589. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 16.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.291.856.444	5.643.289.668	(4.351.433.224)	(77,11)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	267.857.080	250.621.004	17.236.076	6,88
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	27.480.000	20.496.000	6.984.000	34,07
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.762.632.521	431.386.423	1.331.246.098	308,60
521211	Belanja Bahan	4.691.458.052	2.598.978.258	2.092.479.794	80,51
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	584.700.000	386.900.000	197.800.000	51,12
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.258.031.155	1.791.248.724	466.782.431	26,06
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	53.000.000	75.000.000	(22.000.000)	(29,33)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.499.074.819	1.542.055.432	957.019.387	62,06
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	578.722.424	270.265.661	308.456.763	114,13
522111	Belanja Langganan Listrik	4.892.423.730	5.343.056.009	(450.632.279)	(8,43)
522112	Belanja Langganan Telepon	158.266.732	159.482.341	(1.215.609)	(0,76)
522113	Belanja Langganan Air	166.523.913	148.456.525	18.067.388	12,17
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.475.397.656	3.531.179.901	(55.782.245)	(1,58)
522131	Belanja Jasa Konsultan	4.689.640.613	2.769.879.610	1.919.761.003	69,31
522141	Belanja Sewa	3.164.247.927	2.815.818.055	348.429.872	12,37
522151	Belanja Jasa Profesi	1.676.150.000	891.355.120	784.794.880	88,05
522191	Belanja Jasa Lainnya	16.331.198.494	5.983.515.998	10.347.682.496	172,94
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.039.765.053	1.842.691.723	1.197.073.330	64,96
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	450.264.105	444.655.018	5.609.087	1,26
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.892.774.171	31.071.717.857	2.821.056.314	9,08
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5.127.572.177	4.949.019.357	178.552.820	3,61
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.078.953.657	6.961.249.104	4.117.704.553	59,15
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	616.659.000	591.360.000	25.299.000	4,28
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.762.739.300	1.215.235.260	547.504.040	45,05
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.313.714.446	1.720.008.091	593.706.355	34,52
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	179.412.634	464.604.258	(285.191.624)	(61,38)
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	5.882.476.191	3.445.705.940	2.436.770.251	70,72
	Jumlah Belanja Barang Bruto	112.912.992.294	87.359.231.337	25.553.760.957	29,25
	Pengembalian Belanja	54.890.413	99.748.748	(44.858.335)	(44,97)
	Total Belanja Barang	112.858.101.881	87.259.482.589	25.598.619.292	29,34

Kenaikan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu adalah sebesar 29,34%.

Kenaikan realisasi Belanja Barang disebabkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat naik sebesar Rp17.236.076 atau 6,88% dikarenakan meningkatnya pengiriman dokumen secara fisik.
2. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja naik sebesar Rp6.984.000 atau 34,07% karena bertambahnya kegiatan yang membutuhkan honor.
3. Belanja Barang Operasional Lainnya naik sebesar Rp1.331.246.098 atau 308,60% karena meningkatnya operasional perkantoran.
4. Belanja Bahan naik sebesar Rp2.092.479.794 atau 80,51% karena bertambahnya kegiatan yang membutuhkan alat pendukung.

B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

5. Belanja Barang Honor Output Kegiatan naik sebesar Rp197.800.000 atau 51,12% karena bertambahnya kegiatan yang membutuhkan pembayaran honor.
6. Belanja Barang Non Operasional Lainnya naik sebesar Rp466.782.431 atau 26,06% karena efisiensi anggaran.
7. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi naik sebesar Rp957.019.387 atau 62,06% karena meningkatnya kebutuhan persediaan untuk operasional kantor.
8. Belanja Barang Persediaan Lainnya naik sebesar Rp308.456.763 atau 114,13% karena meningkatnya pembelian persediaan obat-obatan klinik.
9. Belanja Langganan Air naik sebesar Rp18.067.388 atau 12,17% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional di kantor.
10. Belanja Jasa Konsultan naik sebesar Rp1.919.761.003 atau 69,31% karena meningkatnya kegiatan yang menggunakan tenaga ahli.
11. Belanja Sewa naik sebesar Rp348.429.872 atau 12,37% karena meningkatnya biaya sewa kendaraan.
12. Belanja Jasa Profesi naik sebesar Rp784.794.880 atau 88,05% karena bertambahnya kegiatan yang membutuhkan konsultan eksternal.
13. Belanja Jasa Lainnya naik sebesar Rp10.347.682.496 atau 172,94% antara lain disebabkan karena pengelolaan gedung menggunakan vendor.
14. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp1.197.073.330 atau 64,96% karena bertambahnya kegiatan pemeliharaan Gedung dan bangunan.
15. Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp5.609.087 atau 1,26% disebabkan meningkatnya premi.
16. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp2.821.056.314 atau 9,08% karena pergantian lift di Gedung Juanda.
17. Belanja Pemeliharaan Lainnya naik sebesar Rp178.552.820 atau 3,61% karena meningkatnya kegiatan pemeliharaan aset tetap.
18. Belanja Perjalanan Dinas Biasa naik sebesar Rp4.117.704.553 atau 59,15% karena meningkatnya kegiatan audit dan pemeriksaan.
19. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota naik sebesar Rp25.299.000 atau 4,28% karena bertambahnya kegiatan koordinasi dan audit.
20. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota naik sebesar Rp547.504.040 atau 45,05% karena bertambahnya kegiatan sosialisasi dan koordinasi.
21. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota naik sebesar Rp593.706.355 atau 34,52% karena meningkatnya kegiatan sosialisasi dengan pihak pelapor.

B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

22. Belanja Perjalanan Lainnya – luar Negeri naik sebesar Rp342.445.455 atau 97,38% karena meningkatnya kegiatan undangan luar negeri.

Penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa, sebagai berikut:

1. Belanja Keperluan Perkantoran turun sebesar Rp4.351.433.224 atau 77,11% karena efisiensi anggaran dan digitalisasi.
2. Belanja Langganan Listrik turun sebesar Rp450.632.279 atau 8,43% disebabkan efisiensi operasional kantor.
3. Belanja Langganan Telepon turun sebesar Rp1.215.609 atau 0,76% disebabkan berkurangnya penggunaan telepon kantor untuk operasional perkantoran.
4. Belanja Langganan daya dan Jasa Lainnya turun sebesar Rp55.782.245 atau 1,58% disebabkan berkurangnya jumlah lisensi yang digunakan.
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri turun sebesar Rp285.191.624 atau 61,38% karena berkurangnya kegiatan di luar negeri yang terkait dengan keanggotaan FATF

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Barang senilai Rp54.890.413, terdiri dari:

1. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp56.190.
2. Pengembalian Belanja Bahan sebesar Rp513.800.
3. Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp883.334.
4. Pengembalian Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp18.288.000.
5. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp35.060.430.
6. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp88.659.

Realisasi Belanja Modal (Neto)
Rp59.580.873.602

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp59.580.873.602 dan Rp2.056.906.375.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 17.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Belanja Bruto				
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-	-	-
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.474.474.191	364.341.800	55.110.132.391	15.125,94
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.667.695.053	(1.667.695.053)	-
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	-	5.400.000	(5.400.000)	-
533121	Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	334.216.560	-	334.216.560	-
536111	Belanja Modal Lainnya	3.775.346.851	19.969.522	3.755.377.329	18.805,54
	Jumlah Belanja Bruto	59.584.037.602	2.057.406.375	57.526.631.227	2.796,08
	Pengembalian Belanja Modal	3.164.000	500.000	2.664.000	532,80
	Total Belanja Modal	59.580.873.602	2.056.906.375	57.523.967.227	2.796,63

B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

Terjadi kenaikan realisasi Belanja Modal dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 2.796,63%. Kenaikan belanja modal dikarenakan peremajaan peralatan dan mesin di kantor juanda dan terdapat pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Honor sebesar Rp3.164.000.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset Lancar Rp19.677.120.036

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp19.677.120.036 dan Rp14.124.695.667.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar PPATK per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 39,31% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan belanja dibayar dimuka dan jumlah persediaan. Rincian Aset Lancar PPATK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dijelaskan dalam Tabel 18.

Tabel 18
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No.	Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	9.090.909	-	9.090.909	100,00
4	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	17.217.662.149	12.228.109.622	4.989.552.527	40,80
5	Pendapatan yang masih harus diterima	24.776.500	136.500.000	(111.723.500)	(81,85)
6	Piutang Bukan Pajak	1.505.889.959	1.263.761.136	242.128.823	19,16
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1.082.251.278)	(426.885.565)	(655.365.713)	153,52
8	Persediaan	2.001.951.797	923.210.474	1.078.741.323	116,85
	Jumlah	19.677.120.036	14.124.695.667	5.552.424.369	39,31

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp0.

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di dalam tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP dan LS ke Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan dan disetorkan kembali ke Kas Negara.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas di Bendahara Penerimaan
Rp0.

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di dalam tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan PNBP yang masih harus dipertanggungjawabkan dan disetorkan kembali ke Kas Negara.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp9.090.909.

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas atau aset yang disetarakan dengan kas yang masih akan disetorkan ke kas negara ataupun akan dibayarkan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp9.090.909 dan Rp0. Saldo tersebut merupakan pendapatan PNBP hasil pelatihan di Satker 417654 yang belum disetorkan sampai dengan tanggal pelaporan.

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid)
Rp17.217.662.149.

C.1.4 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp17.217.662.149 dan Rp12.228.244.595. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh, tetapi barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi *Software* terdiri dari:

1. Satker Pusat 453374 sebesar Rp17.202.924.261. Rincian perpanjangan Lisensi Satker 453374 per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi *Software*
Satker 453374
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No	Uraian Perpanjangan Lisensi	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Acunetix Standard	94.191.429	93.240.000	951.429	1,02
2	AD 360 Manage Engine	997.950.989	398.230.769	599.720.220	150,60
3	Adobe Creative Cloud	209.543.671	105.428.867	104.114.804	98,75
4	Annual fee GoAML	1.256.473.129	1.220.274.099	36.199.030	2,97
5	Application Manager	-	13.171.264	(13.171.264)	(100,00)
6	Aruba	257.142.857	263.013.699	(5.870.842)	(2,23)
7	Cisco	333.274.451	335.990.301	(2.715.850)	(0,81)
8	Coreldraw	-	5.531.925	(5.531.925)	(100,00)
9	Crypto Analytics	-	312.019.231	(312.019.231)	(100,00)
10	Desktop Central	-	346.593.407	(346.593.407)	(100,00)
11	ESTIM	118.340.934	118.340.934	(0)	(0,00)
12	Juniper	168.598.356	169.315.068	(716.712)	(0,42)
13	Mdaemon	-	286.688.356	(286.688.356)	(100,00)
14	Microsoft Office 365	613.696.192	533.736.986	79.959.206	14,98
15	Mobile Device Management	-	46.669.648	(46.669.648)	(100,00)
16	Nas	-	219.299.178	(219.299.178)	(100,00)
17	Nessus	46.473.965	46.670.316	(196.351)	(0,42)
18	Oracle	146.885.934	147.053.984	(168.050)	(0,11)
19	Perpanjangan Lisensi Support Data Domain	622.265.368	-	622.265.368	-

C.1.4 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) (lanjutan)

No	Uraian Perpanjangan Lisensi	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
20	San Storage	4.324.159.997	3.680.950.685	643.209.312	17,47
21	Server Dell	461.076.923	461.076.923	(0)	(0,00)
22	Support TeamMate+	24.014.423	23.099.588	914.835	3,96
23	Support Server HPE	381.344.867	-	381.344.867	-
24	Tableau	215.169.231	172.307.692	42.861.539	24,88
25	Toad	19.789.323	-	19.789.323	-
26	Trellix	1.630.175.885	-	1.630.175.885	-
27	Veritas Netbackup	1.922.315.271	76.500.000	1.845.815.271	2.412,83
28	Vmware	-	355.385.192	(355.385.192)	(100,00)
29	VPN	2.693.730.018	2.625.550.087	68.179.931	2,60
30	Whatsapp	109.670.440	160.992.143	(51.321.703)	(31,88)
31	IT Analysis	167.246.203	-	167.246.203	-
32	TRM	370.630.220	-	370.630.220	-
33	Meltigo	6.945.535	-	6.945.535	-
34	Zoom	8.830.991	-	8.830.991	-
35	Canva	285.206	-	285.206	-
36	Capcut	443.750	-	443.750	-
37	Chat GPT	2.258.703	-	2.258.703	-
Jumlah		17.202.924.261	12.217.130.343	4.985.793.918	40,81

2. Satker 417654 sebesar Rp14.737.888 yang merupakan perpanjangan lisensi pendukung operasional aplikasi Pendidikan di pusdiklat.

Tabel 20
Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi *Software*
Satker 417654
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No	Uraian Perpanjangan Lisensi	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Capcut	49.315	49.046	269	0,55
2	Google Drive	102.637	597.474	(494.837)	(82,82)
3	Canva	275.890	597.113	(321.223)	(53,80)
4	Articulate 360	7.648.352	6.594.521	1.053.831	15,98
5	Monica AI	1.170.477	-	1.170.477	-
6	Zoom	5.382.001	2.934.473	2.447.528	83,41
7	Chat GPT	109.216	-	109.216	-
8	Envato	-	206.652	(206.652)	(100,00)
Jumlah		14.737.888	10.979.279	10.174.585.644	92.670,80

C.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp24.776.500.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.776.500 dan Rp136.500.000.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan akrual pendapatan yang telah diterima atau akan diterima setelah tanggal laporan.

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan denda lainnya dari pihak pelapor yang diterima sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 sebesar Rp23.375.000
2. Pengembalian Tunjangan Khusus sebesar Rp1.000.000
3. Pengembalian atas pembatalan transaksi marketplace sebesar Rp231.500
4. Pengembalian perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp170.000.

C.1.6 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.505.889.959 dan Rp1.263.761.136.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Piutang Bukan Pajak di PPATK yang memiliki kualitas Lancar sebesar Rp149.594.051 terdiri dari:

1. Piutang sebesar Rp87.003.614 yang merupakan hasil temuan BPK tahun 2024 atas pembangunan Gedung multimedia di satker 417654.
2. Piutang sebesar Rp49.100.000 yang merupakan denda pelaporan pihak pelapor yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan.
3. Piutang sebesar Rp13.490.437 yang merupakan hasil revidi Inspektorat berupa kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan renovasi ruangan di satker 417654.

Piutang Bukan Pajak di PPATK yang memiliki kualitas Kurang Lancar sebesar Rp142.875.000 merupakan piutang denda pihak pelapor.

Piutang Bukan Pajak di PPATK yang memiliki kualitas Diragukan sebesar Rp293.300.000 merupakan piutang denda pihak pelapor.

Piutang Bukan Pajak di PPATK yang memiliki kualitas **Macet** sebesar Rp920.120.908 yang berasal dari

1. Pendapatan denda atas 46 (empat puluh enam) Pihak Pelapor yang diberikan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp874.250.000, tetapi belum dilimpahkan ke PUPN.
2. pengembalian belanja barang dan modal di satker 417654 berasal dari CV KAK sebesar Rp45.870.908, telah dilakukan upaya penagihan sebanyak 3 (tiga) kali melalui:
 - a. Surat Penagihan Pertama Nomor T/033/PL.02/VIII/2022 tanggal 29 Agustus Tahun 2022.
 - b. Surat Penagihan kedua Nomor T/036/PL.02/IX/2022 tanggal 9 September Tahun 2022.
 - c. Surat Penagihan ketiga Nomor T/043/PL.02/X/2022 tanggal 7 Oktober Tahun 2022.

Piutang di satker 417654 belum dibayarkan sehingga kualitas piutangnya diturunkan menjadi *macet* dan dilakukan pelimpahan ke PUPN dengan surat nomor T/531/PL.02/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan telah diterima dan disetujui oleh PUPN dengan surat Nomor SP3N-19/PUPNC.13.03/2022 tanggal 21 Desember 2022. Rincian kualitas Piutang Bukan Pajak pada PPATK per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 20.

C.1.6 Piutang Bukan Pajak (lanjutan)

Tabel 20
Rincian Kualitas Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No	Kualitas Piutang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Lancar	149.594.051	102.470.423	47.123.628	45,99
2	Kurang Lancar	142.875.000	816.575.000	(673.700.000)	(82,50)
3	Diragukan	293.300.000	-	293.300.000	100,00
4	Macet	920.120.908	344.715.713	575.405.195	166,92
Jumlah		1.505.889.959	1.263.761.136	242.128.823	19,16

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Rp1.082.251.278

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.082.251.278 dan Rp426.885.565.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Rincian kualitas Piutang Bukan Pajak pada PPATK per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No	Kualitas Piutang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Lancar	1.192.870	512.352	680.518	132,82
2	Kurang Lancar	14.287.500	81.657.500	(67.370.000)	(82,50)
3	Diragukan	146.650.000	-	146.650.000	100,00
4	Macet	920.120.908	344.715.713	575.405.195	166,92
Jumlah		1.082.251.278	426.885.565	655.365.713	153,52

Persediaan
Rp2.001.951.797.

C.1.8 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.001.951.797 dan Rp923.210.474.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, untuk dijual, atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Seluruh persediaan pada tanggal pelaporan dalam kondisi baik. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 22.

C.1.8 Persediaan (lanjutan)

Tabel 22
Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Konsumsi	1.580.657.361	714.112.421	866.544.940	121,35
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	13.259.707	35.191.564	(21.931.857)	(62,32)
3	Bahan Baku	3.049.200	102.928.062	(99.878.862)	(97,04)
4	Suku Cadang	97.496.310	3.049.200	94.447.110	3.097,44
5	Persediaan Lainnya	307.489.219	67.929.227	239.559.992	352,66
Jumlah		2.001.951.797	923.210.474	1.078.741.323	116,85

Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 116,85% jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2024 karena pembelian lebih besar dari pemakaian.

Aset Tetap
Rp495.455.386.708

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp495.003.957.842 dan Rp476.996.127.775 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,06% jika dibandingkan dengan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian Aset Tetap PPAK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dijelaskan dalam Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	235.898.373.342	235.898.373.342	-	-
2	Peralatan dan Mesin	274.611.037.042	228.394.757.642	46.216.279.400	20,24
3	Gedung dan Bangunan	235.646.558.027	235.461.247.464	185.310.563	0,08
4	Jalan irigasi dan Jaringan	235.602.000	235.602.000	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	1.162.332.490	1.108.869.890	53.462.600	4,82
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	1.669.142.180	(1.669.142.180)	(100,00)
Jumlah		747.553.902.901	702.767.992.518	44.785.910.383	6,37
Akumulasi Penyusutan		(252.549.945.059)	(225.771.864.743)	(26.778.080.316)	11,86
Nilai Buku Aset Tetap		495.003.957.842	476.996.127.775	18.007.830.067	3,78

Kenaikan Aset Tetap sebesar 3,78% berasal dari meningkatnya peremajaan fasilitas infrastruktur di gedung kantor Jl. Ir. Hj. Juanda yang termasuk peremajaan ruangan dan lift.

Tanah Rp235.898.373.342.

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki PPAK per 31 Desember 2025 dan 2024, yaitu sebesar Rp235.898.373.342 dan Rp235.898.373.342.

C.2.1 Tanah (lanjutan)

Aset PPATK berupa tanah, terdiri dari:

1. Tanah seluas 4.500 m² berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat senilai Rp194.364.000.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada tahun 2007.
2. Tanah seluas 5.648 m² berlokasi di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat senilai Rp8.256.529.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada tahun 2010.
3. Tanah seluas 9.510 m² berlokasi di Jl. Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat senilai Rp28.784.107.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KM.6/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PPATK dan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-1705/KN/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal Roya Hak Tanggungan SHM No. 87/Cimpaeun.
4. Tanah seluas 120 m² berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp332.436.600. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014.
5. Tanah seluas 120 m² berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp394.585.440. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 02 tanggal 16 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014.
6. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp528.900.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-053A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 9 September 2019.

C.2.1 Tanah (lanjutan)

7. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp490.200.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-061A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019.
8. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp610.600.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-062A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019.
9. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp770.350.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-056.12/PL.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
10. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp597.850.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-057.12/PL.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
11. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp768.465.302. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan BAST No. BAST-055.10/PL.02/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. sertifikat masih dalam proses balik nama dan penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Depok.
12. Pengembangan nilai aset berupa pengurusan surat pelepasan hak tujuh unit rumah dengan nomor berkas permohonan 123587/2021, 123792/2021, 123802/2021, 123838/2021, 123594/2021, 123833/2021, dan 120981/2021 senilai total Rp350.000.

Mutasi Tanah per 31 Desember 2025 dijelaskan dalam Tabel 24.

Tabel 24
Mutasi Tanah
Per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	235.898.373.342
Tanah (Lokasi Jakarta Pusat)	194.364.000.000
Tanah (Lokasi Cianjur Jawa Barat)	8.256.529.000
Tanah (Lokasi Depok Jawa Barat)	33.277.844.342
Mutasi tambah tahun 2025:	
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi kurang tahun 2025:	
	0
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	-
Saldo per 31 Desember 2025	235.898.373.342
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	235.898.373.342

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas dengan nilai kapitalisasi minimal Rp1.000.000/unit. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp274.611.037.042 dan Rp228.871.283.966.

Mutasi peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 25.

Tabel 25
Mutasi Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	228.394.757.642
Mutasi tambah tahun 2025:	
Pembelian	45.877.853.969
Transfer Masuk	1.387.963.164
Reklasifikasi Masuk	43.916.000
Koreksi Pencatatan	2.404.658.365
Pengembangan	8.230.420.000
Total Mutasi Tambah	57.944.811.498
Mutasi kurang tahun 2025:	
Penghentian aset dari penggunaan	2.867.855.550
Transfer Keluar	1.387.963.164
Reklasifikasi Keluar	43.916.000
Koreksi Pencatatan	7.428.797.384
Total Mutasi Kurang	11.728.532.098
Total Mutasi Tambah (Kurang)	46.216.279.400
Saldo per 31 Desember 2025	274.611.037.042
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(211.676.469.311)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	62.934.567.731

Transaksi mutasi tambah peralatan dan mesin berasal dari:

1. Pembelian menggunakan belanja modal sebesar Rp45.877.853.969
2. Koreksi pencatatan melalui menu transfer keluar dan transfer masuk sebesar Rp1.387.963.164
3. Reklasifikasi Masuk yang merupakan pencatatan ulang aset yang sudah dikeluarkan sebesar Rp43.916.000.
4. Koreksi pencatatan sebesar Rp2.404.658.365 yang merupakan koreksi nilai dan jenis BMN
5. Penambahan nilai melalui pengembangan nilai aset sebesar RP8.230.420.000

Transaksi mutasi kurang peralatan dan mesin berasal dari:

1. Penghentian penggunaan aset dalam operasional perkantoran sebesar Rp2.867.855.550.
2. Koreksi pencatatan melalui menu transfer keluar dan transfer masuk sebesar Rp1.387.963.164
3. Reklasifikasi Masuk yang merupakan pencatatan ulang aset yang sudah dikeluarkan sebesar Rp43.916.000.
4. Koreksi pencatatan sebesar Rp7.428.797.384 yang merupakan koreksi nilai dan jenis BMN

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024, yaitu sebesar Rp235.646.558.027 dan Rp235.461.247.464.

Gedung dan Bangunan PPATK per 31 Desember 2025, terdiri dari:

1. Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikelola oleh Satker 453374 yaitu Gedung Kantor Permanen Gedung PPATK di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat dengan luas bangunan 16.630 m² senilai Rp132.652.125.817.
2. Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikelola oleh Satker 417654 sebesar Rp99.251.678.085, yaitu:

No	Uraian	NUP	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Sub Kelompok Barang	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung Pusdiklat APUPPT (Cimanggis) di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.	1	6.502	69.433.003.277	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik
2	Berlokasi di Komplek Pusdiklat PPATK, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat ; dan	3	122	-	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Dihapus
3	Berlokasi di Komplek Pusdiklat PPATK, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.	4	58	258.982.240	Klinik	Baik
4	Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A8, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	5		285.424.800	Gudang	Baik
5	Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A10, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	7		-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dihapus
6	Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A11, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	6		-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dihapus
7	Pagar permanen			322.414.070	Pagar Permanen	
8	Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Cimpaeun atas nama Wiwik Setyaji (A12) dengan	8	127	275.000.000	Gudang	Baik

	Notaris Notaris Early Gresik Taheer, S.G., M.Kn.					
9	Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Cimpaeun atas nama Nurlaila Sundari (No. A6) dengan Notaris Notaris Early Gresik Taheer, S.G., M.Kn.	9	50	-	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Dihapus
10	Transfer masuk Gedung Arsip Ciloto	10		28.072.324.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat
11	Pengadaan Rumah berdasarkan Surat Perjanjian No:Perj-055/PL.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan BAST No: BAST-055.10/PL.02/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023	11		604.529.698	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik
Total				99.251.678.085		

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.637.866.587.

Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dijelaskan dalam Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	235.461.247.464
Gedung Kantor (Lokasi Jakarta Pusat)	128.158.288.773
Gedung Arsip (Lokasi Cianjur Jawa Barat)	28.072.324.000
Gedung Pusdiklat APUPPT (Lokasi Depok Jawa Barat)	71.463.237.011
Mutasi tambah tahun 2025:	
Pengembangan melalui KDP	198.801.000
Total Mutasi Tambah	198.801.000
Mutasi kurang tahun 2025:	
Koreksi Pencatatan	13.490.437
Total Mutasi Kurang	13.490.437
Total Mutasi Tambah (Kurang)	185.310.563
Saldo per 31 Desember 2025	235.646.558.027
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(40.637.866.587)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	195.008.691.440

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp235.602.000.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024, yaitu sebesar Rp235.602.000 dan Rp235.602.000. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp149.962.000, dengan rincian mutasi dijelaskan dalam Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	235.602.000
Mutasi tambah tahun 2025:	
Transfer masuk	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi kurang tahun 2025:	
Transfer keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	-
Saldo per 31 Desember 2025	235.602.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(149.962.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	85.640.000

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang di tahun 2025.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp1.162.332.490 dan Rp1.108.869.890 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam Aset Tetap Lainnya, antara lain buku perpustakaan dan benda seni. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dijelaskan dalam Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya
Tahun 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	1.108.869.890
<i>Mutasi tambah tahun 2025:</i>	
Pembelian	49.999.904
Koreksi Pencatatan	3.462.696
Total Mutasi Tambah	53.462.600
<i>Mutasi kurang tahun 2025:</i>	
Revaluasi Aset Lainnya	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	53.462.600
Saldo per 31 Desember 2025	1.162.332.490
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(61.382.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.100.949.990

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.669.142.180. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini merupakan pengembangan nilai gedung dan bangunan di Satker 417654 sebesar Rp1.669.142.180 perolehan tahun 2022, namun pekerjaan fisik belum selesai dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2025 sehingga dipindahkan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi.

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Rp252.549.945.059 dan Rp225.771.864.743. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang dijelaskan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dijelaskan dalam Tabel 27.

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (lanjutan)

Tabel 29
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai per 31 Desember 2025	Akumulasi Penyusutan 2025	Nilai Buku per 31 Desember 2025	Akumulasi Penyusutan 2024	Kenaikan (Penurunan)	
						Rp	%
1	Tanah	235.898.373.342	-	235.898.373.342	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	274.611.037.042	(211.676.469.311)	62.934.567.731	(189.351.307.143)	22.325.162.168	11,79
3	Gedung dan Bangunan	235.646.558.027	(40.637.866.587)	195.008.691.440	(36.197.175.730)	4.440.690.857	12,27
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.602.000	(174.226.661)	61.375.339	(161.999.370)	12.227.291	7,55
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	1.162.332.490	(61.382.500)	1.100.949.990	(61.382.500)	-	-
Jumlah		747.553.902.901	(252.549.945.059)	495.003.957.842	(225.771.864.743)	(26.778.080.316)	11,86

Aset Lainnya Rp29.444.786.521

C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.444.786.521 dan Rp20.374.708.388 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap, berupa Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan *software* ataupun aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya untuk operasional pemerintah. Rincian Nilai Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain) pada tanggal pelaporan dijelaskan dalam Tabel 28.

Tabel 30
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	55.390.344.992	48.359.359.660	7.030.985.332	14,54
2	Dana yang dibatasi Penggunaannya	6.366.430.605	2.034.144.609	4.332.285.996	212,98
3	Aset Lain-Lain	1.669.142.180	303.600.000	1.365.542.180	449,78
Jumlah		63.425.917.777	50.697.104.269	12.728.813.508	25,11
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(33.981.131.256)	(30.322.395.881)	(3.658.735.375)	12,07
Aset Lainnya		29.444.786.521	20.374.708.388	9.070.078.133	44,52

Aset Tak Berwujud
Rp55.390.344.992

C.3.1 Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak berwujud fisik. Pada PPATK aset tersebut berupa *software* maupun antivirus komputer untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp55.390.344.992 dan Rp48.359.359.660.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dijelaskan dalam Tabel 31.

C.3.1 Aset Tak Berwujud (ATB) (lanjutan)

Tabel 31
Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	48.359.359.660
Mutasi tambah tahun 2025:	
Realisasi Belanja Modal Lainnya	4.184.997.851
Pengembangan nilai aset	-
Koreksi Pencatatan	2.845.987.481
Total Mutasi Tambah	7.030.985.332
Mutasi kurang tahun 2025:	
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-
Koreksi Pencatatan	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	7.030.985.332
Saldo per 31 Desember 2025	55.390.344.992
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(33.981.131.256)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	21.409.213.736

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.981.131.526.

Dana yang Dibatasi

Penggunaannya Rp6.366.430.605

C.3.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024, yaitu sebesar Rp6.366.430.605 dan Rp2.034.144.609. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang sudah ditentukan penggunaannya untuk membayar tagihan atau kegiatan lainnya. Dana tersebut merupakan dana untuk penyelesaian transaksi RPATA yang sudah dibukukan dan secara akrual tercatat di tanggal pelaporan, namun penyelesaian pembayaran dilaksanakan setelah tanggal pelaporan.

Aset Lain-lain Rp1.669.142.180

C.3.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024, yaitu sebesar Rp1.669.142.180 dan Rp303.600.000. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan dan dalam proses penghapusan. Terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan yang dihentikan dari operasi di Satker 417654, sesuai dengan juknis dalam Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-132KN/KN.2/2024 tanggal 20 Desember 2024 Hal Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

C.3.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp33.981.131.256 dan Rp30.322.395.881. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dijelaskan dalam Tabel 32.

Tabel 32
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No	Aset Lain-Lain	Nilai per 31 Desember 2025	Akum. Penyusutan/Amor- tisasi 2025	Nilai Buku per 31 Desember 2025	Akum. Penyusutan/Amo- rtisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	
						Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	55.342.329.992	(33.981.131.256)	21.361.198.736	(30.625.995.881)	(3.355.135.375)	10,96
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	48.015.000	-	48.015.000	303.600.000	(303.600.000)	(100,00)
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	1.669.142.180	-	-	-	-	-
Jumlah		57.059.487.172	(33.981.131.256)	21.409.213.736	(30.322.395.881)	(3.658.735.375)	12,07

KEWAJIBAN

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.047.630.655 dan Rp9.887.270.401.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 33.

Tabel 33
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	12.007.979.738	9.820.546.228	2.187.433.510	22,27
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-	-	-
3	Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka	39.650.917	66.724.173	(27.073.256)	(40,57)
5	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
Jumlah		12.047.630.655	9.887.270.401	2.160.360.254	21,85

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024, yaitu sebesar 21,85%. Hal ini disebabkan oleh akrual belanja pegawai dan barang pada pos utang kepada pihak ketiga.

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp12.007.979.738 dan Rp9.820.546.228, mengalami kenaikan sebesar Rp2.151.701.433 atau 22,27%

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp5.718.588.883 yang merupakan kekurangan pembayaran gaji untuk pegawai.
- b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.311.717.831 yang merupakan akrual pembayaran kontrak dan utilitas.
- c. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp4.968.582.115 yang merupakan pengadaan yang masih harus dibayarkan.
- d. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp9.090.909 yang berasal dari PNBP yang belum disetorkan oleh bendahara penerimaan.

C.4.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan utang akrual pada saat pengakuan pencatatan BAST dari pihak ketiga. Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp0.

C.4.3 Hibah Yang Belum Disahkan

Saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan.

C.4.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah disetor ke kas negara, tetapi barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp39.650.917 dan Rp66.724.173.

Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp39.650.917 merupakan jasa sewa yang masih harus diberikan PPATK Satker 453374 kepada:

C.4.4 Pendapatan Diterima di Muka (lanjutan)

1. Bank BRI atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk penempatan mesin ATM dengan Perjanjian Sewa antara PPAK dengan BRI Cabang Veteran Jakarta untuk masa sewa 1 Juni 2024 s.d. 31 Mei 2026 (2 tahun) sebesar Rp39.405.000 dengan nomor referensi NTPN AD5380NA04MFPRAK dan nomor Perjanjian: PERJ-03/PL.02.04/PPAK/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024. Sisa saldo pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp10.270.165.
2. Bank Mandiri atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk penempatan mesin ATM dengan Perjanjian Sewa antara PPAK dengan BRI Cabang Veteran Jakarta untuk masa sewa 1 Juni 2024 s.d. 31 Mei 2026 (2 tahun) sebesar Rp39.405.000 dengan nomor referensi NTPN 8145B7QLUP9ISNVB dan nomor Perjanjian: PERJ-04/PL.02.04/PPAK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024. Sisa saldo pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp8.162.078.
3. Koperasi Kodagama dengan kontrak atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk penempatan mesin Jumpstart dan pantry lantai 2 dengan masa sewa 1 Juni 2024 s.d. 31 Mei 2029 (5 tahun) sebesar Rp10.000.000 dengan nomor referensi NTPN 974701JNFV2MLKRP dan nomor perjanjian: PERJ-02/PL.02.04/PPAK/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024. Sisa saldo pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp6.832.876
4. Koperasi Kodagama dengan kontrak atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk pantry lantai 2 dengan masa sewa 2 Mei 2025 s.d. 31 Mei 2030 (5 tahun) sebesar Rp16.595.500 dengan nomor referensi NTPN 677AA48VVO6LHNQ2 dan nomor perjanjian: PERJ-01/PL.02.04/PPAK/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025. Sisa saldo pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp14.385.798.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.4.5 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp0

C.4.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya merupakan kas yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Ekuitas Rp532.078.233.744

EKUITAS

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp532.078.233.744 dan Rp501.608.201.429. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Rp1.625.908.253

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.625.908.253 dan Rp2.509.005.227.

Perbandingan Rincian Pendapatan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada Tabel 32.

Tabel 34
Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	43.668.256	31.051.244	12.617.012	40,63
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	98.600.000	114.800.000	(16.200.000)	(14,11)
Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan	405.840.000	332.880.000	72.960.000	21,92
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	89.899.997	13.273.983	76.626.014	577,26
Pendapatan Denda Lainnya	987.900.000	2.017.000.000	(1.029.100.000)	100,00
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	1.625.908.253	2.509.005.227	(883.096.974)	(35,20)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp1.625.908.253 berasal dari:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.668.256 di satker 453374.
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi sebesar Rp98.600.000 yang merupakan pendapatan penggunaan asrama di satker 417654.
- Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan sebesar Rp405.840.000 di satker Pusdiklat APUPPT.
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp89.899.997.
- Pendapatan Denda Lainnya yang merupakan denda yang dipungut dari pihak pelapor sebesar Rp987.900.000.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp203.283.939.711 dan Rp183.925.089.079. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 33.

Tabel 35
Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	20.926.363.580	19.454.870.980	1.471.492.600	7,56
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	275.641	274.752	889	0,32
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.183.028.426	1.132.220.166	50.808.260	4,49
511122	Beban Tunj. Anak PNS	335.265.606	318.332.543	16.933.063	5,32
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.056.880.000	962.472.500	94.407.500	9,81
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3.523.064.000	2.862.489.840	660.574.160	23,08
511125	Beban Tunj. PPh PNS	499.792.284	219.231.644	280.560.640	127,97
511126	Beban Tunj. Beras PNS	998.164.860	964.561.980	33.602.880	3,48
511129	Beban Uang Makan PNS	4.061.835.000	3.034.525.000	1.027.310.000	33,85
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	272.085.000	320.210.000	(48.125.000)	(15,03)
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	1.214.949.600	1.204.458.000	10.491.600	0,87
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	289.134.700	285.987.400	3.147.300	1,10
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4.315.901.600	3.894.028.600	421.873.000	10,83
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	63.060	62.232	828	1,33
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	286.936.630	235.918.740	51.017.890	21,63
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	65.635.068	56.460.104	9.174.964	16,25
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	625.488.000	590.838.000	34.650.000	5,86
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	242.824.260	209.728.320	33.095.940	15,78
511628	Beban Uang Makan PPPK	759.691.000	709.362.000	50.329.000	7,09
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	12.465.000	-	12.465.000	-
512111	Beban Uang Honor Tetap	1.409.756.470	2.552.745.965	(1.142.989.495)	(44,77)
512211	Beban Uang Lembur	218.410.000	247.895.000	(29.485.000)	(11,89)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	82.127.000	46.782.000	35.345.000	75,55
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	142.488.478.651	127.533.133.342	14.955.345.309	11,73
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	18.415.324.275	17.088.499.971	1.326.824.304	7,76
Total Beban Pegawai		203.283.939.711	183.925.089.079	19.358.850.632	10,53

Terdapat kenaikan realisasi Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar 10,53% dibanding realisasi Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Kenaikan Beban Pegawai, antara lain disebabkan:

1. Beban Gaji Pokok PNS naik sebesar Rp1.471.492.600 atau sebesar 7,56% karena kenaikan pangkat/golongan PNS dan penambahan jumlah CPNS/PNS.
2. Beban Pembulatan Gaji PNS naik sebesar Rp889 atau sebesar 0,32% karena kenaikan pangkat/golongan PNS dan penambahan jumlah CPNS/PNS.
3. Beban Tunjangan Suami/Istri PNS naik sebesar Rp50.808.260 atau sebesar 4,49%, antara lain karena penambahan jumlah pegawai yang menikah.

D.2. Beban Pegawai (lanjutan)

4. Beban Tunjangan Anak PNS naik sebesar Rp16.933.063 atau sebesar 5,32% antara lain karena penambahan jumlah tanggungan PNS.
5. Beban Tunj. Struktural PNS naik sebesar Rp94.407.500 atau sebesar 9,81% antara lain karena sebagian besar posisi jabatan struktural telah diduduki.
6. Beban Tunjangan Fungsional PNS naik sebesar Rp660.574.160 atau sebesar 23,08% karena penambahan jumlah pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu dan kenaikan jenjang, antara lain Pranata Komputer, Pranata Humas, Analis Anggaran, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Analis Transaksi Keuangan, dan Widyaiswara.
7. Beban Tunjangan PPh PNS naik sebesar Rp280.560.640 atau sebesar 127,97%, antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS dan perubahan cara perhitungan PPh 21.
8. Beban Tunjangan Beras PNS naik sebesar Rp33.602.880 atau sebesar 3,48% antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
9. Beban Uang Makan PNS sebesar Rp1.027.310.000 atau 33,85% antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
10. Beban Gaji Pokok Pejabat Negara naik sebesar Rp10.491.600 atau 0,87% karena bertambahnya jumlah pejabat struktural.
11. Beban Tunj. PPh Pejabat Negara naik sebesar Rp3.147.300 atau 1,10% karena perubahan cara perhitungan PPh 21.
12. Beban Gaji Pokok PPPK sebesar Rp421.873.000 atau sebesar 10,83% karena bertambahnya jumlah PPPK dan juga pembayaran yang dimulai dari awal tahun anggaran.
13. Beban Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp828 atau sebesar 1,33% karena bertambahnya jumlah PPPK.
14. Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK sebesar Rp51.017.890 atau sebesar 21,63% karena bertambahnya jumlah PPPK.
15. Beban Tunjangan Anak PPPK sebesar Rp9.174.964 atau sebesar 16,25% karena bertambahnya jumlah PPPK.
16. Beban Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp34.650.000 atau sebesar 5,86% karena bertambahnya jumlah PPPK.
17. Beban Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp33.095.940 atau sebesar 15,78% karena bertambahnya jumlah PPPK.
18. Beban Uang Makan PPPK sebesar Rp50.329.000 atau sebesar 7,09% karena bertambahnya jumlah PPPK.
19. Beban Tunjangan Umum PPPK sebesar Rp12.465.000 atau sebesar 100,00% karena adanya pegawai berstatus PPPK yang memiliki jabatan fungsional umum.

D.2. Beban Pegawai (lanjutan)

20. Beban Uang Lembur PPPK naik sebesar Rp35.345.000 atau sebesar 75,55% karena berkurangnya frekuensi kegiatan lembur.
21. Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) naik sebesar Rp14.955.345.309 atau sebesar 11,73% karena kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan jumlah CPNS, dan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 sebesar 100% Tunjangan Khusus/Kegiatan.
22. Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp1.326.824.304 atau sebesar 7,76% karena bertambahnya jumlah PPPK.

Penurunan Beban Pegawai, antara lain disebabkan:

1. Beban Tunjangan Umum PNS turun sebesar Rp48.125.000 atau 15,03% karena berkurangnya pegawai yang berjabatan pelaksana.
2. Beban Uang Honor Tetap turun sebesar Rp1.142.989.495 atau 44,77% karena berkurangnya jumlah PPNPN.
3. Beban Uang Lembur turun sebesar Rp29.485.000 atau 11,89% karena berkurangnya kegiatan lembur.

Beban Persediaan
Rp1.868.231.686

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.868.231.686 dan Rp2.035.973.856.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 34.

Tabel 36
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	1.585.076.879	1.708.228.810	(123.151.931)	(7,21)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	-	9.527.460	(9.527.460)	(100,00)
593149	Beban Persediaan Lainnya	283.154.807	318.217.586	(35.062.779)	(11,02)
Total Beban Persediaan		1.868.231.686	2.035.973.856	(167.742.170)	(8,24)

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Pada periode 31 Desember 2025, terdapat penurunan Beban Persediaan sebesar 8,24%. Terdiri dari:

1. Beban Persediaan Konsumsi turun sebesar Rp123.151.931 atau 7,21% karena terdapat pengurangan kertas dengan system kerja paperless dan pengurangan toner.
2. Beban Persediaan Bahan Baku sebesar Rp9.527.460 atau 100,00% karena berkurangnya penggunaan bahan kebersihan dibandingkan dengan tahun lalu.

D.3 Beban Persediaan (lanjutan)

3. Beban Persediaan Lainnya naik sebesar Rp35.062.779 atau 11,02% karena penggunaan kebutuhan persediaan obat-obatan di klinik dokter umum dan dokter gigi.

Beban Barang dan Jasa
Rp45.781.934.831

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp45.781.934.831 dan Rp33.043.766.219. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 35.

Tabel 37
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Beban Barang				
521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.291.950.254	5.643.192.943	(4.351.242.689)	(77,11)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	267.857.080	250.621.004	17.236.076	6,88
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	27.480.000	20.496.000	6.984.000	34,07
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.762.632.521	431.386.423	1.331.246.098	308,60
521211	Beban Bahan	4.690.944.252	2.598.978.258	2.091.965.994	80,49
521213	Beban Honor Output Kegiatan	584.700.000	386.645.000	198.055.000	51,22
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.257.147.821	1.768.848.924	488.298.897	27,61
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	53.000.000	75.000.000	(22.000.000)	(29,33)
	Beban Jasa				
522111	Beban Langganan Listrik	5.204.524.409	5.555.622.583	(351.098.174)	(6,32)
522112	Beban Langganan Telepon	159.842.625	162.310.897	(2.468.272)	(1,52)
522113	Beban Langganan Air	186.556.656	152.449.525	34.107.131	22,37
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.471.639.047	3.523.794.879	(52.155.832)	(1,48)
522131	Beban Jasa Konsultan	4.671.352.613	2.769.879.610	1.901.473.003	68,65
522141	Beban Sewa	3.164.247.927	2.815.818.055	348.429.872	12,37
522151	Beban Jasa Profesi	1.676.150.000	889.795.120	786.354.880	88,37
522191	Beban Jasa Lainnya	16.315.372.226	5.983.515.998	10.331.856.228	172,67
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	-	15.411.000	(15.411.000)	(100,00)
	Total Beban Barang dan Jasa	45.785.397.431	33.043.766.219	12.757.042.212	38,56

Pada 31 Desember 2025 terdapat kenaikan Beban Barang dan Jasa sebesar 38,56%, terdiri dari:

Kenaikan Beban Barang dan Jasa terdiri dari:

1. Beban Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat naik sebesar Rp17.236.076 atau 6,88% disebabkan meningkatnya pengiriman surat secara fisik.
2. Beban Honor Operasional Satuan Kerja naik sebesar Rp6.984.000 atau 34,07% disebabkan bertambahnya kegiatan yang menggunakan honorarium.
3. Beban Barang Operasional Lainnya naik sebesar Rp1.331.246.098 atau 308,60% karena bertambahnya kegiatan operasional.

D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)

4. Beban Bahan naik sebesar Rp2.088.503.394 atau 80,36% karena meningkatnya pembelian bahan untuk kegiatan kantor.
5. Beban Honor Output Kegiatan naik sebesar Rp198.055.000 atau 51,22% antara lain disebabkan karena bertambahnya kegiatan Komite TPPU.
6. Beban Barang Non Operasional Lainnya naik sebesar Rp488.298.897 atau 27,61% karena meningkatnya kegiatan operasional lainnya.
7. Beban Langganan Air naik sebesar Rp34.107.131 atau 22,37% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional di kantor.
8. Beban Jasa Konsultan naik sebesar Rp1.901.473.003 atau 68,65% yang disebabkan oleh bertambahnya kegiatan yang menggunakan tenaga ahli.
9. Beban Sewa naik sebesar Rp348.429.872 atau 12,37% antara lain disebabkan bertambahnya sewa kendaraan dinas Eselon II di PPAK.
10. Beban Jasa Profesi naik sebesar Rp786.354.880 atau 88,37% antara lain disebabkan karena bertambahnya penggunaan narasumber eksternal di beberapa kegiatan.
11. Beban Jasa Lainnya naik sebesar Rp10.331.856.228 atau 172,67% disebabkan bertambahnya kegiatan yang membutuhkan tenaga ahli.

Adapun penurunan beban barang dan jasa yang terdiri dari:

1. Beban Keperluan Perkantoran turun sebesar Rp4.351.242.689 atau 77,11% karena diterapkannya system kerja paperless dan pengurangan toner.
2. Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk Uang turun sebesar Rp22.000.000 atau 29,33% karena berkurangnya kegiatan yang membutuhkan hadiah uang tunai.
3. Beban Langganan Listrik turun sebesar Rp351.098.174 atau 6,32% disebabkan berkurangnya kegiatan operasional di kantor.
4. Beban Langganan Telpon turun sebesar Rp2.468.272 atau 1,52% disebabkan berkurangnya kegiatan operasional kantor.
5. Beban Langganan daya dan Jasa Lainnya turun sebesar Rp52.155.832 atau 1,48% berkurangnya jumlah lisensi yang diperpanjang.
6. Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.411.000 atau sebesar 100,00% karena tidak adanya pembelian aset ekstrakomtabel di tahun 2025.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp37.622.114.162 dan Rp21.698.074.756. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin,

Beban Pemeliharaan
Rp37.622.114.162

D.5 Beban Pemeliharaan (lanjutan)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Persediaan Suku Cadang, dan Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 36.

Tabel 38
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.174.949.113	1.842.691.723	1.332.257.390	72,30
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	450.264.105	384.495.026	65.769.079	17,11
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.906.980.253	19.829.257.640	9.077.722.613	45,78
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	5.013.210.377	4.923.953.757	89.256.620	1,81
593113	Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	23.529.797	305.633.563	(282.103.766)	(92,30)
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	53.180.517	73.024.375	(19.843.858)	(27,17)
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Total Beban Pemeliharaan		37.622.114.162	27.359.056.084	10.263.058.078	37,51

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 37,51%.

Kenaikan realisasi Beban Pemeliharaan disebabkan, sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp1.332.257.390 atau 72,30% karena meningkatnya kegiatan pemeliharaan di satker 453374.
2. Beban Asuransi Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp65.769.079 atau 17,11% karena meningkatnya premi.
3. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp9.077.722.613 atau 45,78% karena beberapa kegiatan pemeliharaan besar seperti pergantian lift dan renovasi ruangan di satker 453374.
4. Beban pemeliharaan lainnya sebesar Rp89.256.620 atau 1,81% karena kegiatan pemeliharaan aset lainnya.

Penurunan Beban Pemeliharaan disebabkan:

1. Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan turun sebesar Rp282.103.766 atau 92,30% karena berkurangnya penggunaan persediaan.
2. Beban Persediaan Suku Cadang turun sebesar Rp19.843.858 atau 27,17% karena berkurangnya penggunaan bahan persediaan.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.834.368.216 dan Rp14.360.485.622. Beban tersebut adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan

Beban Perjalanan Dinas
Rp21.834.368.216

D.6 Beban Perjalanan Dinas (lanjutan)

Dinas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 37.

Tabel 39
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.079.625.304	6.967.652.620	4.111.972.684	59,02
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	616.489.000	591.020.000	25.469.000	4,31
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.762.739.300	1.215.235.260	547.504.040	45,05
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.313.625.787	1.699.768.091	613.857.696	36,11
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	179.412.634	464.604.258	(285.191.624)	(61,38)
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	5.882.476.191	3.422.205.393	2.460.270.798	71,89
Total Beban Perjalanan Dinas		21.834.368.216	14.360.485.622	7.473.882.594	52,04

Kenaikan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar 52,04% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas disebabkan, antara lain:

1. Beban Perjalanan Dinas Biasa naik sebesar Rp4.111.972.684 atau 59,02% karena meningkatnya kegiatan audit dan pemeriksaan.
2. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota naik sebesar Rp25.469.000 atau 4,34% karena meningkatnya kegiatan dalam kota.
3. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota naik sebesar Rp547.504.040 atau 45,05% karena meningkatnya kegiatan konsinyering.
4. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota naik sebesar Rp613.857.696 atau 36,11% karena meningkatnya kegiatan konsinyering di luar kota.
5. Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri naik sebesar Rp2.460.270.798 atau 71,89% karena meningkatnya kegiatan di luar negeri dan undangan kegiatan..

Penurunan Beban Perjalanan Dinas disebabkan Beban Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri turun sebesar Rp285.191.624 atau 61,38% karena berkurangnya kegiatan koordinasi dan undangan dari luar negeri.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.529.814.118 dan Rp29.133.067.053.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp32.529.814.118

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi (lanjutan)

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam Tabel 38.

Tabel 40
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	24.765.770.786	21.569.402.016	3.196.368.770	14,82
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.443.507.039	4.403.597.143	39.909.896	0,91
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	9.372.625	18.745.250	(9.372.625)	(50,00)
591313	Beban Penyusutan Jaringan	2.854.666	2.854.666	-	-
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		4.853.750	(4.853.750)	(100,00)
592115	Beban Amortisasi Software	986.612.597	1.292.674.279	(306.061.682)	(23,68)
592116	Beban Amortisasi Lisensi	2.321.696.405	1.840.939.949	480.756.456	26,11
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi		32.529.814.118	29.133.067.053	3.396.747.065	11,66

Kenaikan Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.196.368.770 atau 14,82% dikarenakan bertambahnya jumlah aset yang perlu disusutkan.
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.074.413 atau 0,91% karena bertambahnya nilai Gedung dan bangunan yang perlu disusutkan.
3. Beban Amortisasi Lisensi sebesar Rp480.756.456 atau 26,11% dikarenakan bertambahnya jumlah lisensi.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp399.994.000

D.8 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pelepasan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp399.994.000 dan Rp95.349.346. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp399.994.000 merupakan hasil lelang dari aset yang tidak digunakan lagi di dalam operasional pemerintah.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp2.730.320

D.9 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang timbul dari Pelepasan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.730.320 dan Rp1.381.151.284. Beban tersebut berasal dari penghapusan piutang.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp5.222.250.886

D.10 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan dari Kegiatan Non laporan operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp5.222.250.886 dan Rp40.001.214.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, terdiri dari:

1. Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp22.232.751.
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp281.200 yang berasal dari pengembalian uang makan PNS dan tunjangan khusus.
3. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp21.110.195 yang berasal dari pengembalian perjalanan dinas.
4. Penerimaan Kembali belanja modal TAYL sebesar Rp15.466.809 yang ebrasal dari temuan BPK atas pemeriksaan tahun 2024.
5. Pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp5.163.159.931.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp168.575.620.

D.11 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp168.575.620 dan Rp42.908.000.

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (LO)
Rp5.053.675.266.

D.12 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (LO)

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (LO) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp5.053.675.266 dan (Rp1.288.708.724).

Surplus/Defisit Laporan Operasi
(Rp336.498.921.238).

D.13 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar (Rp336.498.921.238) dan (Rp289.035.261.262). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp501.608.261.429 dan Rp519.297.103.369.

Ekuitas Awal
Rp501.608.261.429

Surplus(defisit) LO
(Rp342.000.606.669)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar (Rp342.000.606.669) dan (Rp289.035.261.262). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi yang
Menambah/Mengurangi Ekuitas
(Rp7.953.618.181)

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp7.953.618.181) dan (Rp21.999.600).

Transaksi Antar Entitas
Rp374.922.511.734

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain. Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp374.922.511.734 dan Rp271.368.418.922. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada Tabel 39.

Tabel 41
Rincian Transaksi Antar Entitas
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	376.849.451.491	266.404.815.683	110.444.635.808	41,46
313121	Diterima dari Entitas Lain	(1.926.939.757)	(1.428.909.261)	(498.030.496)	34,85
313211	Transfer Keluar	(23.482.460)	-	(23.482.460)	-
313221	Transfer Masuk	23.482.460	-	23.482.460	-
391131	Pengesahan Hibah Langsung	-	6.392.512.500	(6.392.512.500)	(100,00)
Total Transaksi Antar Entitas		374.922.511.734	271.368.418.922	103.554.092.812	38,16

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp376.849.451.491

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja PPATK yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp376.849.451.491 dan Rp266.404.815.683. Ditagihkan ke entitas lain, antara lain Pembayaran Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan, Jasa Laundry, Pembayaran Honorarium Pengajar, Pembelian Keperluan Sehari-Hari Perkantoran, Pengadaan Jasa Hygiene Service dan Pest Control, Pembelian Suku Cadang Perbaikan Elevator, Pengadaan Peralatan Zoom, Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur, dan Pengadaan Persediaan Obat Klinik.

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan PPATK yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp1.926.939.757) dan (Rp1.428.909.261).

Diterima dari Entitas Lain Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp1.926.939.757), berasal dari:

1. Satker 453374 sebesar (Rp1.358.418.137) terdiri dari:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp382.540.000 atas hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan di Satker 453374.
 - b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp4.952.000 yang merupakan pendapatan dari penjualan puing.
 - c. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp16.595.000 atas sewa ruangan oleh Koperasi Juanda Tiga Lima untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dibayarkan sekaligus di muka pada satker 453374.
 - d. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp53.787.186 di satker 453374.
 - e. Pendapatan denda lainnya sebesar Rp874.025.000 berupa denda administratif kepada pihak pelapor.
 - f. Penerimaan Kembali Belanja pegawai TAYL sebesar Rp281.200.
 - g. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp4.005.000.
2. Satker 417654 sebesar (Rp568.521.620) terdiri dari:
 - a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp12.502.000.
 - b. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp98.600.000.
 - c. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp405.840.000.
 - d. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp36.112.811.
 - e. Pendapatan penerimaan Kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp15.466.809.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp531.370.588.441 dan Rp501.608.261.429.

5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1 Tuntutan Hukum

Sampai dengan 31 Desember 2025, PPAK tidak memiliki tuntutan hukum yang berdampak pada penyerahan aset atau timbulnya kewajiban.

Tabel 42
Daftar Tuntutan Hukum
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

No	Uraian	Keterangan	Putusan
-Tidak Ada-			

F.2 Capaian Output Strategis

Sampai dengan 31 Desember 2025, output strategis yang telah dicapai PPAK dalam program Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme sebagai berikut:

- 541 Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor korupsi, fiskal, dan pemberian informasi yang bekerjasama dengan APKAKUM.
- 370 Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, lingkungan hidup, dan tindak pidana lain, serta dugaan tindak pidana terorisme yang bekerjasama dengan APKAKUM, DJBC dan DJP.
- 514 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif
- 800 Personel APKAKUM telah menerima pelatihan di bidang TPPU dan TPPT.

Tabel 43
Rincian Output Strategis
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Output
1	02.BCE.001	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi	1.217.268.000	1.217.264.979	100,00%	333	541	162,46%
2	01.BCE.002	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme	1.500.724.000	1.500.689.852	100,00%	297	370	124,58%
3	01.BCE.003	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif	1.167.597.000	1.166.962.760	99,95%	343	514	149,85%
4	01.SCF.002	Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1.856.074.000	1.736.729.830	93,57%	750	800	106,67%

F.3 Capaian Output per Fungsi APBN

Pelaksanaan APBN pada PPAK (BA078) dapat diklasifikasikan ke dalam 1 fungsi yaitu Pelayanan Umum (01), Rincian capaian output per fungsi APBN dijelaskan pada tabel 42.

F.3 Capaian Output per Fungsi APBN (lanjutan)

Tabel 44
Rincian Output
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

No	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume	Realisasi Volume	Satuan	%
1	Layanan BMN	34.546.000,00	30.998.462,00	89,73%	5	5	Laporan	100,00%
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	252.354.000,00	250.362.676,00	99,21%	1	1	Layanan	100,00%
3	Layanan Protokol	277.625.000,00	270.654.896,00	97,49%	1	1	Layanan	100,00%
4	Layanan Umum	108.866.000,00	82.416.768,00	75,70%	1	1	Layanan	100,00%
5	Layanan Perkantoran	28.419.148.000,00	26.704.462.263,00	93,97%	1	1	Layanan	100,00%
6	Layanan Sarana Internal	16.510.720.000,00	16.277.945.240,00	98,59%	272	281	Unit	103,31%
7	Layanan Prasarana Internal	136.000.000,00	135.415.560,00	0,00%	1	1	Unit	100,00%
8	Layanan Penyelenggaraan kearsipan	52.506.000,00	51.954.403,00	98,95%	5	5	Dokumen	100,00%
9	Layanan perkantoran (Keuangan)	186.980.951.000,00	186.664.192.266,00	99,83%	1	1	Layanan	100,00%
10	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	125.322.000,00	125.317.992,00	100,00%	3	3	Dokumen	100,00%
11	Layanan Manajemen Keuangan	72.118.000,00	71.756.620,00	99,50%	2	2	Dokumen	100,00%
12	Layanan Reformasi Kinerja	90.079.000,00	90.002.005,00	99,91%	3	3	Laporan	100,00%
13	Layanan organisasi dan tata kelola internal	2.077.680.000,00	2.062.397.987,00	99,26%	16	15	Dokumen	93,75%
14	Layanan Manajemen SDM	354.500.000,00	343.205.055,00	96,81%	1	1	Layanan	100,00%
15	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	3.038.591.000,00	3.005.034.670,00	98,90%	400	482	Orang	120,50%
16	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi	1.217.268.000,00	1.217.264.979,00	100,00%	333	541	Perkara	162,46%
17	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi	902.281.000,00	902.279.500,00	100,00%	7	9	Perkara	128,57%
18	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme	1.500.724.000,00	1.500.689.852,00	100,00%	297	370	Perkara	124,58%
19	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Perjudian	171.993.000,00	171.993.000,00	100,00%	2	6	Perkara	300,00%
20	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup	408.201.000,00	408.197.616,00	100,00%	5	8	Perkara	160,00%
21	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Narkoba	477.776.000,00	477.711.018,00	99,99%	5	10	Perkara	200,00%
22	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif	1.167.597.000,00	1.166.962.760,00	99,95%	343	514	Perkara	149,85%
23	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi	553.693.000,00	553.193.763,00	99,91%	95	105	Perkara	110,53%
24	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Jasa Keuangan	927.265.000,00	926.829.982,00	99,95%	49	59	laporan	120,41%
25	Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan	93.769.000,00	93.767.394,00	100,00%	300	448	Lembaga	149,33%
26	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	1.225.225.000,00	1.225.065.986,00	99,99%	130	158	Laporan	121,54%
27	Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	122.576.000,00	122.538.427,00	99,97%	500	513	Lembaga	102,60%
28	Dokumen Financial Integrity Rating	1.940.093.000,00	1.929.143.660,00	99,44%	6	6	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
29	Pengelolaan Pihak Pelapor	643.594.000,00	618.354.478,00	96,08%	4100	4273	Lembaga	104,22%
30	Pengelolaan Kualitas Data Pelaporan Kebijakan di Bidang Pelaporan serta	302.641.000,00	298.065.311,00	98,49%	160	178	Lembaga	111,25%
31	Pengelolaan Data dan Informasi	322.886.000,00	322.509.238,00	99,88%	16	16	Laporan	100,00%
32	Kerjasama Dalam Negeri	460.036.000,00	452.831.731,00	98,43%	11	24	Dokumen	218,18%
33	Koordinasi dengan Instansi terkait lainnya	557.488.000,00	553.613.728,00	99,31%	16	31	Perkara	193,75%
34	Penyusunan Dokumen NRA dan SRA	54.172.000,00	54.170.812,00	100,00%	2	2	Kajian	100,00%
35	Pelaksanaan Implementasi dan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan Konvensi Internasional	2.633.485.000,00	2.602.659.678,00	98,83%	9	9	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
36	Kerjasama Luar Negeri	982.184.000,00	981.676.868,00	0,00%	11	13	Dokumen	118,18%
37	Penyusunan Dokumen Kajian atau Riset Internasional di Bidang APU, PPT, PPSPM	12.201.000,00	12.200.728,00	100,00%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
38	Kontribusi Rezim APU-PPT Indonesia dalam Keanggotaan FATF	4.681.208.000,00	4.673.102.184,00	99,83%	26	32	Rekomendasi Kebijakan	123,08%
39	Kerja Sama Internasional dalam Keanggotaan FATF	1.639.450.000,00	1.639.450.000,00	100,00%	5	6	Dokumen	120,00%
40	Penyusunan Dokumen Legislasi	306.908.000,00	301.049.551,00	98,09%	24	30	Peraturan	125,00%
41	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Hukum dan HAM	206.635.000,00	206.602.243,00	99,98%	32	38	Rekomendasi Kebijakan	118,75%
42	Pemberian Penanganan Bantuan Hukum	628.792.000,00	624.021.168,00	99,24%	182	208	Perkara	114,29%
43	Layanan Audit Internal	321.775.000,00	321.690.918,00	99,97%	84	112	Laporan	133,33%
44	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	36.743.306.000,00	36.528.086.941,00	99,41%	62	67	Unit	108,06%
45	Sarana PTI	41.881.192.000,00	41.663.036.921,00	99,48%	40	54	Unit	135,00%
46	Penyusunan Dokumen Indeks Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT	1.919.565.000,00	1.908.375.737,00	99,42%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
47	Komunikasi Publik	1.043.423.000,00	1.036.002.129,00	99,29%	1	1	Layanan	100,00%
48	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	2.924.631.000,00	2.860.943.638,00	97,82%	1456	2302	Orang	158,10%
49	Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1.856.074.000,00	1.736.729.830,00	93,57%	750	800	Orang	106,67%
50	Layanan Perkantoran (Keuangan)	17.923.376.000,00	17.825.450.365,00	99,45%	1	1	Layanan	100,00%
51	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16.955.000,00	16.230.000,00	95,72%	3	3	Dokumen	100,00%
52	Layanan Manajemen Keuangan	9.020.000,00	8.311.000,00	92,14%	1	1	Dokumen	100,00%
53	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	25.816.000,00	24.750.700,00	95,87%	7	7	Dokumen	100,00%
54	Layanan Manajemen SDM	13.732.000,00	13.732.000,00	100,00%	1	1	Layanan	100,00%
55	Layanan Umum	39.189.000,00	38.682.100,00	98,71%	1	1	Layanan	100,00%
56	Layanan Perkantoran (Biro Umum)	11.388.377.000,00	11.337.715.793,00	99,56%	1	1	Layanan	100,00%
57	Layanan Sarana Internal	1.256.347.000,00	1.255.674.881,00	99,95%	78	81	Unit	103,85%
58	Layanan Prasarana Internal	200.000.000,00	198.801.000,00	99,40%	1	1	Unit	100,00%

F.4 Program Prioritas Nasional

Dalam Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029, pada PPATK untuk Satuan Kerja Pusdiklat APUPPT terdapat alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu pada Prioritas Nasional VII Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksanaannya diantaranya melalui satu program prioritas, satu kegiatan prioritas, yang berada di satu Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp2.280.787.000 dan realisasi sebesar Rp1.736.729.830 atau 76,15% dengan rincian dijelaskan dalam Tabel 43.

Tabel 45
Rincian Program/Kegiatan Prioritas Nasional
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output Strategis	Targ et	Capai an Output Strte gis	%
Pusdik lat APU PPT	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme/Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK bagi Aparat Penegak Hukum	2.280.787.000	1.736.729.830	76,15	Orang	750	800	106,67

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, Pusdiklat APU PPT memiliki Prioritas Nasional pada tahun 2025, yaitu target peserta Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum Tahun 2025 sejumlah 750 orang peserta. Realisasi pencapaian output dari Prioritas Nasional sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sejumlah 800 orang peserta.

F.5 Rencana Strategis (2025 – 2029)

Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam pelaksanaan Rencana Strategis PPATK> pada awal tahun anggaran 2025, PPATK masih menggunakan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yang telah diubah untuk periode 2023 – 2024 sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja. Hal tersebut dilakukan karena Rencana Strategis PPATK tahun 2025 – 2029 pada saat itu masih dalam penyusunan.

F.5 Rencana Strategis (2025 – 2029) (lanjutan)

Rencana strategis PPATK Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan melalui peraturan Kepala PPATK nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2025. Dengan ditetapkannya regulasi tersebut, penyesuaian arah kebijakan dan perencanaan strategis PPATK terhadap Renstra 2025 – 2029 dilaksanakan bertahap untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan tugas dan fungsi PPATK serta konsistensi perencanaan dan pengelolaan kinerja.



LAMPIRAN

Audited

BA 078

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**



A Neraca Percobaan Tingkat K/L Per 31 Desember 2025

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:35 PM

Tgl Cetak : 08/05/26 4:43 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	17,202,924,261	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	24,375,000	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,359,525,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBPN	0	1,035,433,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	784,827,270	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,493,032	0
0.0	117114	Suku Cadang	74,235,840	0
0.0	117131	Bahan Baku	3,049,200	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	294,168,865	0
0.0	131111	Tanah	194,364,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	234,528,947,216	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	137,633,506,117	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,083,002,890	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	173,627,712,422
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	22,387,571,108
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	22,552,500
0.0	162151	Software	28,886,880,683	0
0.0	162161	Lisensi	26,361,028,579	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	48,015,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	5,109,952,467	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	28,161,819,334
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	5,724,891,192
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	5,718,588,883
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,161,125,364
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	3,727,930,245
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	39,650,917
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	341,551,017,034
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,358,418,137	0
0.0	313211	Transfer Keluar	23,482,460	0
0.0	391111	Ekuitas	0	374,988,908,751
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	7,111,159,694	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	827,091,578	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	382,540,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	4,952,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	43,668,256
3.0	425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	22,232,751
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	53,787,186
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	987,900,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:35 PM

Tgl Cetak : 08/05/26 4:43 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	281,200
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,005,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	5,163,159,931
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	19,283,490,780	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	254,819	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,085,195,336	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	309,360,280	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	996,990,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,218,621,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	439,967,184	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	920,096,100	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,825,000,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	258,115,000	0
3.0	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	1,214,949,600	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	289,134,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	3,641,960,900	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	55,504	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	232,123,640	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	52,055,794	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	528,818,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	198,503,220	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	641,215,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,685,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	1,001,571,170	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	188,517,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	63,521,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	131,990,248,828	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	15,447,908,836	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	860,925,363	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	263,999,280	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	17,880,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,610,315,266	0
3.0	521211	Beban Bahan	3,851,654,012	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	256,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,229,441,621	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	53,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,508,331,746	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	149,668,458	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:35 PM

Tgl Cetak : 08/05/26 4:43 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Beban Langganan Air	126,753,656	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,137,496,966	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	4,570,120,613	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,888,883,853	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,582,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	10,883,477,761	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,444,216,542	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	450,264,105	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,374,626,211	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	5,013,210,377	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9,790,899,014	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	611,899,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,762,739,300	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,743,776,883	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	179,412,634	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	5,882,476,191	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	23,807,753,776	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,478,407,204	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	986,612,597	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	2,321,696,405	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	937,164,721	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	14,145,710	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	51,483,327	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	243,020,962	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	637,825,500	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	2,730,320	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	54,113,920	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	114,361,800	0
JUMLAH			964,809,727,074	964,809,727,074

Keterangan :

FINAL

Jakarta Pusat, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ALBERD TEDDY B SIANIPAR

NRP 71110417

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 08/05/26 4:43 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	341,551,017,034
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,358,418,137	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	382,540,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	4,952,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,595,000
3.0	425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	22,232,751
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	53,787,186
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	875,125,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	281,200
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,005,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,294,629,080	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	256,954	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,089,147,556	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	309,561,232	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,001,500,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,220,361,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	439,967,184	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	921,109,980	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,825,000,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	280,320,000	0
3.0	511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1,214,949,600	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	289,134,700	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,641,960,900	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	55,504	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	232,444,000	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	52,055,794	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	528,818,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	198,575,640	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	860,436,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	8,685,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	1,001,571,170	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	188,517,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	63,521,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	132,019,322,683	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	15,982,292,289	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	860,775,363	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	263,999,280	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	17,880,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 08/05/26 4:43 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,610,315,266	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,855,630,412	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	256,500,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,230,324,955	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	53,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,433,702,834	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	537,656,696	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,216,590,550	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	148,087,503	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	106,082,913	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,137,496,966	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	4,588,408,613	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,888,883,853	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,582,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	10,883,477,761	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,308,800,982	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	450,264,105	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,360,420,129	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5,127,572,177	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,777,722,867	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	611,899,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,762,739,300	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,743,776,883	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	179,412,634	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	5,882,476,191	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,215,635,310	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	135,415,560	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	3,775,346,851	0
3.1	425839	Pengembalian Pendapatan Denda Lainnya	1,100,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	11,138,300
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,135
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,952,220
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	200,952
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	4,510,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,740,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,013,880
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	22,205,000
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	320,360

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

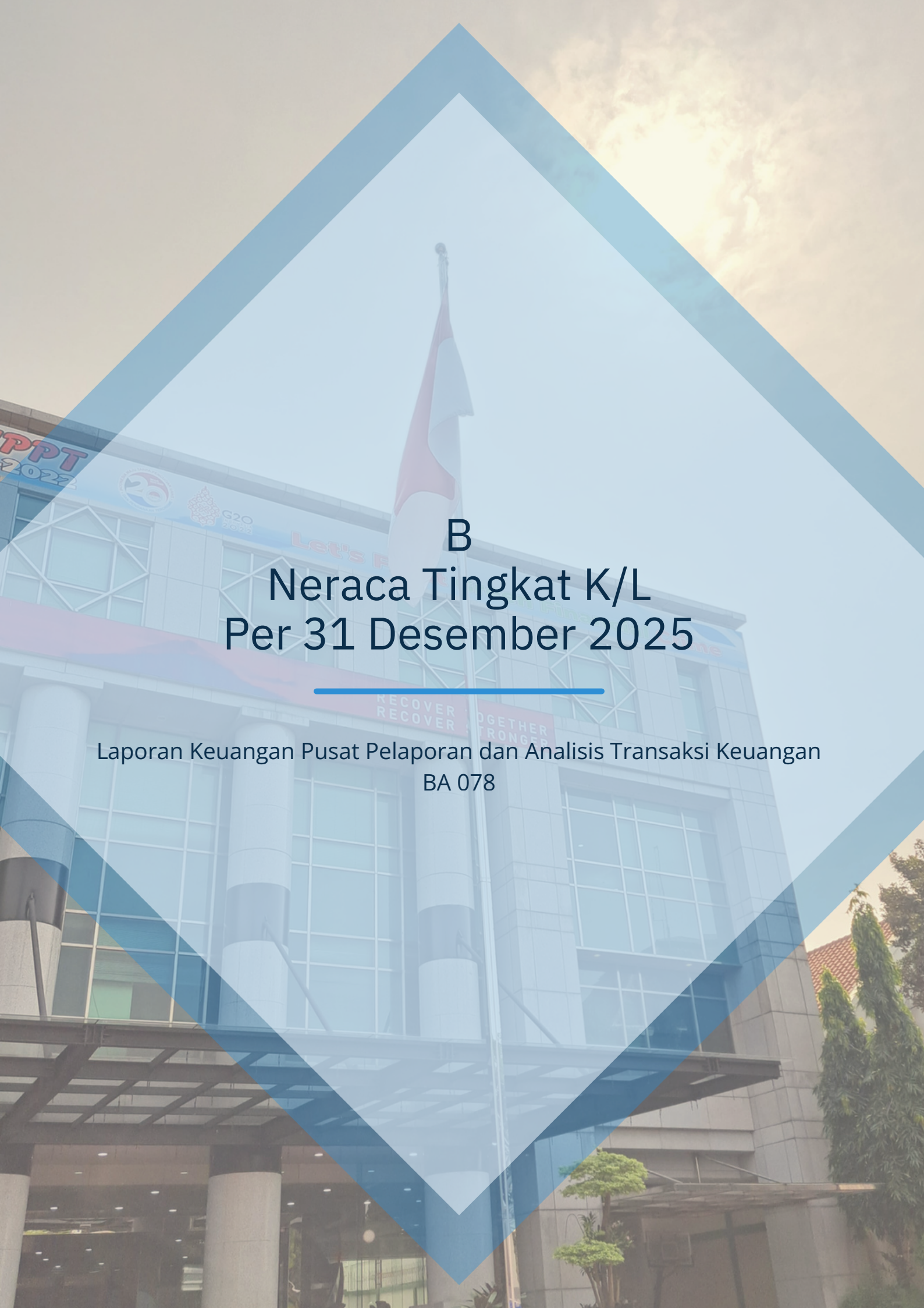
Tgl Data : 08/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 08/05/26 4:43 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	72,420
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	28,073,855
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	513,800
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	883,334
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	18,288,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	22,555,930
JUMLAH			343,026,005,357	343,026,005,357

Keterangan :
FINAL

Jakarta Pusat, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ALBERD TEDDY B SIANIPAR
71110417



B Neraca Tingkat K/L Per 31 Desember 2025

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:35 PM

Tgl Cetak : 08/05/26 4:43 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	17,202,924,261	12,217,130,343	4,985,793,918	40.81
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	24,375,000	136,500,000	(112,125,000)	(82.14)
Piutang Bukan Pajak	1,359,525,000	1,132,525,000	227,000,000	20.04
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,035,433,000)	(397,607,500)	(637,825,500)	160.42
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	324,092,000	734,917,500	(410,825,500)	(55.90)
Persediaan	1,157,774,207	486,343,317	671,430,890	138.06
JUMLAH ASET LANCAR	18,709,165,468	13,574,891,160	5,134,274,308	37.82
ASET TETAP				
Tanah	194,364,000,000	194,364,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	234,528,947,216	190,839,547,501	43,689,399,715	22.89
Gedung dan Bangunan	137,633,506,117	137,633,506,117	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,083,002,890	1,029,540,290	53,462,600	5.19
AKUMULASI PENYUSUTAN	(196,037,836,030)	(173,442,822,194)	(22,595,013,836)	13.03
JUMLAH ASET TETAP	371,571,620,193	350,423,771,714	21,147,848,479	6.03
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	55,295,924,262	48,264,938,930	7,030,985,332	14.57
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	5,109,952,467	1,261,293,905	3,848,658,562	305.14
Aset Lain-lain	0	303,600,000	(303,600,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(33,886,710,526)	(30,227,975,151)	(3,658,735,375)	12.10
JUMLAH ASET LAINNYA	26,519,166,203	19,601,857,684	6,917,308,519	35.29
JUMLAH ASET	416,799,951,864	383,600,520,558	33,199,431,306	8.65
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,607,644,492	8,544,887,634	2,062,756,858	24.14
Pendapatan Diterima Dimuka	39,650,917	66,724,173	(27,073,256)	(40.57)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,647,295,409	8,611,611,807	2,035,683,602	23.64
JUMLAH KEWAJIBAN	10,647,295,409	8,611,611,807	2,035,683,602	23.64
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	406,152,656,455	374,988,908,751	31,163,747,704	8.31
JUMLAH EKUITAS	406,152,656,455	374,988,908,751	31,163,747,704	8.31
JUMLAH EKUITAS	406,152,656,455	374,988,908,751	31,163,747,704	8.31
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	416,799,951,864	383,600,520,558	33,199,431,306	8.65

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:35 PM
Tgl Cetak : 08/05/26 4:43 PM
Halaman : 2
lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Jakarta Pusat, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ALBERD TEDDY B SIANIPAR
NRP 71110417



C LO Tingkat K/L Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
ESELON I : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:35 PM
Tgl Cetak : 08/05/26 4:42 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,085,355,442	2,060,790,092	(975,434,650)	(47.333)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,085,355,442	2,060,790,092	(975,434,650)	(47.333)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,085,355,442	2,060,790,092	(975,434,650)	(47.333)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	185,836,358,691	167,219,547,966	18,616,810,725	11.133
Beban Persediaan	1,180,185,683	1,403,305,588	(223,119,905)	(15.9)
Beban Barang dan Jasa	35,990,448,595	25,834,939,105	10,155,509,490	39.309
Beban Pemeliharaan	34,347,946,272	25,513,829,511	8,834,116,761	34.625
Beban Perjalanan Dinas	19,971,203,022	12,952,229,913	7,018,973,109	54.191
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
ESELON I : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:35 PM

Tgl Cetak : 08/05/26 4:42 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	29,594,469,982	26,095,109,491	3,499,360,491	13.41
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	637,825,500	397,607,500	240,218,000	60.416
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	307,558,437,745	259,416,569,074	48,141,868,671	18.558
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(306,473,082,303)	(257,355,778,982)	(49,117,303,321)	19.085
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	384,761,680	43,440,506	341,321,174	785.721
Pendapatan Pelepasan Aset	387,492,000	91,565,346	295,926,654	323.186
Beban Pelepasan Aset	2,730,320	48,124,840	(45,394,520)	(94.327)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,021,203,162	(3,025,786)	5,024,228,948	(166,04 7.068
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,189,678,882	39,882,214	5,149,796,668	12,912. 515
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	168,475,720	42,908,000	125,567,720	292.644
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5,405,964,842	40,414,720	5,365,550,122	13,276. 227
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(301,067,117,461)	(257,315,364,262)	(43,751,753,199)	17.003
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(301,067,117,461)	(257,315,364,262)	(43,751,753,199)	17.003

Keterangan :
FINAL

Jakarta Pusat, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ALBERD TEDDY B SIANIPAR
NRP 71110417



D LPE Tingkat K/L Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (453374) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 08/05/26 4:42 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	374,988,908,751	389,805,052,714	(14,816,143,963)	(3.8)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(301,067,117,461)	(257,315,364,262)	(43,751,753,199)	17
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(7,938,251,272)	(21,999,600)	(7,916,251,672)	35,983.62
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(7,938,251,272)	(21,999,600)	(7,916,251,672)	35,983.62
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	340,169,116,437	242,521,219,899	97,647,896,538	40.26
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	31,163,747,704	(14,816,143,963)	45,979,891,667	(310.34)
EKUITAS AKHIR	406,152,656,455	374,988,908,751	31,163,747,704	8.31

Keterangan :

FINAL

Jakarta Pusat, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ALBERD TEDDY B SIANIPAR

NRP 71110417



E LRA Belanja Tingkat K/L Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 453374
JENIS SATUAN KERJA : KP

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DKI JAKARTA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 4:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 2:15 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	18,363,025,000	19,337,548,000	19,294,629,080	11,138,300	19,283,490,780	99.72	54,057,220
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	265,000	265,000	256,954	2,135	254,819	96.16	10,181
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,031,524,000	1,093,466,000	1,089,147,556	3,952,220	1,085,195,336	99.24	8,270,664
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	288,529,000	311,954,000	309,561,232	200,952	309,360,280	99.17	2,593,720
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	864,920,000	1,009,500,000	1,001,500,000	4,510,000	996,990,000	98.76	12,510,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,201,136,000	3,220,660,000	3,220,361,000	1,740,000	3,218,621,000	99.94	2,039,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	51,653,000	443,812,000	439,967,184	0	439,967,184	99.13	3,844,816
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	900,325,000	921,910,000	921,109,980	1,013,880	920,096,100	99.8	1,813,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,796,000,000	4,016,280,000	3,825,000,000	0	3,825,000,000	95.24	191,280,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	344,890,000	290,190,000	280,320,000	22,205,000	258,115,000	88.95	32,075,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	26,842,267,000	30,645,585,000	30,381,852,986	44,762,487	30,337,090,499	98.99	308,494,501
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1,204,458,000	1,214,950,000	1,214,949,600	0	1,214,949,600	100	400
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	292,216,000	292,216,000	289,134,700	0	289,134,700	98.95	3,081,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,496,674,000	1,507,166,000	1,504,084,300	0	1,504,084,300	99.8	3,081,700
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,508,729,000	3,647,613,000	3,641,960,900	0	3,641,960,900	99.85	5,652,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	70,000	70,000	55,504	0	55,504	79.29	14,496
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	197,568,000	232,624,000	232,444,000	320,360	232,123,640	99.78	500,360
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	48,135,000	54,523,000	52,055,794	0	52,055,794	95.47	2,467,206
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	530,768,000	530,768,000	528,818,000	0	528,818,000	99.63	1,950,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	182,497,000	198,597,000	198,575,640	72,420	198,503,220	99.95	93,780
511628	Belanja Uang Makan PPPK	574,488,000	883,840,000	860,436,000	0	860,436,000	97.35	23,404,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	8,685,000	8,685,000	0	8,685,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	5,042,255,000	5,556,720,000	5,523,030,838	392,780	5,522,638,058	99.39	34,081,942
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	1,576,610,000	1,001,572,000	1,001,571,170	0	1,001,571,170	100	830
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	1,576,610,000	1,001,572,000	1,001,571,170	0	1,001,571,170	100	830
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	500,000,000	188,536,000	188,517,000	0	188,517,000	99.99	19,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	41,411,000	70,311,000	63,521,000	0	63,521,000	90.34	6,790,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	541,411,000	258,847,000	252,038,000	0	252,038,000	97.37	6,809,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078 **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**
ESELON I : 01 **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 453374 **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 4:44 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 2:15 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	95,042,991,000	132,023,573,000	132,019,322,683	28,073,855	131,991,248,828	99.98	32,324,172
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	12,844,132,000	15,987,488,000	15,982,292,289	0	15,982,292,289	99.97	5,195,711
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	107,887,123,000	148,011,061,000	148,001,614,972	28,073,855	147,973,541,117	99.97	37,519,883
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	143,386,340,000	186,980,951,000	186,664,192,266	73,229,122	186,590,963,144	99.79	389,987,856
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	379,800,000	880,505,000	860,775,363	0	860,775,363	97.76	19,729,637
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000,000	264,000,000	263,999,280	0	263,999,280	100	720
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	29,640,000	17,880,000	17,880,000	0	17,880,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	268,042,000	1,623,736,000	1,610,315,266	0	1,610,315,266	99.17	13,420,734
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	857,482,000	2,786,121,000	2,752,969,909	0	2,752,969,909	98.81	33,151,091
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,717,179,000	4,319,443,000	3,855,630,412	513,800	3,855,116,612	89.25	464,326,388
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	151,000,000	267,500,000	256,500,000	0	256,500,000	95.89	11,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,215,358,000	2,246,388,000	2,230,324,955	883,334	2,229,441,621	99.25	16,946,379
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	60,000,000	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,143,537,000	6,886,331,000	6,395,455,367	1,397,134	6,394,058,233	92.85	492,272,767
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,003,930,000	1,697,456,000	1,433,702,834	0	1,433,702,834	84.46	263,753,166
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	150,000,000	537,822,000	537,656,696	0	537,656,696	99.97	165,304
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,153,930,000	2,235,278,000	1,971,359,530	0	1,971,359,530	88.19	263,918,470
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,066,649,000	3,532,020,000	3,216,590,550	0	3,216,590,550	91.07	315,429,450
522112	Belanja Langganan Telepon	157,000,000	158,800,000	148,087,503	0	148,087,503	93.25	10,712,497
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	115,800,000	106,082,913	0	106,082,913	91.61	9,717,087
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,378,674,000	3,177,256,000	3,137,496,966	0	3,137,496,966	98.75	39,759,034
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,109,612,000	4,591,742,000	4,588,408,613	18,288,000	4,570,120,613	99.53	21,621,387
522141	Belanja Sewa	3,019,498,000	3,531,883,000	2,888,883,853	0	2,888,883,853	81.79	642,999,147
522151	Belanja Jasa Profesi	2,509,300,000	1,767,600,000	1,582,000,000	0	1,582,000,000	89.5	185,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	10,854,472,000	10,973,633,000	10,883,477,761	0	10,883,477,761	99.18	90,155,239
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	27,155,205,000	27,848,734,000	26,551,028,159	18,288,000	26,532,740,159	95.27	1,315,993,841
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	800,925,000	2,372,460,000	1,308,800,982	0	1,308,800,982	55.17	1,063,659,018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 453374
JENIS SATUAN KERJA : KP

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DKI JAKARTA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 4:44 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 2:15 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	472,500,000	450,888,000	450,264,105	0	450,264,105	99.86	623,895
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39,028,381,000	32,895,650,000	32,360,420,129	0	32,360,420,129	98.37	535,229,871
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5,201,112,000	5,127,600,000	5,127,572,177	0	5,127,572,177	100	27,823
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	45,502,918,000	40,846,598,000	39,247,057,393	0	39,247,057,393	96.08	1,599,540,607
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,700,095,000	13,500,734,000	9,777,722,867	22,555,930	9,755,166,937	72.26	3,745,567,063
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,134,456,000	993,242,000	611,899,000	0	611,899,000	61.61	381,343,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,281,399,000	5,186,893,000	1,762,739,300	0	1,762,739,300	33.98	3,424,153,700
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,856,541,000	7,500,974,000	1,743,776,883	0	1,743,776,883	23.25	5,757,197,117
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	25,972,491,000	27,181,843,000	13,896,138,050	22,555,930	13,873,582,120	51.04	13,308,260,880
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,100,000,000	979,480,000	179,412,634	0	179,412,634	18.32	800,067,366
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	8,670,100,000	7,179,868,000	5,882,476,191	0	5,882,476,191	81.93	1,297,391,809
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	9,770,100,000	8,159,348,000	6,061,888,825	0	6,061,888,825	74.29	2,097,459,175
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	115,555,663,000	115,944,253,000	96,875,897,233	42,241,064	96,833,656,169	83.52	19,110,596,831
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52,330,050,000	54,766,412,000	54,215,635,310	0	54,215,635,310	98.99	550,776,690
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	52,330,050,000	54,766,412,000	54,215,635,310	0	54,215,635,310	98.99	550,776,690
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	100,000,000	136,000,000	135,415,560	0	135,415,560	99.57	584,440
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	100,000,000	136,000,000	135,415,560	0	135,415,560	99.57	584,440
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	8,910,000,000	3,775,500,000	3,775,346,851	0	3,775,346,851	100	153,149
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	8,910,000,000	3,775,500,000	3,775,346,851	0	3,775,346,851	100	153,149
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	61,340,050,000	58,677,912,000	58,126,397,721	0	58,126,397,721	99.06	551,514,279
	JUMLAH BELANJA	320,282,053,000	361,603,116,000	341,666,487,220	115,470,186	341,551,017,034	94.45	20,052,098,966



F LRA Belanja Tingkat K/L Menurut Jenis Belanja Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 078
: 453374

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/26 4:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	18,363,025,000	19,337,548,000	19,294,629,080	11,138,300	19,283,490,780	99.72	54,057,220
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	265,000	265,000	256,954	2,135	254,819	96.16	10,181
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,031,524,000	1,093,466,000	1,089,147,556	3,952,220	1,085,195,336	99.24	8,270,664
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	288,529,000	311,954,000	309,561,232	200,952	309,360,280	99.17	2,593,720
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	864,920,000	1,009,500,000	1,001,500,000	4,510,000	996,990,000	98.76	12,510,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,201,136,000	3,220,660,000	3,220,361,000	1,740,000	3,218,621,000	99.94	2,039,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	51,653,000	443,812,000	439,967,184	0	439,967,184	99.13	3,844,816
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	900,325,000	921,910,000	921,109,980	1,013,880	920,096,100	99.8	1,813,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,796,000,000	4,016,280,000	3,825,000,000	0	3,825,000,000	95.24	191,280,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	344,890,000	290,190,000	280,320,000	22,205,000	258,115,000	88.95	32,075,000
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1,204,458,000	1,214,950,000	1,214,949,600	0	1,214,949,600	100	400
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	292,216,000	292,216,000	289,134,700	0	289,134,700	98.95	3,081,300
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,508,729,000	3,647,613,000	3,641,960,900	0	3,641,960,900	99.85	5,652,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	70,000	70,000	55,504	0	55,504	79.29	14,496
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	197,568,000	232,624,000	232,444,000	320,360	232,123,640	99.78	500,360
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	48,135,000	54,523,000	52,055,794	0	52,055,794	95.47	2,467,206
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	530,768,000	530,768,000	528,818,000	0	528,818,000	99.63	1,950,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	182,497,000	198,597,000	198,575,640	72,420	198,503,220	99.95	93,780
511628	Belanja Uang Makan PPPK	574,488,000	883,840,000	860,436,000	0	860,436,000	97.35	23,404,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	8,685,000	8,685,000	0	8,685,000	100	0
512111	Belanja Uang Honor Tetap	1,576,610,000	1,001,572,000	1,001,571,170	0	1,001,571,170	100	830
512211	Belanja Uang Lembur	500,000,000	188,536,000	188,517,000	0	188,517,000	99.99	19,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	41,411,000	70,311,000	63,521,000	0	63,521,000	90.34	6,790,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	95,042,991,000	132,023,573,000	132,019,322,683	28,073,855	131,991,248,828	99.98	32,324,172
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	12,844,132,000	15,987,488,000	15,982,292,289	0	15,982,292,289	99.97	5,195,711
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	143,386,340,000	186,980,951,000	186,664,192,266	73,229,122	186,590,963,144	99.83	389,987,856
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	379,800,000	880,505,000	860,775,363	0	860,775,363	97.76	19,729,637
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000,000	264,000,000	263,999,280	0	263,999,280	100	720
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	29,640,000	17,880,000	17,880,000	0	17,880,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	268,042,000	1,623,736,000	1,610,315,266	0	1,610,315,266	99.17	13,420,734
521211	Belanja Bahan	2,717,179,000	4,319,443,000	3,855,630,412	513,800	3,855,116,612	89.25	464,326,388
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	151,000,000	267,500,000	256,500,000	0	256,500,000	95.89	11,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,215,358,000	2,246,388,000	2,230,324,955	883,334	2,229,441,621	99.25	16,946,379
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	60,000,000	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,003,930,000	1,697,456,000	1,433,702,834	0	1,433,702,834	84.46	263,753,166
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	150,000,000	537,822,000	537,656,696	0	537,656,696	99.97	165,304
522111	Belanja Langganan Listrik	2,066,649,000	3,532,020,000	3,216,590,550	0	3,216,590,550	91.07	315,429,450

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078
SATUAN KERJA : 453374

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/26 4:44 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522112	Belanja Langganan Telepon	157,000,000	158,800,000	148,087,503	0	148,087,503	93.25	10,712,497
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	115,800,000	106,082,913	0	106,082,913	91.61	9,717,087
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,378,674,000	3,177,256,000	3,137,496,966	0	3,137,496,966	98.75	39,759,034
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,109,612,000	4,591,742,000	4,588,408,613	18,288,000	4,570,120,613	99.53	21,621,387
522141	Belanja Sewa	3,019,498,000	3,531,883,000	2,888,883,853	0	2,888,883,853	81.79	642,999,147
522151	Belanja Jasa Profesi	2,509,300,000	1,767,600,000	1,582,000,000	0	1,582,000,000	89.5	185,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	10,854,472,000	10,973,633,000	10,883,477,761	0	10,883,477,761	99.18	90,155,239
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	800,925,000	2,372,460,000	1,308,800,982	0	1,308,800,982	55.17	1,063,659,018
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	472,500,000	450,888,000	450,264,105	0	450,264,105	99.86	623,895
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39,028,381,000	32,895,650,000	32,360,420,129	0	32,360,420,129	98.37	535,229,871
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5,201,112,000	5,127,600,000	5,127,572,177	0	5,127,572,177	100	27,823
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,700,095,000	13,500,734,000	9,777,722,867	22,555,930	9,755,166,937	72.26	3,745,567,063
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,134,456,000	993,242,000	611,899,000	0	611,899,000	61.61	381,343,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,281,399,000	5,186,893,000	1,762,739,300	0	1,762,739,300	33.98	3,424,153,700
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,856,541,000	7,500,974,000	1,743,776,883	0	1,743,776,883	23.25	5,757,197,117
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,100,000,000	979,480,000	179,412,634	0	179,412,634	18.32	800,067,366
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	8,670,100,000	7,179,868,000	5,882,476,191	0	5,882,476,191	81.93	1,297,391,809
	JUMLAH BELANJA BARANG	115,555,663,000	115,944,253,000	96,875,897,233	42,241,064	96,833,656,169	83.55	19,110,596,831
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52,330,050,000	54,766,412,000	54,215,635,310	0	54,215,635,310	98.99	550,776,690
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	100,000,000	136,000,000	135,415,560	0	135,415,560	99.57	584,440
536111	Belanja Modal Lainnya	8,910,000,000	3,775,500,000	3,775,346,851	0	3,775,346,851	100	153,149
	JUMLAH BELANJA MODAL	61,340,050,000	58,677,912,000	58,126,397,721	0	58,126,397,721	99.06	551,514,279
	JUMLAH RUPIAH MURNI	320,282,053,000	361,603,116,000	341,666,487,220	115,470,186	341,551,017,034	94.49	20,052,098,966
	TOTAL	320,282,053,000	361,603,116,000	341,666,487,220	115,470,186	341,551,017,034	94.49	20,052,098,966



G

LRA Belanja Tingkat K/L Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 078
: 453374

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/26 4:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	18,363,025,000	19,337,548,000	19,294,629,080	11,138,300	19,283,490,780	99.72	54,057,220
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	265,000	265,000	256,954	2,135	254,819	96.16	10,181
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,031,524,000	1,093,466,000	1,089,147,556	3,952,220	1,085,195,336	99.24	8,270,664
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	288,529,000	311,954,000	309,561,232	200,952	309,360,280	99.17	2,593,720
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	864,920,000	1,009,500,000	1,001,500,000	4,510,000	996,990,000	98.76	12,510,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,201,136,000	3,220,660,000	3,220,361,000	1,740,000	3,218,621,000	99.94	2,039,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	51,653,000	443,812,000	439,967,184	0	439,967,184	99.13	3,844,816
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	900,325,000	921,910,000	921,109,980	1,013,880	920,096,100	99.8	1,813,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,796,000,000	4,016,280,000	3,825,000,000	0	3,825,000,000	95.24	191,280,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	344,890,000	290,190,000	280,320,000	22,205,000	258,115,000	88.95	32,075,000
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1,204,458,000	1,214,950,000	1,214,949,600	0	1,214,949,600	100	400
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	292,216,000	292,216,000	289,134,700	0	289,134,700	98.95	3,081,300
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,508,729,000	3,647,613,000	3,641,960,900	0	3,641,960,900	99.85	5,652,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	70,000	70,000	55,504	0	55,504	79.29	14,496
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	197,568,000	232,624,000	232,444,000	320,360	232,123,640	99.78	500,360
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	48,135,000	54,523,000	52,055,794	0	52,055,794	95.47	2,467,206
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	530,768,000	530,768,000	528,818,000	0	528,818,000	99.63	1,950,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	182,497,000	198,597,000	198,575,640	72,420	198,503,220	99.95	93,780
511628	Belanja Uang Makan PPPK	574,488,000	883,840,000	860,436,000	0	860,436,000	97.35	23,404,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	8,685,000	8,685,000	0	8,685,000	100	0
512111	Belanja Uang Honor Tetap	1,576,610,000	1,001,572,000	1,001,571,170	0	1,001,571,170	100	830
512211	Belanja Uang Lembur	500,000,000	188,536,000	188,517,000	0	188,517,000	99.99	19,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	41,411,000	70,311,000	63,521,000	0	63,521,000	90.34	6,790,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	95,042,991,000	132,023,573,000	132,019,322,683	28,073,855	131,991,248,828	99.98	32,324,172
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	12,844,132,000	15,987,488,000	15,982,292,289	0	15,982,292,289	99.97	5,195,711
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	143,386,340,000	186,980,951,000	186,664,192,266	73,229,122	186,590,963,144	99.83	389,987,856
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	379,800,000	880,505,000	860,775,363	0	860,775,363	97.76	19,729,637
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000,000	264,000,000	263,999,280	0	263,999,280	100	720
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	29,640,000	17,880,000	17,880,000	0	17,880,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	268,042,000	1,623,736,000	1,610,315,266	0	1,610,315,266	99.17	13,420,734
521211	Belanja Bahan	2,717,179,000	4,319,443,000	3,855,630,412	513,800	3,855,116,612	89.25	464,326,388
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	151,000,000	267,500,000	256,500,000	0	256,500,000	95.89	11,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,215,358,000	2,246,388,000	2,230,324,955	883,334	2,229,441,621	99.25	16,946,379
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	60,000,000	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,003,930,000	1,697,456,000	1,433,702,834	0	1,433,702,834	84.46	263,753,166
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	150,000,000	537,822,000	537,656,696	0	537,656,696	99.97	165,304
522111	Belanja Langganan Listrik	2,066,649,000	3,532,020,000	3,216,590,550	0	3,216,590,550	91.07	315,429,450

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078
SATUAN KERJA : 453374

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/26 4:44 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522112	Belanja Langganan Telepon	157,000,000	158,800,000	148,087,503	0	148,087,503	93.25	10,712,497
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	115,800,000	106,082,913	0	106,082,913	91.61	9,717,087
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,378,674,000	3,177,256,000	3,137,496,966	0	3,137,496,966	98.75	39,759,034
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,109,612,000	4,591,742,000	4,588,408,613	18,288,000	4,570,120,613	99.53	21,621,387
522141	Belanja Sewa	3,019,498,000	3,531,883,000	2,888,883,853	0	2,888,883,853	81.79	642,999,147
522151	Belanja Jasa Profesi	2,509,300,000	1,767,600,000	1,582,000,000	0	1,582,000,000	89.5	185,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	10,854,472,000	10,973,633,000	10,883,477,761	0	10,883,477,761	99.18	90,155,239
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	800,925,000	2,372,460,000	1,308,800,982	0	1,308,800,982	55.17	1,063,659,018
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	472,500,000	450,888,000	450,264,105	0	450,264,105	99.86	623,895
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39,028,381,000	32,895,650,000	32,360,420,129	0	32,360,420,129	98.37	535,229,871
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5,201,112,000	5,127,600,000	5,127,572,177	0	5,127,572,177	100	27,823
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,700,095,000	13,500,734,000	9,777,722,867	22,555,930	9,755,166,937	72.26	3,745,567,063
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,134,456,000	993,242,000	611,899,000	0	611,899,000	61.61	381,343,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,281,399,000	5,186,893,000	1,762,739,300	0	1,762,739,300	33.98	3,424,153,700
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,856,541,000	7,500,974,000	1,743,776,883	0	1,743,776,883	23.25	5,757,197,117
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,100,000,000	979,480,000	179,412,634	0	179,412,634	18.32	800,067,366
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	8,670,100,000	7,179,868,000	5,882,476,191	0	5,882,476,191	81.93	1,297,391,809
	JUMLAH BELANJA BARANG	115,555,663,000	115,944,253,000	96,875,897,233	42,241,064	96,833,656,169	83.55	19,110,596,831
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52,330,050,000	54,766,412,000	54,215,635,310	0	54,215,635,310	98.99	550,776,690
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	100,000,000	136,000,000	135,415,560	0	135,415,560	99.57	584,440
536111	Belanja Modal Lainnya	8,910,000,000	3,775,500,000	3,775,346,851	0	3,775,346,851	100	153,149
	JUMLAH BELANJA MODAL	61,340,050,000	58,677,912,000	58,126,397,721	0	58,126,397,721	99.06	551,514,279
	JUMLAH RUPIAH MURNI	320,282,053,000	361,603,116,000	341,666,487,220	115,470,186	341,551,017,034	94.49	20,052,098,966
	TOTAL	320,282,053,000	361,603,116,000	341,666,487,220	115,470,186	341,551,017,034	94.49	20,052,098,966

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078
SATUAN KERJA : 453374

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 08/05/26 4:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme							
3379	Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK	2,400,000,000	2,400,000,000	1,131,672,962	0	1,131,672,962	47.15	1,268,327,038
3380	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK	19,558,398,000	19,558,398,000	13,914,083,595	3,711,516	13,910,372,079	71.14	5,648,025,921
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	81,845,688,000	79,572,140,000	78,192,390,862	0	78,192,390,862	98.27	1,379,749,138
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	8,720,536,000	8,720,536,000	5,536,274,476	18,288,000	5,517,986,476	63.49	3,202,549,524
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	8,508,000,000	8,508,000,000	6,398,468,488	46,600	6,398,421,888	75.21	2,109,578,112
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BE	121,032,622,000	118,759,074,000	105,172,890,383	22,046,116	105,150,844,267	88.56	13,608,229,733
WA	Program Dukungan Manajemen							
3374	Pengawasan Internal PPATK	500,000,000	571,668,000	321,690,918	0	321,690,918	56.27	249,977,082
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	144,124,565,000	187,719,176,000	186,951,268,883	73,229,122	186,878,039,761	99.59	841,136,239
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Ppatk	6,589,260,000	6,517,592,000	5,414,180,212	20,194,948	5,393,985,264	83.07	1,123,606,736
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK	48,035,606,000	48,035,606,000	43,806,456,824	0	43,806,456,824	91.2	4,229,149,176
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	199,249,431,000	242,844,042,000	236,493,596,837	93,424,070	236,400,172,767	97.38	6,443,869,233
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	320,282,053,000	361,603,116,000	341,666,487,220	115,470,186	341,551,017,034	94.49	20,052,098,966
	JUMLAH	320,282,053,000	361,603,116,000	341,666,487,220	115,470,186	341,551,017,034	94.49	20,052,098,966



H LRA Pendapatan Tingkat K/L Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078 **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**
ESELON I : 01 **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 453374 **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/26 4:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	80,000,000	382,540,000	0	382,540,000	478.18
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	4,952,000	0	4,952,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	21,000,000	16,595,000	0	16,595,000	79.02
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	22,232,751	0	22,232,751	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	101,000,000	426,319,751	0	426,319,751	422.1
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	53,787,186	0	53,787,186	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	875,125,000	1,100,000	874,025,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	928,912,186	1,100,000	927,812,186	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	281,200	0	281,200	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,005,000	0	4,005,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	4,286,200	0	4,286,200	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	101,000,000	1,359,518,137	1,100,000	1,358,418,137	1,344.97
	JUMLAH PENDAPATAN	101,000,000	1,359,518,137	1,100,000	1,358,418,137	1,344.97



I Daftar Rekening Pemerintah

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

DAFTAR REKENING PEMERINTAH

No	Nama Satker	Kementerian Negara/Lembaga	Kode BA-Es-I-Satker	Jenis Rekening (Giro/Deposito)	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/Kantor Pos
1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-453374 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Giro	8100124533741000	BPG 175 PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gambir
2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-417654 Pusdiklat APUPPT	Giro	8100124176541000	BPG 023 PUSDIKLAT APU PPT	BPG 023 PUSDIKLAT APU PPT	Bank Mandiri, KC. Jkt Plaza Mandiri
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-417654 Pusdiklat APUPPT	Giro	1330026731364	BPN 023 PUSDIKLAT APU DAN PPT	BPN 023 PUSDIKLAT APU DAN PPT	Bank Mandiri, KCP Cibinong Mayor Oking



J Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya, dan Setara Kas

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Nama Akun	31 Desember 2025		Keterangan	31 Desember 2024		Keterangan
			Jumlah	Tunai/No. Rek		Jumlah	Tunai/No. Rek	
1	453374	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	-	-	-	-	-
2	417654	Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-



K Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Unit Badan Lainnya yang kami pimpin merupakan bagian dari Keuangan Negara, baik yang mendapatkan dana dari APBN maupun non APBN, sehingga kami wajib melaporkan seluruh sumber daya dan realisasi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab kami kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pimpinan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

Ikhtisar Laporan Keuangan Komite TPPU Tahun 2025 *Audited* telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang ada di Satuan Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Komite TPPU.

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Alberd T.B. Sianipar



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (KOMITE TPPU)
TAHUN 2025 AUDITED

Dasar Hukum

1. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tugas Komite TPPU

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, Komite TPPU bertugas untuk mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Fungsi Komite TPPU

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
4. Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Keanggotaan Komite TPPU

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2025, susunan Keanggotaan Komite TPPU, yaitu :

Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permayarakatan
Wakil Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Komite TPPU



- Sekretaris merangkap : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri
- Anggota : 2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Hukum
5. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
6. Menteri Perdagangan
7. Menteri Koperasi
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
9. Menteri Lingkungan Hidup
10. Menteri Kehutanan
11. Menteri Kelautan dan Perikanan
12. Gubernur Bank Indonesia
13. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
14. Jaksa Agung
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
16. Kepala Badan Intelijen Negara
17. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
18. Kepala Badan Narkotika Nasional

Informasi Keuangan

Kegiatan Komite TPPU dibebankan pada DIPA PPATK Nomor DIPA-078.01.1.453374/2025 tanggal 2 Desember 2024 dalam Pelaksanaan Implementasi dan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan Konvensi Internasional – Pelaksanaan Kegiatan Komite TPPU (3380.PBA.001.054)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
DANA APBN/NON APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA UBL	ALOKASI APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	BA	KETERANGAN
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3-8)	10	11	12
1	Komite PP TPPU	222.399.000	-	220.991.528	-	-	209.791.528	1.407.472	-	078	
	A. Koordinasi melalui Komite KKN PP-TPPU TPPU	222.399.000	-	220.991.528	-	-	209.791.528	1.407.472	-		
	Belanja Bahan	118.989.000	-	117.582.400	-	-	117.582.400	1.406.600	-		
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.365.000	-	4.364.128	-	-	4.364.128	872	-		
	Belanja Sewa	15.535.000	-	15.535.000	-	-	15.535.000	-	-		
	Belanja Jasa Profesi	11.200.000	-	11.200.000	-	-	11.200.000	-	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.120.000	-	6.120.000	-	-	6.120.000	-	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66.190.000	-	66.190.000	-	-	66.190.000	-	-		

Komite TPPU



IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
DANA APBN/NON APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA UBL	ALOKASI APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	BA	KETERANGAN
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3-8)	10	11	12
1	Komite PP TPPU	222.399.000	-	220.991.528	-	-	220.991.528	1.407.472	-	078	Kode Kegiatan/ Output : 3380.PBA.001.054

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA UBL	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (6+7)	9 = (5-9)	11	11
1	Komite PP TPPU	-	-	-	220.991.528	-	220.991.528	(220.991.528)	078	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA UBL	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)	8	9	10 = (8+9)	11	12 = (10+11)	11	11
1	Komite PP TPPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078	

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Alberd T.B. Sianipar
NRP 71110417





L Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER

AUDITED 2025



UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG
BA 078 PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pelaporan Barang Milik Negara Pengguna Barang disusun untuk menyajikan data dan informasi BMN hasil Pembukuan dan Inventarisasi yang dilakukan oleh unit akuntansi Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. Penyusunan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KM.6/2022 Tentang Perubahan Kedua Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- f. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- g. Peraturan lain terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

B. Entitas Pelaporan

PPATK adalah lembaga non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Pada PPAATK terdapat dua unit akuntansi yang bertugas mengadministrasikan dan mengelola BMN yang dikuasakan yaitu Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Unit kerja yang berfungsi sebagai UAPB adalah Sekretariat Utama PPAATK, sedangkan UAKPB pada PPAATK adalah Kantor Pusat dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT).

C. Periode Laporan

Laporan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang Tahun 2025 pada PPAATK disusun untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada PPAATK didasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait langsung dengan usaha pengelolaan BMN diantaranya:

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 28 tahun 2020;
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2025 periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara (BMN) yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp748.184.696.931 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah). Nilai tersebut merupakan akumulasi BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp702.049.216.368 (tujuh ratus dua miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), ditambah dengan mutasi tambah yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp61.237.219.250 (enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), serta dikurangi dengan mutasi kurang yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.101.738.687



(lima belas miliar seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang bersumber dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama Tahun Anggaran 2025. Adapun transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan Barang Pengguna pada PPATK periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025 merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 2 (dua) Kuasa Pengguna Barang. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri dari:

1. Laporan Posisi BMN di Neraca Saldo Awal;
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025;
3. Laporan Barang Persediaan;
4. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
5. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
6. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB);
7. Laporan Barang Bersejarah;
8. Laporan Barang Rusak Berat;
9. Laporan Barang Hilang;
10. Laporan rapat koordinasi percepatan penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
11. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel);
12. Laporan Amortisasi ATB;
13. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN;
15. Laporan Persediaan Tidak Dikuasai;
16. Daftar Barang Rusak Berat Diusulkan ke Pengelola;
17. Neraca Percobaan Berbasis AkruaL dan Laporan Neraca Tingkat K/L;
18. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan penjelasan selisihnya; dan
19. Ringkasan Pelaksanaan Pengasuransian BMN.



IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 1 JANUARI s.d 30 Juni 2025

1. Saldo Awal per 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sebesar Rp702.049.216.368 (tujuh ratus dua miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp701.402.450.338 (tujuh ratus satu miliar empat ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp646.766.030 (enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga puluh rupiah). Nilai saldo awal BMN Aset Tak Berwujud adalah sebesar Rp48.359.359.660 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara per 1 Januari s.d 31 Desember 2025

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.001.951.797 (dua miliar satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Nilai tersebut merupakan saldo akhir persediaan yang terbentuk dari saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp923.210.474 (sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), ditambah dengan mutasi tambah persediaan selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.082.221.703 (tiga miliar delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah), serta dikurangi dengan mutasi kurang persediaan selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.003.480.380 (dua miliar tiga juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan data tersebut, total mutasi bersih persediaan selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.078.741.323 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	714.112.421	866.544.940	1.580.657.361
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	35.191.564	-21.931.857	13.259.707
117114	Suku Cadang	102.928.062	-5.431.752	97.496.310

Kode Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117121	Pita Cukai. Materai dan Leges	0	-	-
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	-	-
117131	Bahan Baku	3.049.200	-	3.049.200
117199	Persediaan Lainnya	67.929.227	239.559.992	307.489.219
Jumlah		923.210.474	1.078.741.323	2.001.951.797

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar nihil yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak sebesar nihil dan kondisi usang sebesar nihil.

b. Tanah

Saldo Tanah pada PPATK per 31 Desember 2025 sebesar Rp235.898.373.342 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dengan luas 20.678 m². Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 20.678 m² dengan nilai sebesar Rp235.898.373.342 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), mutasi tambah dan mutasi kurang adalah sebesar nihil.

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Tanah Tersebut Meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
NIHIL	NIHIL

Dari jumlah/nilai tanah di atas, luas bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah seluas 10,62 m² dengan peruntukkan sebagai lahan usaha koperasi dan ATM Censer. Luas bidang tanah yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	20.678	235.898.373.342
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025. Tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh PPATK.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp275.241.583.572 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Nilai tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp229.041.276.172 (dua ratus dua puluh sembilan miliar empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), dengan mutasi tambah selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp57.928.839.498 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp11.728.532.098 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Bantu (3.01.03)

Saldo Alat Bantu pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.554.962.266 (lima belas miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 49 unit dan nilai sebesar Rp12.309.816.886 (dua belas miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Alat Bantu sebesar Rp5.706.087.200 (lima miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp2.460.941.820 (dua miliar

empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	223.661.200	NIHIL
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.186.500.000	NIHIL
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	76.146.000	NIHIL
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	219.780.000	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Penghapusan	2.460.941.820	NIHIL

Dari jumlah Alat Bantu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.
Dari jumlah Alat Bantu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	54 unit	15.554.962.266
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Bantu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Bantu per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.031.105.138 (sepuluh miliar tiga puluh satu juta seratus lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

2) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.435.025.804 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 48 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp13.319.225.804 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 44 unit. Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp115.800.000 (seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penambahan jumlah barang sebanyak 4 unit, sedangkan mutasi kurang adalah nihil.

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	115.800.000	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	47 unit	13.428.794.804
Rusak Ringan	1 unit	6.231.000
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Rincian Barang Rusak Ringan adalah sebagai berikut :

Nama Barang	Kode Barang	Rupiah
Sepeda Motor	3.02.01.04.001.002	6.231.000

Kelompok barang Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Berdasarkan Tabel Penyusutan Intrakomptabel, akumulasi penyusutan pada akun Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.605.003.801 (sebelas miliar enam ratus lima juta tiga ribu delapan ratus satu rupiah).

3) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (3.02.02)

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp145.068.052 (seratus empat puluh lima juta enam puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 64 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 63 unit dan nilai sebesar Rp143.549.527 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp1.518.525 (satu juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan penambahan jumlah barang sebanyak 1 unit, sedangkan mutasi kurang adalah nihil.

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	Rp1.518.525	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	64 unit	145.068.052
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Berdasarkan Tabel Penyusutan Intrakomptabel, akumulasi penyusutan pada akun Alat Angkutan Darat Tak Bermotor per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp144.308.789 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

4) Alat Bengkel Bermesin (3.03.01)

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.553.100 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri dari 9 unit barang.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan nilai sebesar Rp24.553.100 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp3.135.000 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp3.135.000 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai saldo akhir Alat Bengkel Bermesin tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Transfer Masuk	3.135.000	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Transfer Keluar	3.135.000	NIHIL

Dari jumlah Alat Bengkel Bermesin di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Bengkel Bermesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	9 unit	24.553.100
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Bengkel Bermesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Berdasarkan Tabel Penyusutan Intrakomptabel, akumulasi penyusutan pada akun Alat Bengkel Bermesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.697.025 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).

5) Alat Bengkel Tak Bermesin (3.03.02)

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 33 unit dengan nilai sebesar Rp119.889.120 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 33 unit dan nilai sebesar Rp119.889.120 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Alat Bengkel Tak Bermesin adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat Bengkel Tak Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Bengkel Tak Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Bengkel Tak Bermesin di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Bengkel Tak Bermesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	33 unit	119.889.120
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Bengkel Tak Bermesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Bengkel Tak Bermesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp115.763.620 (seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah).

6) Alat Ukur (3.03.03)

Saldo Alat Ukur pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.697.200 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 7 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 7 unit dan nilai sebesar Rp17.697.200 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Alat Ukur adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	7 unit	17.697.200
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Ukur adalah sebesar Rp16.912.080 (enam belas juta sembilan ratus dua belas ribu delapan puluh rupiah).

7) Alat Pengolahan (3.04.01)

Saldo Alat Pengolahan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp68.475.000 (enam puluh delapan

juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 24 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 24 unit dan nilai sebesar Rp68.475.000 (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Alat Pengolahan adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat Pengolahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Pengolahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Pengolahan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Pengolahan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	24 unit	68.475.000
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Pengolahan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Pengolahan adalah sebesar Rp60.080.636 (enam puluh juta delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

8) Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.130.297.374 (empat belas miliar

seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 1.417 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 1.416 unit dan nilai sebesar Rp11.498.350.687 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Alat Kantor sebanyak 103 unit dengan nilai sebesar Rp2.952.715.077 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah) serta mutasi kurang sebanyak 102 unit dengan nilai sebesar Rp320.768.390 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	2.758.595.987	NIHIL
Transfer Masuk	184.051.460	NIHIL
Perolehan Lainnya	10.067.630	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Transfer Keluar	184.051.460	NIHIL
Penghapusan	126.572.300	77.000
Koreksi Pencatatan	10.067.630	NIHIL

Dari jumlah Alat Kantor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Kantor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1.414 unit	13.918.531.654
Rusak Ringan	2 unit	3.837.400
Rusak Berat	1 unit	207.928.320

Kelompok barang Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Kantor adalah sebesar Rp11.114.794.929 (sebelas miliar seratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

9) Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp41.862.333.575 (empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 5.062 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 5.026 unit dan nilai sebesar Rp38.257.865.475 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Alat Rumah Tangga sebanyak 186 unit dengan nilai sebesar Rp6.888.945.311 (enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) serta mutasi kurang sebanyak 150 unit dengan nilai sebesar Rp3.284.477.211 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah).

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	3.933.002.307	NIHIL
Transfer Masuk	1.174.230.004	22.821.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	482.850.000	NIHIL
Reklasifikasi Masuk	43.916.000	NIHIL
Perolehan Lainnya	1.232.126.000	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Transfer Keluar	1.174.230.004	22.821.000
Penghapusan	221.689.430	15.895.000
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	219.780.000	NIHIL
Reklasifikasi Keluar	43.916.000	NIHIL

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Koreksi Pencatatan	1.586.145.777	NIHIL

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	5.061 unit	41.148.595.754
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	2 unit	713.737.821

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Rp247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Akumulasi penyusutan pada akun Alat Rumah Tangga adalah sebesar Rp35.247.176.948 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

10) Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.571.375.143 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 228 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 207 unit dan nilai sebesar Rp6.439.116.819 (enam miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Alat Studio sebanyak 21 unit dengan nilai sebesar Rp1.132.523.324 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) serta mutasi kurang tidak mengurangi jumlah barang, namun mengurangi nilai sebesar Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	728.614.547	NIHIL
Perolehan Lainnya	393.719.777	NIHIL
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	9.924.000	NIHIL
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	265.000	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	265.000	NIHIL

Dari jumlah Alat Studio di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Studio di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	228 unit	7.571.375.143
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Studio adalah sebesar Rp5.342.401.655 (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

11)Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.427.011.581 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sebelas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 483 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 467 unit dan nilai sebesar Rp1.277.845.331 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Alat Komunikasi sebanyak 17 unit dengan nilai sebesar Rp162.458.228 (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) serta mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp13.291.978 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	149.166.250	NIHIL
Perolehan Lainnya	13.291.978	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Koreksi Pencatatan	13.291.978	NIHIL

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	483 unit	1.427.011.581
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Komunikasi adalah sebesar Rp1.272.401.290 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

12) Peralatan Pemancar (3.06.03)

Saldo Peralatan Pemancar pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp908.173.045 (sembilan ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 6 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 6 unit dan nilai sebesar Rp908.173.045 (sembilan ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan Pemancar adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Peralatan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Peralatan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Peralatan Pemancar di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Peralatan Pemancar di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	6 unit	908.173.045
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Peralatan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Peralatan Pemancar adalah sebesar Rp509.483.215 (lima ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah).

13) Alat Kedokteran (3.07.01)

Saldo Alat Kedokteran pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp724.254.246 (tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 67 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 62 unit dan nilai sebesar Rp713.420.071 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Alat Kedokteran sebanyak 7 unit dengan nilai sebesar Rp19.912.775 (sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) serta mutasi kurang sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp9.078.600 (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	13.998.175	NIHIL
Perolehan Lainnya	5.914.600	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Koreksi Catat	9.078.600	NIHIL

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	67 unit	724.254.246
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Kedokteran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat

Kedokteran adalah sebesar Rp699.388.556 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

14) Unit Alat Kesehatan Umum (3.07.02)

Saldo Alat Kesehatan Umum pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.494.500 (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 1 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 1 unit dan nilai sebesar Rp5.494.500 (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Alat Kesehatan Umum adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Kesehatan Umum di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Kesehatan Umum di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	5.494.500
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Kesehatan Umum yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun

Alat Kesehatan Umum adalah sebesar Rp3.846.150 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

15) Unit Alat Laboratorium (3.08.01)

Saldo Unit Alat Laboratorium pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp80.153.025 (delapan puluh juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 17 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 17 unit dan nilai sebesar Rp80.153.025 (delapan puluh juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Unit Alat Laboratorium adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	17 unit	80.153.025
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat

Laboratorium adalah sebesar Rp49.852.623 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

16) Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir (3.08.02)

Saldo Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp55.537.720 (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 1 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 1 unit dan nilai sebesar Rp55.537.720 (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat Laboratorium Kimia Nuklir tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Laboratorium Kimia Nuklir tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Laboratorium Kimia Nuklir di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Laboratorium Kimia Nuklir di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	Rp55.537.720
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Laboratorium Kimia Nuklir yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun

Alat Laboratorium Kimia Nuklir adalah sebesar Rp55.537.720 (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

17) Peralatan Laboratorium Hydrodinamica (3.08.07)

Saldo Peralatan Laboratorium Hydrodinamica pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.158.988.125 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 12 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 12 unit dan nilai sebesar Rp1.158.988.125 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan Laboratorium Hydrodinamica adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Peralatan Laboratorium Hydrodinamica tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Peralatan Laboratorium Hydrodinamica tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Peralatan Laboratorium Hydrodinamica di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Peralatan Laboratorium Hydrodinamica di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	10 unit	923.588.125
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	2 unit	235.400.000

Kelompok barang Peralatan Laboratorium Hydrodinamica yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Peralatan Laboratorium Hydrodinamica adalah sebesar Rp454.316.883 (empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

18)Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi (3.08.08)

Saldo Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.139.950 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 1 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 1 unit dan nilai sebesar Rp3.139.950 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	3.139.950
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi adalah sebesar Rp2.040.968 (dua juta empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

19) Alat Khusus Kepolisian (3.09.04)

Saldo Alat Khusus Kepolisian pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp54.599.391 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 sebanyak 7 unit dengan nilai sebesar Rp36.743.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Alat Khusus Kepolisian sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp17.856.391 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan mutasi kurang adalah nihil.

Mutasi Tambah Alat Khusus Kepolisian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	17.856.391	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Khusus Kepolisian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Khusus Kepolisian di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Khusus Kepolisian di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	12 unit	54.599.391
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Khusus Kepolisian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Khusus Kepolisian adalah sebesar Rp38.975.048 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah).

20)Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer Unit pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp23.545.381.971 (dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 1.236 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 1.079 unit dan nilai sebesar Rp19.683.737.914 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Komputer Unit sebanyak 157 unit dengan nilai sebesar Rp3.861.644.057 (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah), sedangkan mutasi kurang adalah nihil.

Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	3.846.244.057	NIHIL
Perolehan Lainnya	15.400.000	NIHIL

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Komputer Unit di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah nihil sedangkan jumlah Komputer Unit dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Jumlah Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1.236 unit	23.545.381.971
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Komputer Unit adalah sebesar Rp18.610.710.405 (delapan belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus lima rupiah).

21) Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp152.473.475.142 (seratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 1.197 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 1.096 unit dan nilai sebesar Rp121.341.055.481 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Peralatan Komputer sebanyak 139 unit dengan nilai sebesar Rp36.733.808.060 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu enam puluh rupiah) serta mutasi kurang sebanyak 38 unit dengan nilai sebesar Rp5.601.388.399 (lima miliar enam ratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)..

Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	33.744.714.680	NIHIL
Perolehan Lainnya	13.936.260	NIHIL

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	2.475.000.000	NIHIL
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	500.157.120	NIHIL

Mutasi Kurang Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Penghapusan	11.220.000	NIHIL
Koreksi Pencatatan	514.093.380	NIHIL
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	5.076.075.019	NIHIL

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah nihil sedangkan jumlah Peralatan Komputer dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1.174 unit	145.792.012.078
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	23 unit	6.681.463.064

Kelompok barang Peralatan Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Peralatan Komputer adalah Rp115.357.156.972 (seratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

22) Alat Eksplorasi Topografi (3.11.01)

Saldo Unit Alat Eksplorasi Topografi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.030.000 (delapan juta tiga puluh ribu rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 2 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 2 unit dan nilai sebesar Rp8.030.000 (delapan juta tiga puluh ribu

rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Unit Alat Eksplorasi Topografi adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Unit Alat Eksplorasi Topografi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Unit Alat Eksplorasi Topografi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Eksplorasi Topografi di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan jumlah Unit Alat Eksplorasi Topografi dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Unit Alat Eksplorasi Topografi di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	2 unit	8.030.000
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Unit Alat Eksplorasi Topografi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Unit Alat Eksplorasi Topografi adalah sebesar Rp8.030.000 (delapan juta tiga puluh ribu rupiah).

23)Alat Pelindung (3.15.02)

Saldo Alat Pelindung pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.084.000 (tiga belas juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 1 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 1 unit dan nilai sebesar Rp13.084.000 (tiga belas juta delapan puluh empat ribu rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan

mutasi kurang Alat Pelindung adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat Pelindung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Pelindung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Pelindung di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan jumlah Alat Pelindung dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Pelindung di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	13.084.000
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Pelindung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Pelindung adalah sebesar Rp13.084.000 (tiga belas juta delapan puluh empat ribu rupiah).

24)Alat SAR (3.15.03)

Saldo Alat SAR pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp105.874.260 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 5 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 5 unit dan nilai sebesar Rp105.874.260 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah). Selama Tahun

Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Alat SAR adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat SAR tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Alat SAR tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat SAR di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan jumlah Alat SAR dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat SAR di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	5 unit	105.874.260
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat SAR yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat SAR adalah sebesar Rp105.874.260 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).

25)Alat Kerja Penerbangan (3.15.04)

Saldo Alat Kerja Penerbangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp221.986.700 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 7 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 7 unit dan nilai sebesar Rp221.986.700 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Alat Kerja Penerbangan adalah

nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Kerja Penerbangan di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan jumlah Alat Kerja Penerbangan dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Kerja Penerbangan di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	7 unit	221.986.700
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Kerja Penerbangan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Kerja Penerbangan adalah sebesar Rp140.231.015 (seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima belas rupiah).

26)Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan (3.16.01)

Saldo Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 4 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 4 unit dan nilai sebesar Rp74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Alat

Peraga Pelatihan dan Percontohan adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Unit Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Unit Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan jumlah Unit Peralatan Proses/Produksi dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	4 unit	74.000.000
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan adalah sebesar Rp11.100.000 (sebelas juta seratus ribu rupiah).

27)Unit Peralatan Proses/Produksi (3.17.01)

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.124.859.082 (satu miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 58 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 51 unit dan nilai sebesar Rp888.104.232 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah). Selama

Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Unit Peralatan Proses/Produksi sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp271.940.550 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta mutasi kurang sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp35.185.700 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Mutasi Tambah Unit Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	268.214.850	NIHIL
Transfer Masuk	3.725.700	NIHIL

Mutasi Kurang Unit Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Transfer Keluar	3.725.700	NIHIL
Penghapusan	31.460.000	NIHIL

Dari jumlah Unit Peralatan Proses/Produksi di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan jumlah Unit Peralatan Proses/Produksi dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Unit Peralatan Proses/Produksi di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	58 unit	1.124.859.082
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Unit Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Unit Peralatan Proses/Produksi adalah sebesar Rp857.141.590 (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

28) Peralatan Olah Raga (3.19.01)

Saldo Peralatan Olah Raga pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp267.369.200 (dua ratus enam

puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 21 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan total jumlah barang sebanyak 21 unit dan nilai sebesar Rp267.369.200 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan Olah Raga adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan jumlah Peralatan Olah Raga dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	21 unit	267.369.200
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Peralatan Olah Raga adalah sebesar Rp267.369.200 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

29) Peralatan Komputer Keimigrasian (3.20.01)

Saldo Peralatan Komputer Keimigrasian pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.495.000 (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 1 unit.

Saldo Peralatan Komputer Keimigrasian per 1 Januari 2025 adalah nihil. Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Peralatan Komputer Keimigrasian sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp60.495.000, sedangkan mutasi kurang adalah nihil, sehingga saldo pada akhir periode menjadi 1 unit dengan nilai Rp60.495.000.

Mutasi Tambah Peralatan Komputer Keimigrasian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	60.495.000	NIHIL

Mutasi Kurang Peralatan Komputer Keimigrasian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Peralatan Komputer Keimigrasian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan jumlah Peralatan Komputer Keimigrasian dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Dari jumlah Peralatan Komputer Keimigrasian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	60.495.000
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Kelompok barang Peralatan Komputer Keimigrasian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Peralatan Komputer Keimigrasian adalah sebesar Rp6.049.500 (enam juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp235.660.048.464 (dua ratus tiga puluh lima miliar enam ratus enam puluh juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 6 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 6 unit dan nilai sebesar Rp235.461.247.464 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.801.000 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus satu ribu rupiah), sedangkan mutasi kurang adalah nihil, sehingga nilai Gedung dan Bangunan pada akhir periode mengalami peningkatan dibandingkan saldo awal.

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	198.801.000	NIHIL

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan adalah nihil. Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	5 Unit	207.587.724.464
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Ringan	1 Unit	28.072.324.000

Gedung dan Bangunan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sampai dengan

Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp40.638.031.104 (empat puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh satu ribu seratus empat rupiah).

e. Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp149.962.000 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 1 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 1 unit dan nilai sebesar Rp149.962.000 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan dan Jembatan adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan adalah nihil.

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 Unit	149.962.000
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan Jalan dan Jembatan adalah sebesar Rp149.962.000 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

f. Jaringan

Saldo Jaringan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp85.640.000 (delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 2 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 2 unit dan nilai sebesar Rp85.640.000 (delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Jaringan adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah barang pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan adalah nihil.

Dari jumlah Jaringan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	2 Unit	85.640.000
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan pada akun Jaringan adalah sebesar Rp24.264.661 (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

g. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.162.332.490 (satu miliar seratus

enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 3.252 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 dengan jumlah barang sebanyak 609 unit dan nilai sebesar Rp1.108.869.890 (satu miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebanyak 2.652 unit dengan nilai sebesar Rp241.723.202 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah) serta mutasi kurang sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp188.260.602 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	50.000.000	NIHIL
Saldo Awal	188.260.506	NIHIL
Koreksi Perubahan Nilai Bertambah	96	NIHIL
Perolehan Lainnya	3.462.600	NIHIL

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Koreksi Pencatatan	188.260.602	NIHIL

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas. yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan adalah nihil.

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	3.252 Unit	1.162.332.490
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Aset Tetap Lainnya yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah nihil. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp61.382.500 (enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

h. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada PPATK per 31 Desember 2025 adalah nihil. Pada awal Tahun Anggaran 2025, PPATK memiliki saldo awal KDP sebesar Rp1.669.142.180 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah). Selama tahun berjalan, terdapat mutasi tambah KDP sebesar Rp5.669.350.000 (lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total nilai KDP yang dikelola pada tahun 2025 berjumlah Rp7.338.492.180.

Mutasi kurang KDP selama tahun 2025 juga tercatat sebesar Rp7.338.492.180, sehingga saldo KDP aktif per 31 Desember 2025 menjadi nihil. Mutasi kurang tersebut terdiri dari:

1. KDP sebesar Rp5.669.350.000 yang telah selesai secara substansi dan didefinisikan di kantor pusat, berupa Peralatan dan Mesin penunjang gedung antara lain 6 (enam) unit lift, tangki air, CHWP (Chilled Water Pump), dan KDP lainnya; dan
2. KDP sebesar Rp1.669.142.180 pada Pusdiklat APUPPT berupa Studio Multimedia yang direklasifikasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi, sehubungan dengan KDP tersebut tidak mengalami mutasi transaksi dalam jangka waktu lebih dari dua tahun. Hal ini dilakukan sehubungan dengan tindak lanjut atas Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-132/KN/KN.2/2024 tanggal 20 Desember 2024, KDP dimaksud ditetapkan statusnya sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi sampai dilanjutkan kembali pengerjaannya.

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Perolehan/Penambahan KDP	3.217.128.000	NIHIL
Pengembangan KDP	2.452.222.000	NIHIL

Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Penghentian Sementara KDP	1.669.142.180	NIHIL

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.669.350.000	NIHIL

Saldo KDP yang direklasifikasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.669.142.180, yang merupakan saldo awal KDP berupa pekerjaan Studio Multimedia pada Satuan Kerja Pusdiklat APUPPT. Penetapan status penghentian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan, khususnya terkait KDP yang tidak mengalami perkembangan dalam jangka waktu lama.

i. Aset Tak Berwujud

i.1. *Software*

Saldo Software pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.981.301.413 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) dengan jumlah 185 unit.

Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp28.238.445.140 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) dengan jumlah 242 unit. Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Software sebanyak 103 unit dengan nilai sebesar Rp8.446.659.957 (delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) serta mutasi kurang sebanyak 160 unit dengan nilai sebesar Rp7.703.803.684 (tujuh miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Mutasi tambah Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	742.856.273	NIHIL
Perolehan Lainnya	455.100.000	NIHIL
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	7.248.703.684	NIHIL

Mutasi kurang Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	3.600.000	NIHIL
Koreksi Pencatatan	7.700.203.684	NIHIL

Akumulasi amortisasi pada akun Software adalah sebesar Rp28.256.240.064 (dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh empat rupiah).

i.2. Lisensi

Saldo Lisensi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp26.361.028.579 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan jumlah 25 unit.

Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp20.072.899.520 (dua puluh miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah 20 unit. Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah Lisensi sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp6.288.129.059 (enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah) serta mutasi kurang sebesar nihil.

Mutasi tambah Lisensi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pembelian	2.982.490.578	NIHIL
Perolehan Lainnya	3.305.638.481	NIHIL

Mutasi kurang Lisensi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Lisensi di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan adalah nihil. Jumlah lisensi yang sedang dalam proses penghapusan adalah sejumlah 13 unit dengan total nilai perolehan adalah Rp16.173.775.590.

Akumulasi amortisasi pada akun Lisensi adalah sebesar Rp5.724.891.192 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

i.3. Aset Tak Berwujud Lainnya

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp48.015.000 (empat puluh delapan juta lima belas ribu rupiah) dengan jumlah 1 unit.

Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp48.015.000 (empat puluh delapan juta lima belas ribu rupiah) dengan jumlah 1 unit. Selama Tahun Anggaran 2025, mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tak Berwujud Lainnya adalah nihil, sehingga nilai dan jumlah pada akhir periode tetap sama dengan saldo awal.

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi kurang Aset Tak Berwujud Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan adalah nihil.

j. BMN Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah 1 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp303.847.500 (tiga ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah 2 unit. Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi bertambah sebanyak 165 unit dengan nilai sebesar Rp2.867.855.550 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta

delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta mutasi berkurang sebanyak 166 unit dengan nilai sebesar Rp3.171.455.550 (tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Akumulasi penyusutan pada akun Aset Tetap yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah adalah sebesar Rp247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

k. BMN Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan per 31 Desember 2025 adalah Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (nol rupiah). Mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode Tahun Anggaran 2025 adalah nihil.

l. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa Aset Bersejarah pada PPAK per 31 Desember 2025 adalah sebesar nihil.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	NIHIL
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	NIHIL

Mutasi Kurang BMN Berupa aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	NIHIL
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	NIHIL

3. Barang Milik Negara Pada PPAK Per 31 Desember 2025

a. Nilai BMN Per akun Neraca

Nilai Barang Milik Negara (BMN) pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp803.575.041.923 (delapan ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). Nilai BMN tersebut merupakan gabungan BMN intrakomptabel dan BMN

ekstrakomptabel yang mencakup aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset tak berwujud.

Penyajian nilai BMN didasarkan pada klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca, yang meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah, serta Aset Tak Berwujud. Berdasarkan klasifikasi tersebut, BMN PPAK didominasi oleh Aset Tetap dengan nilai gabungan sebesar Rp748.184.696.931, disusul oleh Aset Tak Berwujud sebesar Rp55.390.344.992, dan Persediaan sebesar Rp2.001.951.797. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

POS PERKIRAAN NERACA INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL GABUNGAN

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	2.001.951.797	0,25	0	0,00	2.001.951.797	0,25
	Sub Jumlah (1)	2.001.951.797	0,25	0	0,00	2.001.951.797	0,25
II	Aset Tetap						
1	Tanah	235.898.373.342	29,24	0	0,00	235.898.373.342	29,22
2	Peralatan dan Mesin	274.611.037.042	34,04	630.546.530	99,96	275.241.583.572	34,10
3	Gedung dan Bangunan	235.660.048.464	29,22	0	0,00	235.660.048.464	29,19
4	Jalan dan Jembatan	149.962.000	0,02	0	0,00	149.962.000	0,02
5	Jaringan	85.640.000	0,01	0	0,00	85.640.000	0,01
6	Aset Tetap Lainnya	1.162.332.490	0,14	0	0,00	1.162.332.490	0,14
7	KDP	1.669.142.180	0,21	0	0,00	1.669.142.180	0,21
8	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0,00	247.500	0,04	247.500	0,00
	Sub Jumlah (2)	749.236.535.518	0,00	630.794.030	100,00	749.867.329.548	92,89
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Aset Tak Berwujud	55.390.344.992	6,87	0	0,00	55.390.344.992	6,86
3	Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sub Jumlah (3)	55.390.344.992	6,87	0	0,00	55.390.344.992	6,86
	Total	806.628.832.307	100,00	630.794.030	100,00	807.259.626.337	100,00

Nilai akumulasi penyusutan Barang Milik Negara (BMN) pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp287.012.853.037 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah). Nilai tersebut merupakan akumulasi penyusutan BMN intrakomptabel dan ekstrakomptabel secara gabungan, yang berasal dari aset tetap dan aset lainnya.

Akumulasi penyusutan BMN tersebut didominasi oleh aset tetap dengan nilai gabungan sebesar Rp253.031.721.781 atau 88,16% dari total akumulasi penyusutan BMN. Akumulasi penyusutan aset tetap tersebut terutama berasal dari Peralatan dan Mesin

serta Gedung dan Bangunan, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terbesar terhadap total akumulasi penyusutan BMN.

Sementara itu, akumulasi penyusutan aset lainnya tercatat sebesar Rp33.981.131.256 atau 11,84% dari total akumulasi penyusutan BMN, yang seluruhnya berasal dari Aset Tak Berwujud. Adapun akumulasi penyusutan BMN ekstrakomptabel tercatat sebesar Rp481.612.205, yang berasal dari Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah. Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada PPAK per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

RINCIAN NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN BMN

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap	0					
1	Peralatan dan Mesin	211.676.469.311	73,88	481.364.705	99,95	212.157.834.016	73,92
2	Gedung dan Bangunan	40.638.031.104	14,18	0	0,00	40.638.031.104	14,16
3	Jalan dan Jembatan	149.962.000	0,05	0	0,00	149.962.000	0,05
4	Jaringan	24.264.661	0,01	0	0,00	24.264.661	0,01
5	Aset Tetap Lainnya	61.382.500	0,02	0	0,00	61.382.500	0,02
6	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0,00	247.500	0,05	247.500	0,00
	Sub Jumlah (1)	252.550.109.576	88,14	481.612.205	100,00	253.031.721.781	88,16
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Aset Tak Berwujud	33.981.131.256	11,86	0	0,00	33.981.131.256	11,84
3	Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sub Jumlah (2)	33.981.131.256	11,86	0	0,00	33.981.131.256	11,84
	Total	286.531.240.832	100,00	481.612.205	100,00	287.012.853.037	100,00

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada pengguna barang PPAK per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut.

PERBANDINGAN NERACA LAPORAN BARANG & LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	Persediaan	2.001.951.797	2.001.951.797	0
2	Tanah	235.898.373.342	235.898.373.342	0
3	Peralatan dan Mesin	274.611.037.042	274.611.037.042	0
4	Gedung dan Bangunan	235.660.048.464	235.660.048.464	0
5	Jalan Irigasi dan Jaringan	235.602.000	235.602.000	0
6	Aset Tetap Lainnya	1.162.332.490	1.162.332.490	0
7	KDP	1.669.142.180	1.669.142.180	0
8	Aset Tak Berwujud	55.390.344.992	55.390.344.992	0
9	Aset Lain-Lain	0	0	0
	Total	806.628.832.307	806.628.832.307	0

V. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa :

- (1) *"Dalam kondisi tertentu. Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah."*
- (2) *"Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional."*

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya. Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap :

1. Tanah,
2. Gedung dan Bangunan, dan
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi :
 - a. Jalan dan Jembatan, dan
 - b. Bangunan air

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodifikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan, Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei

lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Untuk Satker/Eselon I/Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mulai dan selesai pada Tahun 2017. Hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak 1 Satker telah melakukan Penilaian Kembali BMN yang terdiri dari 7 NUP dengan total kenaikan nilai BMN sebesar Rp324.855.497.526 (tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang berasal dari nilai buku tercatat sebesar Rp145.627.502.474 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dan nilai wajar hasil penilaian sebesar Rp470.483.000.000 (empat ratus tujuh puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Pada Tahun Anggaran 2018, nilai wajar hasil Penilaian Kembali tersebut dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan menimbulkan penilaian ulang atas nilai wajar Tahun Anggaran 2017. Penilaian ulang tersebut selesai pada Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp384.116.912.000 (tiga ratus delapan puluh empat miliar seratus enam belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) atau mengalami penurunan sebanyak Rp86.366.088.000 (delapan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Rincian rekapitulasi hasil Penilaian Kembali BMN sebagaimana di bawah ini :

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Sebelum Revaluasi		Revaluasi 2017	Setelah Re- Revaluasi
				Nilai Perolehan	Nilai Buku	Nilai Wajar	Nilai Wajar
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	17/12/2007	61.279.315.524	49.210.486.920	124.314.254.000	124.314.254.000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	31/12/2011	17.029.021.133	14.985.538.600	20.549.248.000	28.072.324.000
4040104001	Pagar Permanen	1	11/12/2015	189.743.600	182.153.856	185.263.000	175.736.000
5010199999	Jalan Lainnya	1	05/12/2012	542.646.198	271.323.098	105.538.000	149.962.000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	31/12/2007	66.600.000.000	66.600.000.000	289.516.500.000	194.364.000.000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	26/05/2010	1.281.000.000	1.281.000.000	7.949.419.000	8.256.529.000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	07/07/2014	13.097.000.000	13.097.000.000	27.862.778.000	28.784.107.000

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomtabel dan ekstrakomtabel) selama 5 (lima) periode terakhir dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rp	Persen
1	2025	748.184.696.931	46.135.480.563	6,572%

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rp	Persen
2	2024	702.049.216.368	(4.120.012.349)	-0.583%
3	2023	706.169.228.717	46.784.649.196	7.095%
4	2022	659.384.579.521	6.258.033.629	0.958%
5	2021	653.126.545.892	8.234.672.938	1.277%
6	2020	644.891.872.954		

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada PPAK per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	235.898.373.342	-
2	Peralatan dan Mesin	253.450.081.242	4.292.527.221
3	Gedung dan Bangunan	235.461.247.464	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	235.602.000	-
5	Aset Tetap Lainnya	926.791.288	153.333.776
6	Aset Tak Berwujud	51.629.606.511	455.100.000
7	Aset Lain-Lain	11.412.400	-

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Peng- gunaan	Peman- faatan	Peminda- tanganan	Pengha- pusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-



No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Peminda-tanganan	Penghapusan	Jumlah
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	1 paket	-	1 paket	-	2 paket
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/KPB	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan keputusan dari Pengguna Barang	5 paket	-	-	1 paket	6 paket
7	Tindak lanjut oleh KPB	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	3 paket	1 paket	8 paket	8 paket	20 paket

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang terindikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

d. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada PPATK per 31 Desember 2025. adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	078010199453374000KP	-	-
2	078010200417654000KD	-	-

e. BMN Berupa Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada PPATK per 31 Desember 2025. adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	078010199453374000KP	-	-
2	078010200417654000KD	-	-

f. BMN Berupa Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Terdapat BMN yang masuk sebagai Barang BPYBDS pada PPATK per 31 Desember 2025. adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	078010199453374000KP	-	-
2	078010200417654000KD	-	-

- g. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan Barang Milik Negara

Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN pada PPAK per 31 Desember 2025. adalah sebagai berikut:

No	Bentuk Pengelolaan BMN	Nilai PNBP (Rp)	Keterangan
1	078010199453374000KP – Kantor Pusat PPAK		
A	Pemanfaatan BMN	16.595.000	Sewa Lahan Usaha oleh Kodagama, Persetujuan Nomor S-48/MK.6/KNL.0704/2025
B	Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin	4.472.000	1 (satu) paket berupa 31 unit filling cabinet, Risalah Lelang Nomor '191/08.03/2025-01
	Pemindahtanganan Bongkaran BMN	4.952.000	1 (satu) paket berupa bongkaran 6 unit tabung Fss N2, Risalah Lelang Nomor 57/07.04/2025-01
	Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin	65.919.000	1 (satu) paket berupa 46 unit meubelair dll dan Bongkaran BMN sisa renovasi Lantai 5, Risalah Lelang Nomor 84/07.04/2025-01
	Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin	65.023.628	1 (satu) paket berupa Lelang BMN >100jt berupa Elevator/Lift NUP 3 dan 8, Risalah Lelang Nomor 83/07.04/2025-01
	Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin	73.665.186	1 (satu) paket berupa Lelang BMN >100jt berupa Elevator/Lift NUP 2 dan 6, Risalah Lelang Nomor 138/07.04/2025-01
	Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin	47.104.000	1 (satu) paket berupa lelang BMN (Meubelair, Submersible Pump) 82 unit dan Bongkaran BMN 1B (besi, tembaga, aluminium, kloset, ACB ABB bekas) + Panel Chiller, Risalah Lelang Nomor 225/07.04/2025-01
	Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin	30.191.000	1 (satu) paket berupa Lelang Alat Kantor Lainnya (Trafo) NUP 6 >100jt, Risalah Lelang Nomor 226/07.04/2025-01
	Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin	96.165.186	1 (satu) paket berupa Lelang BMN >100jt berupa Elevator/Lift NUP 1

No	Bentuk Pengelolaan BMN	Nilai PNBP (Rp)	Keterangan
			dan 7, Risalah Lelang Nomor 233/07.04/2025-01
C	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	22.232.751	No Claim Bonus ABMN PPATK
	Total	426.319.751	
2	078010200417654000KD – Pusdiklat APUPPT		
A	Penghapusan karena sebab-sebab lain (Bongkaran)	Rp12.502.000	1 (satu) paket berupa bongkaran, Risalah Lelang Nomor 35/08.03/2025-01
	Total	3.784.000	

h. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Sehubungan dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan PPATK, masih terdapat sejumlah permasalahan strategis yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut secara berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Kompetensi penatausaha dan pengelola BMN belum merata, baik dari sisi teknis pencatatan maupun kemampuan analitis dan strategis dalam pengelolaan aset. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas yang mendukung peningkatan kompetensi tersebut juga belum optimal, yang tercermin dari keterbatasan jumlah kegiatan pembelajaran yang dapat diakses oleh para pengelola BMN. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan, pemanfaatan, dan pelaporan data BMN.
2. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung pengelolaan BMN belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, antara lain belum optimalnya penerapan teknologi identifikasi BMN yang mampu mendukung pelacakan aset secara *real time*. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses digitalisasi dan modernisasi pengelolaan BMN, serta menurunkan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan aset.
3. Masih terdapat kendala dalam proses sinkronisasi data pada aplikasi SIMAN, yang menyebabkan keterlambatan akses dan pemutakhiran data BMN. Kondisi tersebut menyulitkan pengguna dalam memperoleh informasi BMN yang akurat dan tepat waktu, serta berpotensi berdampak pada keterlambatan pelaporan dan menurunnya tingkat keandalan data BMN yang disajikan.
4. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan BMN belum menjangkau seluruh siklus pengelolaan BMN secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan. Keterbatasan cakupan pengawasan ini berpotensi menimbulkan celah pengendalian internal dalam pengelolaan BMN.

5. Belum optimalnya mekanisme monitoring dan pengawasan atas pencatatan BMN sejak tahap awal, khususnya pada saat penginputan data oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada keandalan data BMN dan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

i. Langkah-langkah Strategis Sebagai alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Keuangan serta Satuan Kerja Pusdiklat APUPPT, khususnya dalam pembahasan isu-isu strategis dan penyelesaian permasalahan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMN, termasuk penguatan kebijakan dan pemahaman teknis.
2. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam peningkatan kinerja aplikasi SIMAN, terutama pada aspek sinkronisasi data, keandalan sistem, dan ketersediaan informasi BMN yang akurat dan tepat waktu bagi pengguna.
3. Mendorong penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan BMN, guna menunjang pelaksanaan pengelolaan aset yang lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan teknologi.
4. Meningkatkan partisipasi pengelola BMN dalam pelatihan, bimbingan teknis, dan program pengembangan kompetensi, baik yang bersifat teknis operasional maupun analitis dan strategis, guna membangun pemahaman yang komprehensif dalam pengelolaan aset negara.
5. Memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan APIP dalam pendampingan pengelolaan BMN serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BMN secara berkelanjutan, guna memastikan penerapan tata kelola BMN yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PPAK DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT PADA PPAK TAHUN 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024, **terdapat** temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan. Aset tetap dan Aset tak Berwujud. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai berikut.

**REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN
KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2024**
Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Per 31 Desember 2025

No	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
1	Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp60.043.635,55 dan Kemahalan Harga Pekerjaan Screed Dak Beton sebesar Rp42.423.172,57 pada Pembangunan Studio Multimedia dan Perpustakaan Tahap I pada Pusdiklat APUPPT.	1. PPK menginisiasi rapat pembahasan temuan BPK melalui surat undangan nomor T/13/PL.01.03/3.6/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 yang diselenggarakan di Pusdiklat APUPPT tanggal 19 Juni 2025. Namun pada kesempatan tersebut, PT. Trikarya Angkola Sejahtera dan PT. Citra Adijaya Mandiri tidak hadir. 2. PPK Pusdiklat sudah menginfokan kepada PT. Trikarya Angkola Sejahtera terkait hasil temuan BPK sebesar Rp102.466.808,12 (Seratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Delapan Ratus Delapan Koma Satu Dua Rupiah) harus dikembalikan ke negara. 3. Pada Tanggal 29 Juni 2025, Kontraktor hadir dan ditemui oleh PPK, dan menyatakan bersedia melaksanakan tanggungjawab mengembalikan uang negara hasil temuan BPK. 4. Pada tanggal 7 Juli 2025, Komisaris PT. Trikarya Angkola Sejahtera menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan akan membayarkan pengembalian uang negara berdasarkan temuan BPK atas Pekerjaan Studio Multimedia dan Perpustakaan Tahap I, dan mencantumkan dalam surat pernyataan agar pembayaran dapan dilakukan dengan termin (cicil). 5. Tanggal 7 Juli 2025, Pusdiklat mengirimkan kode billing terkait kemampuan pembayaran pertama kontraktor sebesar Rp. 15.466.809. Adapun tagihan tersebut telah dibayarkan oleh kontraktor sebesar Rp15.466.809. Bendahara Pusdiklat mengeluarkan bukti penerimaan atas pembayaran tersebut. 6. Telah diterbitkan Surat Peringatan Pertama Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Terhadap Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Studio Multimedia dan Perpustakaan Pusdiklat APUPPT Tahap I Nomor T/026/PL.01.03/3.6/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.
2	Kesalahan penganggaran atas Belanja Barang pembelian Gordyin/Kray dengan masa berlaku lebih dari satu tahun.	Telah dilakukan pencatatan perolehan aset berupa 1 (satu) unit Gordyin/Kray Nomor Urut Pendaftaran (NUP) 6. Gordyin/Kray NUP 6 tersebut dicatat perolehan menggunakan menu transaksi perolehan lainnya pada pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam periode ke-14. Koreksi tersebut dilakukan karena Gordyin/Kray tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal (akun belanja 53) karena memenuhi Aset Tetap. Proses ini terdokumentasi pada Berita Acara Koreksi BA-KOREKSI-03/PL.02.02/3.1/IV/2025 tanggal 24 April 2025.
3	Terdapat monografi yang belum teridentifikasi dalam data perpustakaan dan terdapat koleksi perpustakaan yang berasal dari Hibah/Hadiah	• Data modul aset pada SAKTI menunjukkan bahwa saldo monografi sebesar Rp455.835.590,00 dan saldo buku lainnya sebesar Rp123.700,00. Masing-masing terdiri dari 400 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan kode BMN 6010101001 (monografi) dan 2 NUP dengan kode

No	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
	pihak lain namun belum dicatat sebagai aset tetap lainnya pada neraca.	BMN 6010101999 (buku lainnya). Berdasarkan hasil analisis data modul aset dengan data Perpustakaan, diketahui terdapat 12 NUP monografi sebesar Rp243.926.227,00 yang masih belum teridentifikasi. Berdasarkan keterangan dari pihak Biro Umum diketahui bahwa terhadap 12 NUP monografi yang belum ditemukan dikarenakan judul dan rincian buku belum teridentifikasi. Sebagian besar dari perolehan tahun lama dan masih terdapat pembelian dalam paket (lebih dari satu buku/eksemplar) namun dicatat dalam satu NUP. Sampai saat ini keberadaan dan identitas buku buku tersebut masih ditelusuri. Berdasarkan data perpustakaan yang telah disampaikan kepada BPK, sumber perolehan koleksi perpustakaan berasal dari terbitan sendiri, pembelian, hadiah/hibah, deposit, alih media, penggantian, dan penggandaan. Jumlah hadiah/hibah yang diterima oleh perpustakaan PPATK adalah sebanyak 1.085 eksemplar buku sesuai dengan nomor induknya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.017 eksemplar berbentuk fisik buku, 4 eks berbentuk fisik booklet, 17 eks berbentuk fisik majalah, dan sebanyak 47 eks tidak diklasifikasikan bentuk fisiknya (rincian pada lampiran 2). Berdasarkan hasil pengujian data dan penjelasan dari pihak Biro Umum diketahui bahwa buku yang diperoleh dari hadiah/hibah tidak dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya pada neraca dalam modul aset SAKTI. Hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan dalam administrasi pencatatan misalnya harus ada Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah dan nilai buku yang dihibahkan memiliki nilai buku/perolehan. Sedangkan untuk pihak pemberi belum tentu memiliki catatan atas nilai pembukuan/perolehan buku perpustakaan tersebut. Penjelasan lebih lanjut dari pengelola BMN menyebutkan bahwa pencatatan atas buku perpustakaan yang berasal dari pemberian/hibah pihak lain masih memungkinkan untuk ditaksir nilai/harganya, terutama untuk buku komersil (buku untuk diperjual-belikan). Pelaksanaan penilaian akan dikoordinasikan dengan KPKNL sesuai kewenangannya.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2024
Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Per 31 Desember 20252025

No	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
1	Aset tetap tanah belum memiliki sertifikat tanah atas nama Pemerintah RI dan/atau Kementerian/Lembaga.	- Aset tetap tanah diperoleh sesuai kontrak no PERJ-055/PL.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan BAST-055.10/PL.02/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 - Telah ditandatangani akta pelepasan hak nomor 12 tanggal 13 Oktober 2023 - Berdasarkan surat keterangan notaris Mira Dewi Miriam Nomor 02/CN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 bahwa proses perubahan hak pada Kantor BPN Kota Depok selambatnya selesai 3 bulan setelah terbitnya SK



No	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
		4. Berdasarkan surat keterangan notaris Mira Dewi Miriam Nomor 01/CN/XI/2024 tanggal 01 November 2024 proses yang telah dilakukan: - Telah terbit peta bidang tanah nomor 298/2024, tanggal 02 April 2024 - Telah dilakukan proses alih media terkait penggantian sistem sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik - Telah disepakati dengan Kantor BPN Kota Depok bahwa PPh terkait pelepasan hak nihil - Saat ini proses penghapusan hak tengah dilakukan dan dilanjutkan penerbitan SK Hak Pakai 5. Pendaftaran pengurusan sertifikat tanah secara online telah dilakukan sebagaimana bukti pendaftaran nomor 160074/2024 tanggal 18 Desember 2024 6. 16 Januari 2025 Pelaksanaan kunjungan lapangan menyelesaikan masalah aplikasi mitra BPN dihadiri oleh perwakilan pusdiklat, notaris dan BPN Depok 7. Sampai dengan Semester I, Pusdiklat APUPPT terus melakukan koordinasi baik dengan pihak notaris dan Kantor Pertanahan Kota Depok namun sertifikat tidak kunjung diterbitkan dengan berbagai kendala seperti: - Peralihan media dari sertifikat analog ke elektronik pada bulan Maret 2025, dan tanda tangan berkas oleh pejabat/panitia memakan waktu yang cukup lama b. Adanya pergantian pejabat kantor BPN Depok pada bulan Juli 2025 sehingga terdapat penggantian tanda tangan pejabat 8. Telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI cq PPATK Nomor 10.27.000035936.0

**a.n. Kepala PPATK.
Sekretaris Utama**



**Alberd T. B. Sianipar
NRP 71110417**



RESUME PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

1. Laporan Asuransi BMN Semester II Tahun 2025

Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Semester II Tahun 2025 telah dilaksanakan pada 2 (dua) satuan kerja dari total 2 (dua) satuan kerja yang berada di bawah UAPB PPATK. Perlindungan asuransi mencakup 5 (lima) objek barang milik negara yang terdiri dari bangunan kantor permanen, asrama permanen, dan gedung olahraga tertutup permanen. Total nilai pertanggungan atas seluruh objek yang diasuransikan sebesar Rp235.138.833.411 dengan total besaran premi yang dibayarkan sebesar Rp456.519.767 (rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel A).

Khusus untuk bangunan kantor permanen yang berlokasi di Ciloto, Cianjur, proses asuransi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup periode 1 Januari hingga 31 Maret 2025, sedangkan tahap kedua mencakup periode 1 Mei hingga 31 Desember 2025. Hal ini dilakukan mengingat ketersediaan anggaran, sehingga dilakukan prioritas dalam pelaksanaan pengasuransian.

2. Klaim Asuransi BMN Semester II Tahun 2025

- a. Terdapat 0 (nol) NUP BMN yang diajukan proses klaimnya pada semester I tahun 2024, dengan rincian:
 - i. 0 (nol) NUP BMN telah diselesaikan proses klaimnya, dengan nilai sebesar Rp0 dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, dan
 - ii. Terdapat 0 NUP BMN yang diajukan proses klaimnya sebelum tahun 2025 dan saat ini masih dalam proses penyelesaian klaim (rincian sebagaimana terlampir dalam table B).

3. Rencana Pengasuransian BMN pada 2026

Melalui Keputusan Rencana Pengasuransian BMN Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, kegiatan pengasuransian BMN pada tahun 2025 rencananya akan dilaksanakan



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline. 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

selama 12 Bulan, dengan nilai Pertanggungan BMN yang diasuransikan sebesar Rp235.138.833.411 dan total premi sebesar Rp461.107.252 (rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel C).



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

Tabel A - Laporan Asuransi BMN 2025

No	Kode Satuan Kerja				Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi							Risiko Diasuransikan	Jangka Waktu		Penanggung Risiko	Nilai Pertanggungan	Besaran Premi	Riwayat Klaim	Nomor Polis	Keterangan
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Eselon I	Kode Wilayah	Kode UAKPB				Jalan	RT/RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	Provinsi	Kode Pos		TMT Mulai	TMT Berakhir						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	078	01	0199	453374	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	JL. IR. H. Juanda No. 35	-	Kebon Kelapa	Gambir	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	10120	Rawan Kebakaran, Potensi Kerusakan Huru-Hara dan Gempa	01/01/2025	31/12/2025	PJ Jasa Asuransi Indonesia	137.633.506.117	269.899.305			
2	078	01	0200	417654	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Jalan Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok	004/003	Cimpaeun	Tapos	Depok	Jawa Barat	16459	Rawan kebakaran	01/01/2025	31/12/2025	PJ Jasa Asuransi Indonesia	37.847.057.776	74.218.080			
3	078	01	0200	417654	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	JL. Raya Puncak RT 01/RW 01, Pacet, Kab. Cianjur	001/001	Ciloto	Cipanas	Cianjur	Jawa Barat		Rawan Longsor dan gempa bumi	I. 01/01/2025 II. 01/05/2025	I. 31/03/2025 II. 31/12/2025	PJ Jasa Asuransi Indonesia	28.072.324.000	50.462.342			
4	078	01	0200	417654	4010205001	Asrama Permanen	1	Jalan Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok	004/003	Cimpaeun	Tapos	Depok	Jawa Barat	16459	Rawan kebakaran	01/01/2025	31/12/2025	PJ Jasa Asuransi Indonesia	27.982.974.484	54.874.613			
5	078	01	0200	417654	4010111001	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	1	Jalan Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok	004/003	Cimpaeun	Tapos	Depok	Jawa Barat	16459	Rawan kebakaran	01/01/2025	31/12/2025	PJ Jasa Asuransi Indonesia	3.602.971.017	7.065.426			
																			235.138.833.414	456.519.767			



Tabel B - Laporan Klaim Asuransi BMN 2025

No	Kode Satuan Kerja				Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi							Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Tanggal Pengajuan Klaim	Status (dalam proses / selesai)	Besaran Klaim yang disepakati	Dokumen Pembayaran		Keterangan
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Eselon I	Kode Wilayah	Kode UAKPB				Jalan	RT/RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	Provinsi	Kode Pos						Tanggal Penyetoran	Nomor Bukti Penyetoran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																						
2																						
3	N I L																					
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						



Tabel c - Laporan Rencana Pengasuransian BMN 2026

No	Kode Satuan Kerja				Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi							Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Penggunaan dan Fungs BMN	Jangka Waktu		Besaran Premi	Pertimbangan	Keterangan
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Eselon I	Kode Wilayah	Kode UAKPB				Jalan	RT/RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	Provinsi	Kode Pos				TMT Mulai	TMT Berakhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	078	01	0199	453374	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	JL. IR. H. Juanda No. 35	-	Kebon Kelapa	Gambir	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	10120	2007	137.633.506.117	Bangunan Gedung Kantor	01/01/2025	31/12/2025	269.899.305	Rawan Kebakaran, Potensi Kerusakan Huru-Hara dan Gempa	
2	078	01	0200	417654	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Jalan Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok	004/003	Cimpaeun	Tapos	Depok	Jawa Barat	16459	2016	37.847.057.776	Bangunan Gedung Kantor	01/01/2025	31/12/2025	74.218.080	Rawan kebakaran	
3	078	01	0200	417654	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	JL. Raya Puncak RT 01/RW 01, Pacet, Kab. Cianjur	001/001	Ciloto	Cipanas	Cianjur	Jawa Barat		2011	28.072.324.000	Bangunan Gedung Kantor	01/01/2025	31/12/2025	55.049.827	Rawan Longsor dan gempa bumi	
4	078	01	0200	417654	4010205001	Asrama Permanen	1	Jalan Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok	004/003	Cimpaeun	Tapos	Depok	Jawa Barat	16459	2016	27.982.974.484	Bangunan Gedung Kantor	01/01/2025	31/12/2025	54.874.613	Rawan kebakaran	
5	078	01	0200	417654	4010111001	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	1	Jalan Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok	004/003	Cimpaeun	Tapos	Depok	Jawa Barat	16459	2016	3.602.971.017	Tempat olahraga	01/01/2025	31/12/2025	7.065.426	Rawan kebakaran	
																235.138.833.394				461.107.252		



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT KL
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tanggal : 04/05/26 4:13 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_kl_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	714,112,421
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	35,191,564
117114	Suku Cadang	102,928,062
117131	Bahan Baku	3,049,200
117199	Persediaan Lainnya	67,929,227
131111	Tanah	235,898,373,342
132111	Peralatan dan Mesin	228,394,757,642
133111	Gedung dan Bangunan	235,461,247,464
134111	Jalan dan Jembatan	149,962,000
134113	Jaringan	85,640,000
135121	Aset Tetap Lainnya	1,108,869,890
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,669,142,180
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(189,354,123,325)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36,194,359,548)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(140,589,375)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(21,409,995)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(61,382,500)
162151	Software	28,238,445,140
162161	Lisensi	20,072,899,520
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	48,015,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	303,600,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(303,600,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(26,615,601,094)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(3,403,194,787)
J U M L A H		496,259,902,028



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl.Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 8:32 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	1,580,657,361
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13,259,707
117114	Suku Cadang	97,496,310
117131	Bahan Baku	3,049,200
117199	Persediaan Lainnya	307,489,219
131111	Tanah	235,898,373,342
132111	Peralatan dan Mesin	274,611,037,042
133111	Gedung dan Bangunan	235,646,558,027
134111	Jalan dan Jembatan	149,962,000
134113	Jaringan	85,640,000
135121	Aset Tetap Lainnya	1,162,332,490
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(211,676,469,311)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(40,637,866,587)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(149,962,000)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(24,264,661)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(61,382,500)
162151	Software	28,981,301,413
162161	Lisensi	26,361,028,579
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	48,015,000
166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	1,669,142,180
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(28,256,240,064)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(5,724,891,192)
J U M L A H		520,084,265,555



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak 07/05/26 7:45 AM

Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,090,909	0	9,090,909	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	17,217,662,149	12,228,109,622	4,989,552,527	40.80
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	24,776,500	136,500,000	(111,723,500)	(81.85)
Piutang Bukan Pajak	1,505,889,959	1,263,761,136	242,128,823	19.16
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,082,251,278)	(426,885,565)	(655,365,713)	153.52
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	423,638,681	836,875,571	(413,236,890)	(49.38)
Persediaan	2,001,951,797	923,210,474	1,078,741,323	116.85
JUMLAH ASET LANCAR	19,677,120,036	14,124,695,667	5,552,424,369	39.31
ASET TETAP				
Tanah	235,898,373,342	235,898,373,342	0	0.00
Peralatan dan Mesin	274,611,037,042	228,394,757,642	46,216,279,400	20.24
Gedung dan Bangunan	235,646,558,027	235,461,247,464	185,310,563	0.08
Jalan, Irigasi dan Jaringan	235,602,000	235,602,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,162,332,490	1,108,869,890	53,462,600	4.82
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	1,669,142,180	(1,669,142,180)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(252,549,945,059)	(225,771,864,743)	(26,778,080,316)	11.86
JUMLAH ASET TETAP	495,003,957,842	476,996,127,775	18,007,830,067	3.78
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	55,390,344,992	48,359,359,660	7,030,985,332	14.54
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	6,366,430,605	2,034,144,609	4,332,285,996	212.98
Aset Lain-lain	1,669,142,180	303,600,000	1,365,542,180	449.78
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(33,981,131,256)	(30,322,395,881)	(3,658,735,375)	12.07
JUMLAH ASET LAINNYA	29,444,786,521	20,374,708,388	9,070,078,133	44.52
JUMLAH ASET	544,125,864,399	511,495,531,830	32,630,332,569	6.38
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	12,007,979,738	9,820,546,228	2,187,433,510	22.27
Pendapatan Diterima Dimuka	39,650,917	66,724,173	(27,073,256)	(40.57)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12,047,630,655	9,887,270,401	2,160,360,254	21.85
JUMLAH KEWAJIBAN	12,047,630,655	9,887,270,401	2,160,360,254	21.85
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	532,078,233,744	501,608,261,429	30,469,972,315	6.07
JUMLAH EKUITAS	532,078,233,744	501,608,261,429	30,469,972,315	6.07
JUMLAH EKUITAS	532,078,233,744	501,608,261,429	30,469,972,315	6.07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	544,125,864,399	511,495,531,830	32,630,332,569	6.38



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak 07/05/26 7:45 AM

Halaman 2

lap_neraca_kl_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:45 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	9,090,909	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	17,217,662,149	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	24,776,500	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,492,399,522	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	13,490,437	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	1,035,433,000
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	46,818,278
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,580,657,361	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13,259,707	0
0.0	117114	Suku Cadang	97,496,310	0
0.0	117131	Bahan Baku	3,049,200	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	307,489,219	0
0.0	131111	Tanah	235,898,373,342	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	274,611,037,042	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	235,646,558,027	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	149,962,000	0
0.0	134113	Jaringan	85,640,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,162,332,490	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	211,676,469,311
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	40,637,866,587
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	149,962,000
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	24,264,661
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	61,382,500
0.0	162151	Software	28,981,301,413	0
0.0	162161	Lisensi	26,361,028,579	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	48,015,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	6,366,430,605	0
0.0	166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	1,669,142,180	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	28,256,240,064
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	5,724,891,192
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	5,718,588,883
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,311,717,831
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,968,582,115
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	9,090,909
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	39,650,917
0.0	313111	Titagihkan ke Entitas Lain	0	376,849,451,491
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,926,939,757	0
	313211	Transfer Keluar	23,482	0



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:45 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313221	Transfer Masuk	0	23,482,460
0.0	391111	Ekuitas	0	501,608,261,429
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	99,900
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	7,111,159,694	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	827,091,578	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	15,466,809	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	382,540,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	17,454,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	43,668,256
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	98,600,000
3.0	425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	22,232,751
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	405,840,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	89,899,997
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	987,900,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	281,200
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	21,110,195
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	15,466,809
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	5,163,159,931
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	20,926,363,580	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	275,641	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,183,028,426	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	335,265,606	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,056,880,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,523,064,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	499,792,284	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	998,164,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,061,835,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	272,085,000	0
3.0	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	1,214,949,600	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	289,134,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4,315,901,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	63,060	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	286,936,630	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	65,635,068	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	625,488,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	242,824,260	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	759,691,000	0
	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	12,465	0



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:45 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	1,409,756,470	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	218,410,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	82,127,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	142,488,478,651	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	18,415,324,275	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,291,950,254	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	267,857,080	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	27,480,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,762,632,521	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,687,481,652	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	584,700,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,257,147,821	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	53,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	5,204,524,409	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	159,842,625	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	186,556,656	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,471,639,047	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	4,671,352,613	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,164,247,927	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,676,150,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	16,315,372,226	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,174,949,113	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	450,264,105	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,906,980,253	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	5,013,210,377	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11,079,625,304	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	616,489,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,762,739,300	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,313,625,787	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	179,412,634	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	5,882,476,191	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	24,765,770,786	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,443,507,039	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	9,372,625	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,854,666	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	986,612,597	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	2,321,696,405	0
	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,585,960	0



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:45 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	23,529,797	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	53,180,517	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	282,270,687	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	99,900	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	637,825,500	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	17,540,213	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	2,730,320	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	54,113,920	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	114,361,800	0
JUMLAH			1,185,390,406,667	1,185,390,406,667

Keterangan :

FINAL



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tanggal : 04/05/26 5:20 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_kl_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	18,825,343
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	99,000
1010301003	Penjepit Kertas	18,309,031
1010301004	Penghapus/Korektor	630,120
1010301005	Buku Tulis	2,906,056
1010301006	Ordner Dan Map	17,422,452
1010301007	Penggaris	186,846
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	4,295,880
1010301010	Alat Perekat	13,572,659
1010301012	Staples	2,087,412
1010301014	Barang Cetak	146,478,820
1010301015	Seminar Kit	499,232,380
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	103,455,009
1010302001	Kertas HVS	9,699,075
1010302002	Berbagai Kertas	57,919,461
1010302004	Amplop	6,482,763
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	969,100
1010303002	Tinta Cetak	199,040
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	98,962,919
1010304003	Pita Printer	1,098,900
1010304004	Tinta/Toner Printer	476,193,075
1010304006	USB/Flash Disk	880,000
1010304010	Mouse	3,940,600
1010306001	Kabel Listrik	11,008,470
1010306002	Lampu Listrik	10,848,497
1010306003	Stop Kontak	3,044,430
1010306004	Saklar	3,979,000
1010306005	Stacker	3,098,950
1010306010	Batu Baterai	37,449,220
1010306999	Alat Listrik Lainnya	19,833,700
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	255,300
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	2,828,900
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,464,953
Jumlah Barang Konsumsi		1,580,657,361
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	958,800
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	6,571,320
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	367,887
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	1,493,032
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	3,447,078
1010305012	Pengharum Ruangan	376,590
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	45,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		13,259,707
117114	Suku Cadang	



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tanggal : 04/05/26 5:20 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_persediaan_kl_poc

Kode	Uraian	Jumlah
1010203001	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum	1,173,270
1010203002	Suku Cadang Alat Kedokteran Gigi	73,062,570
1010299999	Suku Cadang Lainnya	23,260,470
Jumlah Suku Cadang		97,496,310
117131	Bahan Baku	
1010102999	Bahan Kimia Lainnya	2,983,200
1010104002	Minyak Pelumas (Bahan Baku)	66,000
Jumlah Bahan Baku		3,049,200
117199	Persediaan Lainnya	
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	44,299,646
1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	161,643,064
1010401004	Obat Serbuk/Tepung (Persediaan Lainnya)	5,812,597
1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)	16,750,115
1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	75,119,497
1020103999	Komponen Peralatan Lainnya	3,864,300
Jumlah Persediaan Lainnya		307,489,219
TOTAL		2,001,951,797

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



UAPB : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
UAPPB-E1 : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
UAPPB-W :

LAPORAN MUTASI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KODE UAKPB : 078.01.0199.453374.000.KP

KODE	U R A I A N	N I L A I S/D 01-JAN-2025	MUTASI		N I L A I S/D 31-DEC-2025
			TAMBAH	KURANG	
117111	Barang Konsumsi	336,865,997	1,434,586,954	986,625,681	784,827,270
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	15,638,742	0	14,145,710	1,493,032
117114	Suku Cadang	77,970,402	47,748,765	51,483,327	74,235,840
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0	0
117131	Bahan Baku	3,049,200	0	0	3,049,200
117199	Persediaan Lainnya	52,818,976	493,056,441	251,706,552	294,168,865
Jumlah		486,343,317	1,975,392,160	1,303,961,270	1,157,774,207



UAPB : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
UAPPB-E1 : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
UAPPB-W :

LAPORAN MUTASI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
KODE UAKPB : 078.01.0200.417654.000.KD

KODE	U R A I A N	N I L A I S/D 01-JAN-2025	MUTASI		N I L A I S/D 31-DEC-2025
			TAMBAH	KURANG	
117111	Barang Konsumsi	377,246,424	1,067,379,945	648,796,278	795,830,091
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	19,552,822	1,597,940	9,384,087	11,766,675
117114	Suku Cadang	24,957,660	0	1,697,190	23,260,470
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	15,110,251	37,851,658	39,641,555	13,320,354
Jumlah		436,867,157	1,106,829,543	699,519,110	844,177,590



LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 8:31 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	20,678	235,898,373,342	0	0	0	0	20,678	235,898,373,342
20101	TANAH PERSIL	20,678	235,898,373,342	0	0	0	0	20,678	235,898,373,342
132111	Peralatan dan Mesin	9,718	229,041,276,172	664	57,928,839,498	304	11,728,532,098	10,078	275,241,583,572
30103	ALAT BANTU	49	12,309,816,886	11	5,706,087,200	6	2,460,941,820	54	15,554,962,266
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	44	13,319,225,804	4	115,800,000	0	0	48	13,435,025,804
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	63	143,549,527	1	1,518,525	0	0	64	145,068,052
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	9	24,553,100	1	3,135,000	1	3,135,000	9	24,553,100
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	33	119,889,120	0	0	0	0	33	119,889,120
30303	ALAT UKUR	7	17,697,200	0	0	0	0	7	17,697,200
30401	ALAT PENGOLAHAN	24	68,475,000	0	0	0	0	24	68,475,000
30501	ALAT KANTOR	1,416	11,498,350,687	103	2,952,715,077	102	320,768,390	1,417	14,130,297,374
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,026	38,257,865,475	186	6,888,945,311	150	3,284,477,211	5,062	41,862,333,575
30601	ALAT STUDIO	207	6,439,116,819	21	1,132,523,324	0	265,000	228	7,571,375,143
30602	ALAT KOMUNIKASI	467	1,277,845,331	17	162,458,228	1	13,291,978	483	1,427,011,581
30603	PERALATAN PEMANCAR	6	908,173,045	0	0	0	0	6	908,173,045
30701	ALAT KEDOKTERAN	62	713,420,071	7	19,912,775	2	9,078,600	67	724,254,246
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	5,494,500	0	0	0	0	1	5,494,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	17	80,153,025	0	0	0	0	17	80,153,025
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	55,537,720	0	0	0	0	1	55,537,720
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	12	1,158,988,125	0	0	0	0	12	1,158,988,125
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	3,139,950	0	0	0	0	1	3,139,950
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	7	36,743,000	5	17,856,391	0	0	12	54,599,391
31001	KOMPUTER UNIT	1,079	19,683,737,914	157	3,861,644,057	0	0	1,236	23,545,381,971
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,096	121,341,055,481	139	36,733,808,060	38	5,601,388,399	1,197	152,473,475,142
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	8,030,000	0	0	0	0	2	8,030,000
31502	ALAT PELINDUNG	1	13,084,000	0	0	0	0	1	13,084,000
31503	ALAT SAR	5	105,874,260	0	0	0	0	5	105,874,260
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	7	221,986,700	0	0	0	0	7	221,986,700
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4	74,000,000	0	0	0	0	4	74,000,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	51	888,104,232	11	271,940,550	4	35,185,700	58	1,124,859,082
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	21	267,369,200	0	0	0	0	21	267,369,200
32001	PERALATAN KOMPUTER KEIMIGRASIAN	0	0	1	60,495,000	0	0	1	60,495,000
133111	Gedung dan Bangunan	6	235,461,247,464	0	198,801,000	0	13,490,437	6	235,646,558,027
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	207,155,858,910	0	198,801,000	0	13,490,437	4	207,155,858,910
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	27,302,974,484	0	0	0	0	2	27,302,974,484

<



LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 8:31 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	322,414,070	0	0	0	0	1	322,414,070
134111	Jalan dan Jembatan	1	149,962,000	0	0	0	0	1	149,962,000
50101	JALAN	1	149,962,000	0	0	0	0	1	149,962,000
134113	Jaringan	2	85,640,000	0	0	0	0	2	85,640,000
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	85,640,000	0	0	0	0	2	85,640,000
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	609	1,108,869,890	2,652	241,723,202	9	188,260,602	3,252	1,162,332,490
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	484	496,458,890	2,652	241,723,202	9	188,260,602	3,127	549,921,490
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	115	551,028,500	0	0	0	0	115	551,028,500
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	61,382,500	0	0	0	0	10	61,382,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2	303,847,500	165	2,867,855,550	166	3,171,455,550	1	247,500
30103	ALAT BANTU	0	0	6	2,460,941,820	6	2,460,941,820	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	1	303,600,000	72	126,649,300	73	430,249,300	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	247,500	83	237,584,430	83	237,584,430	1	247,500
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	2	11,220,000	2	11,220,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	2	31,460,000	2	31,460,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			702,049,216,368		61,237,219,250		15,101,738,687		748,184,696,931



LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 8:31 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

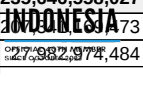
AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	20,678	235,898,373,342	0	0	0	0	20,678	235,898,373,342
20101	TANAH PERSIL	20,678	235,898,373,342	0	0	0	0	20,678	235,898,373,342
132111	Peralatan dan Mesin	8,629	228,394,757,642	637	57,906,018,498	258	11,689,739,098	9,008	274,611,037,042
30103	ALAT BANTU	49	12,309,816,886	11	5,706,087,200	6	2,460,941,820	54	15,554,962,266
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	44	13,319,225,804	4	115,800,000	0	0	48	13,435,025,804
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	63	143,549,527	1	1,518,525	0	0	64	145,068,052
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	9	24,553,100	1	3,135,000	1	3,135,000	9	24,553,100
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	31	119,559,120	0	0	0	0	31	119,559,120
30303	ALAT UKUR	7	17,697,200	0	0	0	0	7	17,697,200
30401	ALAT PENGOLAHAN	24	68,475,000	0	0	0	0	24	68,475,000
30501	ALAT KANTOR	1,382	11,486,342,237	103	2,952,715,077	100	320,691,390	1,385	14,118,365,924
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,210	37,712,530,125	159	6,866,124,311	106	3,245,761,211	4,263	41,332,893,225
30601	ALAT STUDIO	197	6,437,048,819	21	1,132,523,324	0	265,000	218	7,569,307,143
30602	ALAT KOMUNIKASI	273	1,203,375,101	17	162,458,228	1	13,291,978	289	1,352,541,351
30603	PERALATAN PEMANCAR	6	908,173,045	0	0	0	0	6	908,173,045
30701	ALAT KEDOKTERAN	57	710,593,071	7	19,912,775	2	9,078,600	62	721,427,246
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	5,494,500	0	0	0	0	1	5,494,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	16	79,303,025	0	0	0	0	16	79,303,025
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	55,537,720	0	0	0	0	1	55,537,720
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	12	1,158,988,125	0	0	0	0	12	1,158,988,125
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	3,139,950	0	0	0	0	1	3,139,950
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	7	36,743,000	5	17,856,391	0	0	12	54,599,391
31001	KOMPUTER UNIT	1,079	19,683,737,914	157	3,861,644,057	0	0	1,236	23,545,381,971
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,069	121,332,425,981	139	36,733,808,060	38	5,601,388,399	1,170	152,464,845,642
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	8,030,000	0	0	0	0	2	8,030,000
31502	ALAT PELINDUNG	1	13,084,000	0	0	0	0	1	13,084,000
31503	ALAT SAR	5	105,874,260	0	0	0	0	5	105,874,260
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	7	221,986,700	0	0	0	0	7	221,986,700
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4	74,000,000	0	0	0	0	4	74,000,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	51	888,104,232	11	271,940,550	4	35,185,700	58	1,124,859,082
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	21	267,369,200	0	0	0	0	21	267,369,200
32001	PERALATAN KOMPUTER KEIMIGRASIAN	0	0	1	60,495,000	0	0	1	60,495,000
133111	Gedung dan Bangunan	6	235,461,247,464	0	198,801,000	0	13,490,437	6	235,646,558,027
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	207,155,858,910	0	198,801,000	0	13,490,437	4	207,155,858,910
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	27,305,388,554	0	0	0	0	2	27,305,388,554

Dokumen ini merupakan bagian dari penyelenggaraan sertifikasi Elektronik dari Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BerAKHLAK

FATF

INDONESIA



LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 8:31 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	322,414,070	0	0	0	0	1	322,414,070
134111	Jalan dan Jembatan	1	149,962,000	0	0	0	0	1	149,962,000
50101	JALAN	1	149,962,000	0	0	0	0	1	149,962,000
134113	Jaringan	2	85,640,000	0	0	0	0	2	85,640,000
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	85,640,000	0	0	0	0	2	85,640,000
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	609	1,108,869,890	2,652	241,723,202	9	188,260,602	3,252	1,162,332,490
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	484	496,458,890	2,652	241,723,202	9	188,260,602	3,127	549,921,490
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	115	551,028,500	0	0	0	0	115	551,028,500
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	61,382,500	0	0	0	0	10	61,382,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	1	303,600,000	146	2,851,883,550	147	3,155,483,550	0	0
30103	ALAT BANTU	0	0	6	2,460,941,820	6	2,460,941,820	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	1	303,600,000	70	126,572,300	71	430,172,300	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	66	221,689,430	66	221,689,430	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	2	11,220,000	2	11,220,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	2	31,460,000	2	31,460,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			701,402,450,338		61,198,426,250		15,046,973,687		747,553,902,901



LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tanggal : 04/05/26 4:10 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl_poc

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	1,089	646,518,530	27	22,821,000	46	38,793,000	1,070	630,546,530
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	330,000	0	0	0	0	2	330,000
30501	ALAT KANTOR	34	12,008,450	0	0	2	77,000	32	11,931,450
30502	ALAT RUMAH TANGGA	816	545,335,350	27	22,821,000	44	38,716,000	799	529,440,350
30601	ALAT STUDIO	10	2,068,000	0	0	0	0	10	2,068,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	194	74,470,230	0	0	0	0	194	74,470,230
30701	ALAT KEDOKTERAN	5	2,827,000	0	0	0	0	5	2,827,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	850,000	0	0	0	0	1	850,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	27	8,629,500	0	0	0	0	27	8,629,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1	247,500	19	15,972,000	19	15,972,000	1	247,500
30501	ALAT KANTOR	0	0	2	77,000	2	77,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	247,500	17	15,895,000	17	15,895,000	1	247,500
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			646,766,030		38,793,000		54,765,000		630,794,030



LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 8:31 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_kl_poc

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	242	28,238,445,140	103	8,446,659,957	160	7,703,803,684	185	28,981,301,413
80101	ASET TAK BERWUJUD	242	28,238,445,140	103	8,446,659,957	160	7,703,803,684	185	28,981,301,413
162161	Lisensi	20	20,072,899,520	5	6,288,129,059	0	0	25	26,361,028,579
80101	ASET TAK BERWUJUD	20	20,072,899,520	5	6,288,129,059	0	0	25	26,361,028,579
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	48,015,000	0	0	0	0	1	48,015,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	48,015,000	0	0	0	0	1	48,015,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			48,359,359,660		14,734,789,016		7,703,803,684		55,390,344,992



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tanggal : 04/05/26 4:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_kl_poc

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,669,142,180	5,669,350,000	7,338,492,180	0	
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	5,669,350,000	5,669,350,000	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1,669,142,180	0	1,669,142,180	0	
166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	0	1,669,142,180	0	1,669,142,180	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	1,669,142,180	0	1,669,142,180	
TOTAL		1,669,142,180	7,338,492,180	7,338,492,180	1,669,142,180	



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tanggal : 04/05/26 4:10 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_kl_poc

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
			BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	4	5	6	7



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAKPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 8:31 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	Tanah	20,678	235,898,373,342	0	0	0	235,898,373,342
20101	TANAH PERSIL	20,678	235,898,373,342	0	0	0	235,898,373,342
132111	Peralatan dan Mesin	9,008	274,611,037,042	(189,354,123,325)	(22,322,345,986)	(211,676,469,311)	62,934,567,731
30103	ALAT BANTU	54	15,554,962,266	(11,874,113,963)	1,843,008,825	(10,031,105,138)	5,523,857,128
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	48	13,435,025,804	(10,608,583,394)	(996,420,407)	(11,605,003,801)	1,830,022,003
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	64	145,068,052	(138,306,103)	(6,002,686)	(144,308,789)	759,263
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	9	24,553,100	(16,392,315)	(1,304,710)	(17,697,025)	6,856,075
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	31	119,559,120	(113,602,778)	(1,830,842)	(115,433,620)	4,125,500
30303	ALAT UKUR	7	17,697,200	(16,519,520)	(392,560)	(16,912,080)	785,120
30401	ALAT PENGOLAHAN	24	68,475,000	(43,291,886)	(16,788,750)	(60,080,636)	8,394,364
30501	ALAT KANTOR	1,385	14,118,365,924	(10,306,238,095)	(799,642,684)	(11,105,880,779)	3,012,485,145
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,263	41,332,893,225	(32,863,757,200)	(2,000,090,798)	(34,863,847,998)	6,469,045,227
30601	ALAT STUDIO	218	7,569,307,143	(4,446,023,777)	(894,309,878)	(5,340,333,655)	2,228,973,488
30602	ALAT KOMUNIKASI	289	1,352,541,351	(1,161,635,771)	(36,295,289)	(1,197,931,060)	154,610,291
30603	PERALATAN PEMANCAR	6	908,173,045	(418,665,912)	(90,817,303)	(509,483,215)	398,689,830
30701	ALAT KEDOKTERAN	62	721,427,246	(670,781,981)	(25,779,575)	(696,561,556)	24,865,690
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	5,494,500	(2,747,250)	(1,098,900)	(3,846,150)	1,648,350
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	16	79,303,025	(40,161,995)	(8,893,753)	(49,055,748)	30,247,277
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	55,537,720	(55,537,720)	0	(55,537,720)	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	12	1,158,988,125	(377,051,005)	(77,265,878)	(454,316,883)	704,671,242
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	3,139,950	(1,726,973)	(313,995)	(2,040,968)	1,098,982
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	12	54,599,391	(36,743,000)	(2,232,048)	(38,975,048)	15,624,343
31001	KOMPUTER UNIT	1,236	23,545,381,971	(16,534,493,255)	(2,076,217,150)	(18,610,710,405)	4,934,671,566
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,170	152,464,845,642	(98,279,219,227)	(17,069,308,245)	(115,348,527,472)	37,116,318,170
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	8,030,000	(8,030,000)	0	(8,030,000)	0
31502	ALAT PELINDUNG	1	13,084,000	(13,084,000)	0	(13,084,000)	0
31503	ALAT SAR	5	105,874,260	(105,874,260)	0	(105,874,260)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	7	221,986,700	(118,032,345)	(22,198,670)	(140,231,015)	81,755,685
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4	74,000,000	(3,700,000)	(7,400,000)	(11,100,000)	62,900,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	58	1,124,859,082	(845,760,400)	(11,381,190)	(857,141,590)	267,717,492
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	21	267,369,200	(254,049,200)	(13,320,000)	(267,369,200)	0
32001	PERALATAN KOMPUTER KEIMIGRASIAN	1	60,495,000	0	(6,049,500)	(6,049,500)	54,445,500
133111	Gedung dan Bangunan	6	235,646,558,027	(36,194,359,548)	(4,443,507,039)	(40,637,866,587)	195,008,691,440
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	207,341,169,473	(31,566,200,438)	(3,944,039,917)	(35,510,240,355)	171,880,299,118
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGA	1	27,982,974,484	(4,580,328,664)	(492,687,280)	(5,073,016,008)	22,000,358,540



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAKPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 8:31 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	322,414,070	(47,830,446)	(6,779,842)	(54,610,288)	267,803,782
134111	Jalan dan Jembatan	1	149,962,000	(140,589,375)	(9,372,625)	(149,962,000)	0
50101	JALAN	1	149,962,000	(140,589,375)	(9,372,625)	(149,962,000)	0
134113	Jaringan	2	85,640,000	(21,409,995)	(2,854,666)	(24,264,661)	61,375,339
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	85,640,000	(21,409,995)	(2,854,666)	(24,264,661)	61,375,339
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	3,252	1,162,332,490	(61,382,500)	0	(61,382,500)	1,100,949,990
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	3,127	549,921,490	0	0	0	549,921,490
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	115	551,028,500	0	0	0	551,028,500
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	61,382,500	(61,382,500)	0	(61,382,500)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	(303,600,000)	303,600,000	0	0
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	(303,600,000)	303,600,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		32,947	747,553,902,901	(226,075,464,743)	(26,474,480,316)	(252,549,945,059)	495,003,957,842



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAKPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tanggal : 04/05/26 4:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	Peralatan dan Mesin	1,070	630,546,530	(427,657,755)	(53,706,950)	(481,364,705)	149,181,825
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	330,000	(330,000)	0	(330,000)	0
30501	ALAT KANTOR	32	11,931,450	(7,841,350)	(1,072,800)	(8,914,150)	3,017,300
30502	ALAT RUMAH TANGGA	799	529,440,350	(330,801,050)	(52,527,900)	(383,328,950)	146,111,400
30601	ALAT STUDIO	10	2,068,000	(2,068,000)	0	(2,068,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	194	74,470,230	(74,470,230)	0	(74,470,230)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	5	2,827,000	(2,827,000)	0	(2,827,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	850,000	(690,625)	(106,250)	(796,875)	53,125
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	27	8,629,500	(8,629,500)	0	(8,629,500)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1	247,500	(247,500)	0	(247,500)	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	247,500	(247,500)	0	(247,500)	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1,071	630,794,030	(427,905,255)	(53,706,950)	(481,612,205)	149,181,825



LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 8:31 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_kl_poc

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI AMORTISASI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
162151	Software	185	28,981,301,413	(26,615,601,094)	(1,640,638,970)	(28,256,240,064)	725,061,349
80101	ASET TAK BERWUJUD	185	28,981,301,413	(26,615,601,094)	(1,640,638,970)	(28,256,240,064)	725,061,349
162161	Lisensi	25	26,361,028,579	(3,403,194,787)	(2,321,696,405)	(5,724,891,192)	20,636,137,387
80101	ASET TAK BERWUJUD	25	26,361,028,579	(3,403,194,787)	(2,321,696,405)	(5,724,891,192)	20,636,137,387
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	48,015,000	0	0	0	48,015,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	48,015,000	0	0	0	48,015,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		211	55,390,344,992	(30,018,795,881)	(3,962,335,375)	(33,981,131,256)	21,409,213,736



**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

NM KL : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KD ES1 : 078

TANGGAL : 04-05-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_kl_poc
HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
				TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data										
JUMLAH										



**DAFTAR BARANG HIBAH DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**

NM KL : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KD KL : 078

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (neraca) (Rp)	Gabungan (Rp)
NIHIL				
Total				



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NM KL PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KD KL 078

TANGGAL : 04-05-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbh_kl_poc
HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											



**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

NM KL : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KD KL : 078

TANGGAL : 04-05-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	422	P.C Unit	RUSAK BERAT	16-05-	Dell Optiplex 3020MT	-	16-05-2014	11,412,400	Dell Optiplex 3020MT	RB-Henti Guna
JUMLAH									11,412,400	11,412,400	



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
BMN DALAM PROSES PMPP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tanggal : 04/05/26 5:19 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_pmpp_kl

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
BMN DALAM PROSES PMPP
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tanggal : 04/05/26 5:20 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_pmpp_kl

UAKPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
131111 Tanah

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13
Halaman : 1 dari 15
Kode Lap : lap_crbm_n_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	TANAH		20,678	235,898,373,342	20,678	235,898,373,342	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	20,678	235,898,373,342	20,678	235,898,373,342	0	0
TOTAL				235,898,373,342		235,898,373,342		0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13

Halaman : 2 dari 15

132111 Peralatan dan Mesin

Kode Lap : lap_crbm_n_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	ALAT BESAR		54	15,554,962,266	54	15,554,962,266	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	49	12,309,816,886	49	12,309,816,886	0	0
101	Pembelian	-	5	223,661,200	5	223,661,200	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	6	5,186,500,000	6	5,186,500,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	76,146,000	0	76,146,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	219,780,000	0	219,780,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	(6)	(2,460,941,820)	(6)	(2,460,941,820)	0	0
302	ALAT ANGKUTAN		112	13,580,093,856	112	13,580,093,856	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	107	13,462,775,331	107	13,462,775,331	0	0
101	Pembelian	-	5	117,318,525	5	117,318,525	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		49	162,139,420	47	161,809,420	2	330,000
000	Saldo Awal TAYL	-	49	162,139,420	47	161,809,420	2	330,000
102	Transfer Masuk	-	1	3,135,000	1	3,135,000	0	0
302	Transfer Keluar	-	(1)	(3,135,000)	(1)	(3,135,000)	0	0
304	ALAT PERTANIAN		24	68,475,000	24	68,475,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	24	68,475,000	24	68,475,000	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		6,479	55,992,630,949	5,648	55,451,259,149	831	541,371,800
000	Saldo Awal TAYL	-	6,442	49,756,216,162	5,592	49,198,872,362	850	557,343,800
101	Pembelian	-	166	6,691,598,294	166	6,691,598,294	0	0
102	Transfer Masuk	-	89	1,381,102,464	62	1,358,281,464	27	22,821,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	2	482,850,000	2	482,850,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	4	43,916,000	4	43,916,000		



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13

Halaman : 3 dari 15

132111 Peralatan dan Mesin

Kode Lap : lap_crbmn_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	Perolehan Lainnya	-	28	1,242,193,630	28	1,242,193,630	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(219,780,000)	0	(219,780,000)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(89)	(1,381,102,464)	(62)	(1,358,281,464)	(27)	(22,821,000)
304	Reklasifikasi Keluar	-	(4)	(43,916,000)	(4)	(43,916,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(4)	(1,596,213,407)	(4)	(1,596,213,407)	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	(155)	(364,233,730)	(136)	(348,261,730)	(19)	(15,972,000)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		717	9,906,559,769	513	9,830,021,539	204	76,538,230
000	Saldo Awal TAYL	-	680	8,625,135,195	476	8,548,596,965	204	76,538,230
101	Pembelian	-	25	877,780,797	25	877,780,797	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	13	407,011,755	13	407,011,755	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	9,924,000	0	9,924,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	265,000	0	265,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(265,000)	0	(265,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(1)	(13,291,978)	(1)	(13,291,978)	0	0
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		68	729,748,746	63	726,921,746	5	2,827,000
000	Saldo Awal TAYL	-	63	718,914,571	58	716,087,571	5	2,827,000
101	Pembelian	-	5	13,998,175	5	13,998,175	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	2	5,914,600	2	5,914,600	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(2)	(9,078,600)	(2)	(9,078,600)	0	0
308	ALAT LABORATORIUM		31	1,297,818,820	30	1,296,968,820	1	850,000
000	Saldo Awal TAYL	-	31	1,297,818,820	30	1,296,968,820	1	850,000
309	ALAT PERSENJATAAN		12	54,599,391	12	54,599,391	0	0



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13

Halaman : 4 dari 15

Kode Lap : lap_crbmn_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	-	7	36,743,000	7	36,743,000	0	0
101	Pembelian	-	5	17,856,391	5	17,856,391	0	0
310	KOMPUTER		2,433	176,018,857,113	2,406	176,010,227,613	27	8,629,500
000	Saldo Awal TAYL	-	2,175	141,024,793,395	2,148	141,016,163,895	27	8,629,500
101	Pembelian	-	290	37,590,958,737	290	37,590,958,737	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	6	29,336,260	6	29,336,260	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	2,475,000,000	0	2,475,000,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	500,157,120	0	500,157,120	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(5,076,075,019)	0	(5,076,075,019)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(36)	(514,093,380)	(36)	(514,093,380)	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	(2)	(11,220,000)	(2)	(11,220,000)	0	0
311	ALAT EKSPLORASI		2	8,030,000	2	8,030,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	2	8,030,000	2	8,030,000	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA		13	340,944,960	13	340,944,960	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	13	340,944,960	13	340,944,960	0	0
316	ALAT PERAGA		4	74,000,000	4	74,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	4	74,000,000	4	74,000,000	0	0
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		58	1,124,859,082	58	1,124,859,082	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	51	888,104,232	51	888,104,232	0	0
101	Pembelian	-	9	268,214,850	9	268,214,850	0	0
102	Transfer Masuk	-	2	3,725,700	2	3,725,700	0	0
302	Transfer Keluar	-	(2)	(3,725,700)	(2)	(3,725,700)	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	(2)	(31,460,000)	(2)	(31,460,000)	0	0



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13
Halaman : 5 dari 15
Kode Lap : lap_crbrmn_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	PERALATAN OLAH RAGA		21	267,369,200	21	267,369,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	21	267,369,200	21	267,369,200	0	0
320	PERALATAN KEIMIGRASIAN		1	60,495,000	1	60,495,000	0	0
101	Pembelian	-	1	60,495,000	1	60,495,000	0	0
TOTAL				275,241,583,572		274,611,037,042		630,546,530



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13
Halaman : 6 dari 15
Kode Lap : lap_crbrmn_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	BANGUNAN GEDUNG		5	235,324,143,957	5	235,324,143,957	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	5	235,138,833,394	5	235,138,833,394	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	198,801,000	0	198,801,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(13,490,437)	0	(13,490,437)	0	0
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		1	322,414,070	1	322,414,070	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	322,414,070	1	322,414,070	0	0
TOTAL				235,646,558,027		235,646,558,027		0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
134111 Jalan dan Jembatan

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13
Halaman : 7 dari 15
Kode Lap : lap_crbm_n_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	JALAN DAN JEMBATAN		1	149,962,000	1	149,962,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	149,962,000	1	149,962,000	0	0
TOTAL				149,962,000		149,962,000		0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
134113 Jaringan

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13
Halaman : 8 dari 15
Kode Lap : lap_crbm_n_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
503	INSTALASI		2	85,640,000	2	85,640,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	2	85,640,000	2	85,640,000	0	0
TOTAL				85,640,000		85,640,000		0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13

Halaman : 9 dari 15

135121 Aset Tetap Lainnya

Kode Lap : lap_crbm_n_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601	BAHAN PERPUSTAKAAN		3,242	1,100,949,990	3,242	1,100,949,990	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	599	1,047,487,390	599	1,047,487,390	0	0
100	Saldo Awal	-	2,508	188,260,506	2,508	188,260,506	0	0
101	Pembelian	-	121	50,000,000	121	50,000,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	23	3,462,600	23	3,462,600	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	96	0	96	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(9)	(188,260,602)	(9)	(188,260,602)	0	0
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		10	61,382,500	10	61,382,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	10	61,382,500	10	61,382,500	0	0
TOTAL				1,162,332,490		1,162,332,490		0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13
Halaman : 10 dari 15
Kode Lap : lap_crbm_n_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		17	0	17	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	18	1,669,142,180	18	1,669,142,180	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	-	8	3,217,128,000	8	3,217,128,000	0	0
503	Pengembangan KDP	-	0	2,452,222,000	0	2,452,222,000	0	0
588	Reklasifikasi Dari Aset KDP ke Aset KDP Lainnya	-	(1)	(1,669,142,180)	(1)	(1,669,142,180)	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-	(8)	(5,669,350,000)	(8)	(5,669,350,000)	0	0
TOTAL				0		0		0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
162151 Software

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13
Halaman : 11 dari 15
Kode Lap : lap_crbrmn_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		185	28,981,301,413	185	28,981,301,413	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	242	28,238,445,140	242	28,238,445,140	0	0
101	Pembelian	-	3	742,856,273	3	742,856,273	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	100	455,100,000	100	455,100,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	7,248,703,684	0	7,248,703,684	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(3,600,000)	0	(3,600,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(160)	(7,700,203,684)	(160)	(7,700,203,684)	0	0
TOTAL				28,981,301,413		28,981,301,413		0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

162161 Lisensi

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13

Halaman : 12 dari 15

Kode Lap : lap_crbm_n_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		25	26,361,028,579	25	26,361,028,579	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	20	20,072,899,520	20	20,072,899,520	0	0
101	Pembelian	-	2	2,982,490,578	2	2,982,490,578	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	3	3,023,603,686	3	3,023,603,686	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	282,034,795	0	282,034,795	0	0
TOTAL				26,361,028,579		26,361,028,579		0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
162191 Aset Tak Berwujud Lainnya

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13
Halaman : 13 dari 15
Kode Lap : lap_crbm_n_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		1	48,015,000	1	48,015,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	48,015,000	1	48,015,000	0	0
TOTAL				48,015,000		48,015,000		0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13

Halaman : 14 dari 15

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Kode Lap : lap_crblmn_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	ALAT BESAR		0	0	0	0	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	6	2,460,941,820	6	2,460,941,820	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(6)	(2,460,941,820)	(6)	(2,460,941,820)	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		1	247,500	0	0	1	247,500
000	Saldo Awal TAYL	-	2	303,847,500	1	303,600,000	1	247,500
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	155	364,233,730	136	348,261,730	19	15,972,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(156)	(667,833,730)	(137)	(651,861,730)	(19)	(15,972,000)
310	KOMPUTER		0	0	0	0	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	2	11,220,000	2	11,220,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(2)	(11,220,000)	(2)	(11,220,000)	0	0
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		0	0	0	0	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	2	31,460,000	2	31,460,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(2)	(31,460,000)	(2)	(31,460,000)	0	0
TOTAL				247,500		0		247,500



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA KL : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tanggal : 07/05/2026 08.32.13

Halaman : 15 dari 15

166115 Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi

Kode Lap : lap_crbm_n_kl_poc

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		1	1,669,142,180	1	1,669,142,180	0	0
551	Penghentian Sementara KDP	-	1	1,669,142,180	1	1,669,142,180	0	0
TOTAL				1,669,142,180		1,669,142,180		0



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK RINGAN
PER DESEMBER 2025

NAMA UAPB : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KODE UAPB : 078

Tanggal : 04/05/2026 16.17.41
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : LKBT-PKPB1

NO	SUB SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SATUAN	HARGA PEROLEHAN	KONDISI		
	KODE BARANG	NAMA BARANG				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	2	Unit	6,231,000	0	1	0
JUMLAH Sepeda Motor					6,231,000	0	1	0
2	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	22	Buah	1,740,800	0	1	0
JUMLAH Lemari Besi/Metal					1,740,800	0	1	0
3	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	Unit	28,072,324,000	0	1	0
JUMLAH Bangunan Gedung Kantor Permanen					28,072,324,000	0	1	0



LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK BERAT
PER DESEMBER 2025

NAMA UAPB : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KODE UAPB : 078

Tanggal : 04/05/2026 17.21.45
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : LKBT-PKPB1

NO	SUB SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SATUAN	HARGA PEROLEHAN	KONDISI		
	KODE BARANG	NAMA BARANG				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH null								





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





M Hasil Rekonsiliasi SAKTI-SPAN

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BA 078

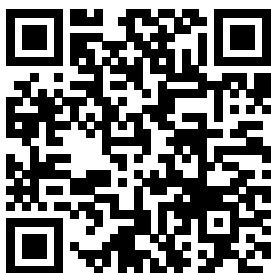
NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

LAPORAN KEUANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(PPATK) (BA078) TAHUN 2025
Nomor: NKF-82/078/PB.06/2026

Pada hari **Jumat, 08 Mei 2026**, telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** yang menyepakati angka-angka sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan ini. **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) (BA 078)** akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan Tahun 2025 secara lengkap kepada Ditjen Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara **paling lambat tanggal 08 Mei 2026.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No	Nama	Unit Instansi
1	Puri Widyaksari, Kepala Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) – selaku Penyusun LKKL
2	Darnadi, Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara II	DJKN – selaku Penyusun LBMN
3	Joko Supriyanto, Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	DJPb – selaku Penyusun LKPP
4	Anik Pratiwi Rahayu Purwaning, Pengendali Teknis Pemeriksaan	BPK RI - selaku Auditor BPK K/L





Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl Ir. H. Juanda No. 35, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120

Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922

Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826

Email : Contact-us@ppatk.go.id

Website : www.ppatk.go.id